

Laporan Survei

Jajak Pendapat Masyarakat Mengenai Integrasi Sosial Terkait Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia: Kabupaten-Kota Bogor dan Kota Pekanbaru

Nino Viartasiwi
Ikraha Ramadhani



JANUARI 2022
RDI - URBAN REFUGEE RESEARCH GROUP

SPF rdi RUREF

Laporan Survei

Jajak Pendapat Masyarakat Mengenai Integrasi Sosial Terkait Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia: Kabupaten-Kota Bogor dan Kota Pekanbaru

Nino Viartasiwi
Ikhrana Ramadhani

Januari 2022
Resilience Development Initiative
Bandung, Indonesia



Laporan Survei

Jajak Pendapat Masyarakat Mengenai Integrasi Sosial
Terkait Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di
Indonesia: Kabupaten-Kota Bogor dan Kota Pekanbaru

Nino Viartasiwi
Ikrana Ramadhani

Dipublikasi oleh

RESILIENCE DEVELOPMENT INITIATIVE

Jl. Imperial II No.52, Dago Asri, Dago, Bandung 40135

RDI eBook series, No.12 (UREF) 20220101

RDI UREF – Tim Riset Jajak Pendapat Masyarakat:

- Nino Viartasiwi (Ketua Tim)
- Akino Tahir
- Risye Dwiyani
- Ayu Prestasia
- Ikrana Ramadhani (Asisten Riset)
- Marupa Hasudungan Sianturi (Peneliti Sukarelawan)
- Megan Selina Tanoyo (Peneliti Magang)

Kontak: Info@rdiuref.org

Website RDI: <https://www.rdi.or.id/>

Desain sampul dan tata letak oleh Thya Basmar (thyambasmar@gmail.com)

Copyrights ©2022 RESILIENCE DEVELOPMENT INITIATIVE

ISBN: 978-602-71186-4-5

Pernyataan dan Ucapan Terima Kasih

Jajak pendapat masyarakat ini dilaksanakan oleh Resilience Development Initiative – Urban Refugee Research Group (RDI UREF) dengan Pilar Data Research and Consulting bertindak sebagai kolaborator untuk pengumpulan data lapangan. RDI UREF mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua responden, koordinator lapangan, pewawancara lapangan, peneliti sukarelawan, organisasi mitra, pakar pengungsi, dan ahli statistik atas partisipasi aktif dan kontribusi mereka dalam proyek ini.

Survei ini dilaksanakan dengan pendanaan dari Sasakawa Peace Foundation sebagai bagian dari proyek penelitian RDI UREF 2021-2022. Informasi dan pendapat dalam laporan ini adalah milik penulis dan RDI UREF, dan tidak mewakili pendapat resmi dari donor. Tanggung jawab atas isi laporan ini sepenuhnya berada pada penulis dan RDI UREF.

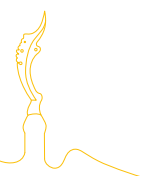


Ringkasan Eksekutif

Integrasi sosial pengungsi ke masyarakat negara transit adalah salah satu dari tiga solusi dalam *Durable Solutions* yang diusulkan oleh UNHCR untuk mengatasi krisis pengungsi global. Sebagai salah satu negara transit, Indonesia belum bersedia mendukung integrasi sosial. Namun, meningkatnya jumlah pengungsi dan terbatasnya kapasitas negara maju untuk menyerap mereka membuat integrasi sosial merupakan solusi yang manusiawi bagi para pengungsi yang mencari perlindungan sementara di tanah asing. Rata-rata, pengungsi di Indonesia harus menunggu lima tahun sebelum mendapat jawaban atas permohonan penempatan ke negara ketiga. Pengasingan dari masyarakat memperberat kehidupan pengungsi dan menghambat potensi untuk berkontribusi pada negara tuan rumah. Dengan demikian, integrasi sosial merupakan solusi sementara atas masa transit berkepanjangan para pengungsi dan perlindungan atas hak asasi mereka. Integrasi sosial akan menguntungkan pengungsi, komunitas tuan rumah, dan negara tuan rumah.

Survei ini menggali opini publik Indonesia tentang pengungsi asing dan pencari suaka yang tinggal sementara di Indonesia, kondisi integrasi sosial, dan hambatan integrasi. Kajian empiris ini dapat menjadi landasan bagi upaya integrasi sosial atau pembuatan kebijakan terkait pengungsi asing di Indonesia. Survei dilakukan di dua wilayah berpopulasi pengungsi: Bogor (gabungan Kabupaten dan Kota) dan Kota Pekanbaru. Survei ini dilakukan melalui wawancara terhadap 400 responden di setiap lokasi yang dipilih secara proporsional dengan menggunakan teknik *multistage random sampling*. Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan terpilih; dengan *oversampling* pada kecamatan berpopulasi pengungsi. Wawancara tatap muka dilakukan oleh pewawancara terlatih dengan kuesioner berisi total 163 pertanyaan. Survei mengevaluasi lima domain Kerangka Integrasi Sosial melalui pertanyaan tematik.

Temuan survei. **Pemahaman Situasi Pengungsi**, masyarakat tidak terlalu memahami krisis pengungsi global, situasi pengungsi asing di Indonesia atau kota-kota mereka; namun, publik berpendapat bahwa pengungsi berada di negara transit karena lari dari kekerasan. **Hubungan Sosial antara Pengungsi dan Penduduk Lokal**, ketidakmampuan pengungsi untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan status mereka sebagai orang asing menjadi hambatan bagi publik untuk berinteraksi dengan mereka. **Kemungkinan Integrasi**, pendapat publik tentang kemungkinan integrasi bervariasi tergantung pada isunya, mulai dari penerimaan hingga keraguan. **Ketahanan dan Solidaritas Masyarakat Lokal**, ketahanan dan simpati masyarakat lokal terhadap pengungsi pada umumnya



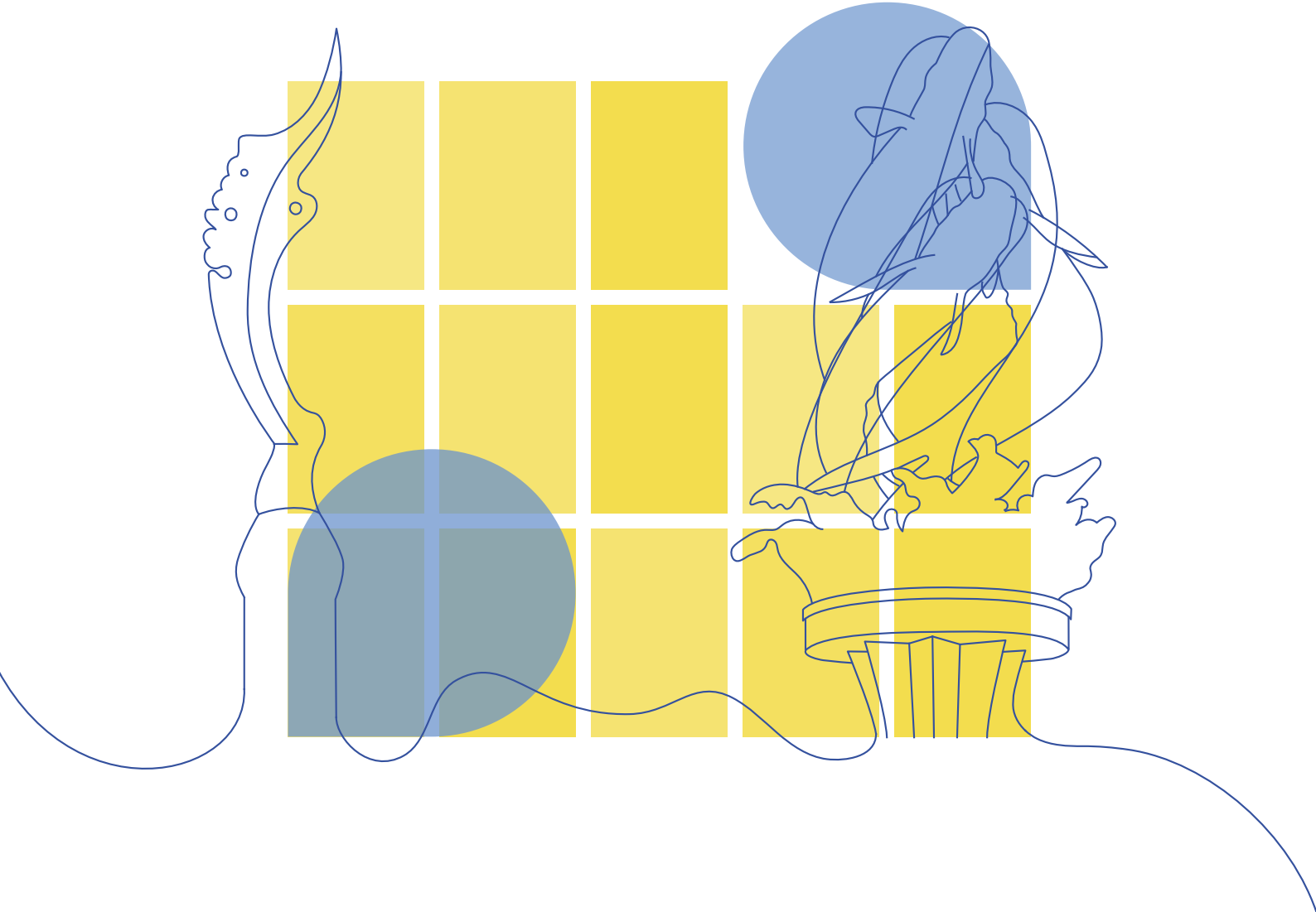
positif. **Kegiatan Masyarakat**, publik setuju jika pengungsi berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. **Akses Pengungsi ke Penghidupan – Hak Anak Pengungsi**, publik memahami kesulitan yang dialami anak-anak pengungsi, sehingga sentimen publik terhadap hak dan kebutuhan anak pengungsi cukup positif. **Akses Pengungsi ke Penghidupan – Layanan Kesehatan Pengungsi**, masyarakat tidak menentang jika pengungsi menggunakan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah, termasuk selama Pandemi COVID-19. **Hak Asasi Pengungsi**, masyarakat umumnya lebih suka membatasi kebebasan bergerak pengungsi. Namun, mereka memahami pentingnya mengizinkan pengungsi bekerja mencari nafkah. **Hak atas Pekerjaan dan Kontribusi Pengungsi terhadap Ekonomi**, publik tidak menentang pengungsi yang bekerja di sektor ekonomi tertentu dan bersedia bekerja berdampingan dengan mereka. Kemampuan pengungsi berbahasa Indonesia dan kesamaan agama akan memotivasi publik untuk berinteraksi dengan pengungsi.



Daftar Isi

Pernyataan dan Ucapan Terima kasih	1
Ringkasan Eksekutif	2
1. Pengantar	6
2. Tujuan Survei	10
3. Metodologi	12
4. Temuan Utama	15
5. Pertanyaan Kunci dan Jawaban	
5.1. Pemahaman Umum terkait Situasi Pengungsi	21
5.2. Hubungan Sosial antara Komunitas Pengungsi dan Masyarakat Lokal	31
5.3. Peluang Integrasi Sosial	35
5.4. Ketahanan dan Solidaritas Masyarakat Lokal	40
5.5. Kegiatan Kemasyarakatan	44
5.6. Akses untuk Penghidupan bagi Pengungsi	46
Hak Pengungsi Anak	47
Layanan Kesehatan bagi Pengungsi Luar Negeri	58
5.7. Hak Asasi Pengungsi	63
5.8. Hak untuk Bekerja dan Kontribusi Pengungsi terhadap Perekonomian	69
6. Kesimpulan	84
Referensi	87
Tambahan	
Profil Demografi Responden - dalam Persentase	88

1 Pengantar



1. Pengantar

Hingga akhir tahun 2020, terdapat 82,4 juta orang di seluruh dunia yang berada dalam pengungsian paksa. Menurut badan pengungsi PBB, UNHCR, bahkan di tengah pandemi COVID-19 jumlah pengungsi terus meningkat. Saat ini, satu dari setiap 95 orang adalah pengungsi. Artinya, lebih dari satu persen populasi dunia berada dalam pengungsian.¹ Pada tahun 2020, sekitar 3,4 juta pengungsi telah kembali ke negara asal mereka, dan hanya 34.400 orang yang mendapat kesempatan bermukim di negara ketiga.² Krisis pengungsi global membuat masa tunggu bagi para pengungsi yang saat ini terdampar di berbagai negara transit kian berkepanjangan.

Pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka di Indonesia juga menghadapi kesulitan yang sama sebagaimana halnya pengungsi di negara transit lainnya. Per September 2021, Indonesia menampung sekitar 13.000 pengungsi dari kurang lebih 40 negara.³ Pada tahun 2020, 391 pengungsi telah berangkat untuk penempatan di negara ketiga dan 84 orang telah pulang sukarela ke negara asalnya.⁴ Dengan angka tahunan penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela ke negara asal berada di kisaran 3% sampai 4% dari populasi pengungsi, setiap pengungsi kemungkinan besar harus tinggal dalam penantian di Indonesia selama lebih dari lima tahun.

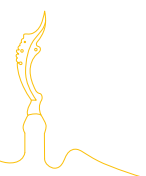
Indonesia adalah negara yang tidak ikut menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967 Terkait Status Pengungsi. Karena statusnya bukan penandatanganan Konvensi, Indonesia mengambil tanggung jawab minimum terhadap pengungsi di wilayahnya. Hal itu tercermin dalam satu-satunya peraturan khusus Indonesia tentang pengungsi asing, yakni Peraturan Presiden Nomor 125/2016, di mana peraturan tersebut tidak mengatur tentang transit berkepanjangan para pengungsi. Untuk mengatasi realitas masa tunggu yang panjang bagi para pengungsi, UNHCR memperkenalkan konsep “*durable solutions*” yang menargetkan pencapaian salah satu dari tiga opsi. Yaitu integrasi lokal di negara suaka, pemulangan sukarela ke negara asal, atau penempatan ke negara ketiga. Namun, karena pemerintah Indonesia enggan memberikan izin bagi integrasi pengungsi ke dalam komunitas lokal Indonesia, sedangkan opsi 2 dan 3 sangat terbatas, UNHCR Indonesia mencari alternatif dengan “*comprehensive solutions*” bagi pengungsi di Indonesia. Solusi komprehensif mencari cara kreatif

¹ UNHCR, “Global Trends in Forced Displacement – 2020” (Denmark: UNHCR, 18 Juni 2021), <https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html>.

² UNHCR.

³ UNHCR Indonesia, “Figures at A Glance.” diakses pada 10 November 2021. <https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>

⁴ UNHCR Indonesia, “Figures at A Glance”; UNHCR Indonesia, Fact Sheet Indonesia August 2021, diakses pada 10 November 2021.



untuk membantu pengungsi mencapai kemandirian melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan, jika keadaan memungkinkan, melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.⁵

Survei ini dimulai dengan premis bahwa integrasi sosial adalah salah satu jawaban untuk mengatasi krisis kepengungsian berkepanjangan di Indonesia. Alasannya, pengungsi meskipun berstatus sebagai tamu telah berbagi ruang, tempat, dan sumber daya dengan komunitas lokal Indonesia. Kehadiran pengungsi dalam jangka waktu yang lama tentu akan berdampak pada masyarakat tuan rumah secara sosial, kultural, dan lingkungan. Marginalisasi pengungsi dan rendahnya interaksi dengan masyarakat lokal akan meningkatkan kemungkinan kesalahpahaman dan konflik.⁶ Oleh karena itu, integrasi sosial antar masyarakat diperlukan untuk mencapai kehidupan yang harmonis yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan pembangunan untuk bergerak. Transit yang berkepanjangan dan marginalisasi juga menghilangkan potensi pengungsi untuk berkontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menghambat integrasi sosial antara pengungsi dengan warga lokal juga dapat berarti menghambat proses pembangunan dan potensi positif hasil dari proses sosial masyarakat. Selanjutnya, meskipun pengungsi bukan warga negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi mereka tetap berada di pundak pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, mengingkari hak-hak pengungsi untuk berintegrasi dengan komunitas lokal dan mengakses peluang mata pencaharian berarti juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan memenuhi kewajiban kepada masyarakat.⁷

Integrasi sosial adalah fokus utama studi ini. Studi ini sependapat dengan pandangan Atfield dkk. tentang integrasi sebagai proses dua arah yang melibatkan penyesuaian timbal balik dari masyarakat tuan rumah dan komunitas pengungsi, serta konteks lokalitas dalam integrasi.⁸ Biasanya, komunitas tuan rumah rentan terhadap isu pengungsi dan orang asing.⁹ Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan yang mendorong integrasi sosial, persepsi asli masyarakat terhadap pengungsi perlu untuk dipahami. Untuk indikator mengukur integrasi sosial, survei ini menggunakan kerangka konseptual Integrasi Sosial dari Ager

⁵ UNHCR Indonesia, "Comprehensive Solutions," diakses pada 10 November 2021, <https://www.unhcr.org/id/en/comprehensive-solutions>.

⁶ Alison B. Strang and Neil Quinn, "Integration or Isolation? Refugees' Social Connections and Wellbeing," *Journal of Refugee Studies*, 29 Juni 2019, <https://doi.org/10.1093/jrs/fez040>.

⁷ United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," Universal Declaration of Human Rights, diakses pada 12 Desember 2021, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

⁸ Gaby Atfield, Kavita Brahmhatt, and Therese O'Toole, "Refugees' Experiences of Integration" (Refugee Council and University of Birmingham, 2007).

⁹ Mengenai studi tentang komunitas tu an rumah, lihat Weng, Suzie S, and Shinwoo Choi. "Examining Refugee Integration: Perspective of Community Members." *Journal of Refugee Studies* 34, no. 1 (13 Juli 2019): 354–373. <https://doi.org/10.1093/jrs/fez049>. Mengenai tendensi sensitifitas masyarakat Indonesia pada orang asing, lihat Bayu, Dimas Jarot. "Jokowi Minta Masyarakat Tak Anti Asing" Katadata. 18 September 2019. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4e6d82fed/jokowi-minta-masyarakat-tak-anti-asing>

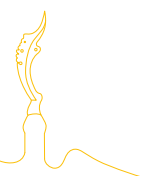


dan Strang yang mengidentifikasi sepuluh domain integrasi.¹⁰ Survei ini memilih domain yang relevan dengan pengungsi berkonteks transit dan faktor lokalitas. Domain yang diukur adalah pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hubungan sosial, pengetahuan bahasa dan budaya, serta keamanan dan stabilitas. Survei ini berfokus pada pengalaman masyarakat lokal dan prospek keterlibatan dengan pengungsi di kota-kota yang telah ditentukan dalam domain yang dipilih.

Daerah yang terpilih untuk survei adalah Bogor (Kota dan Kabupaten) dan Kota Pekanbaru. Kedua wilayah ini dipilih berdasarkan pada perbedaan karakteristik dua komunitas pengungsi. Bogor merupakan daerah paling padat pengungsi dengan kurang lebih 4.000 pengungsi yang merupakan pengungsi mandiri. Pengungsi mandiri adalah mereka yang tidak menerima bantuan hidup dari International Organization for Migration (IOM). Kota Pekanbaru adalah rumah bagi sekitar 900 pengungsi, yang sebagian besar mendapatkan bantuan hidup dari IOM berupa tempat tinggal, santunan bulanan, kesempatan pendidikan untuk anak-anak pengungsi, dan pelayanan kesehatan. Bogor menempati peringkat pertama di antara enam kota dengan populasi pengungsi terbesar, sedangkan Pekanbaru menempati peringkat keenam.¹¹ Sebagai tambahan, para pengungsi di Kota Pekanbaru tinggal di lingkungan perkotaan dalam akomodasi yang tertutup dan terasing dari masyarakat setempat. Sedangkan pengungsi di Bogor tinggal di lingkungan pinggiran kota di antara penduduk setempat dalam rumah sewa atau kos milik penduduk setempat. Perbedaan gaya hidup dua populasi pengungsi tersebut mungkin berdampak pada bagaimana komunitas lokal berinteraksi dengan pengungsi.

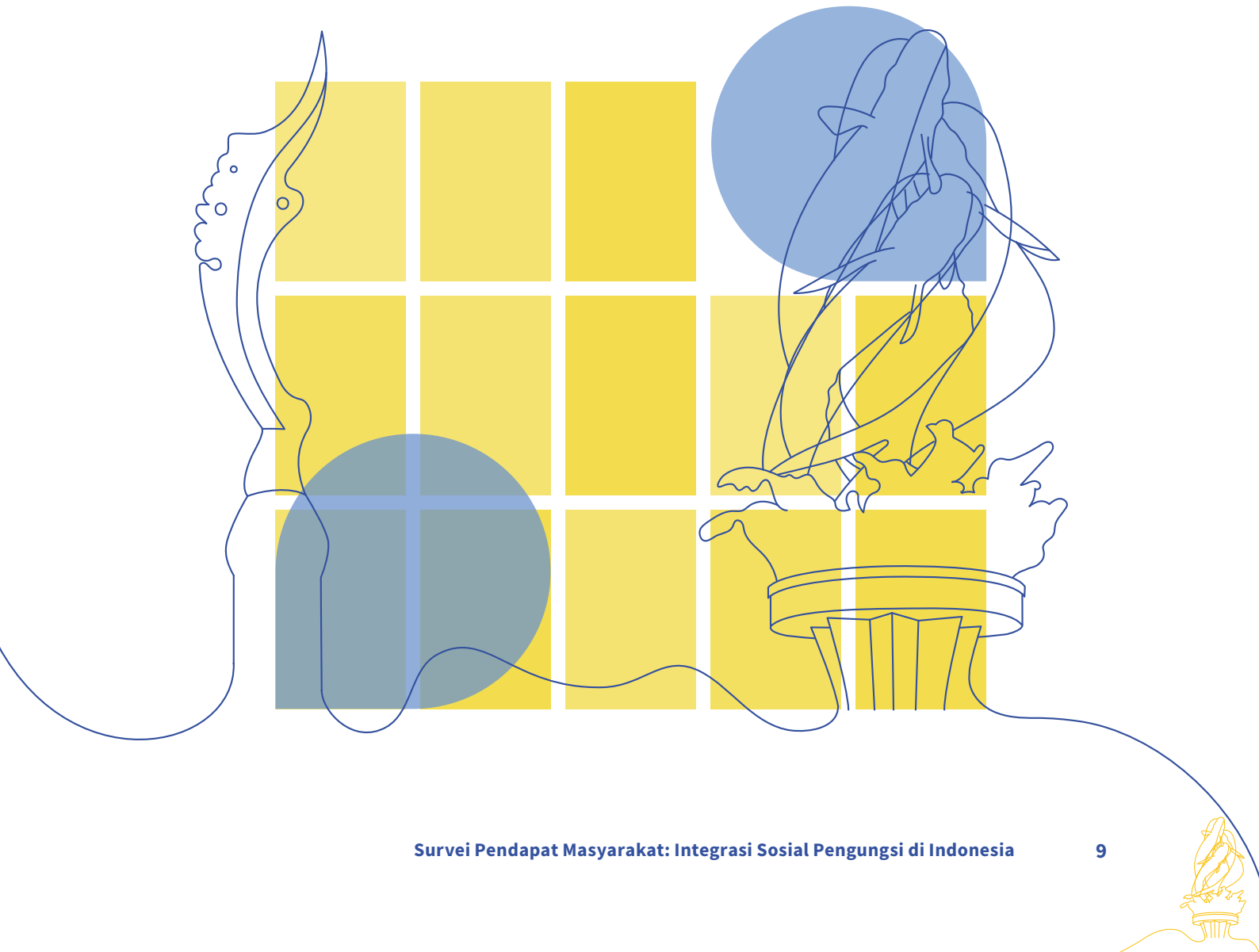
¹⁰ Alastair Ager and Alison B. Strang, "Understanding Integration: A Conceptual Framework," *Journal of Refugee Studies* 21, no. 2 (18 April 2008): 166–91, <https://doi.org/10.1093/jrs/fen016>.

¹¹ UNHCR Indonesia, "Monthly Statistics March 2021." Diakses pada 10 April 2021. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Monthly-Statistical-Report-March-2021.pdf>.



2

Tujuan Survei

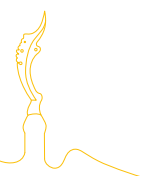


2. Tujuan Survei

Survei ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengungsi dan pencari suka di Indonesia serta menggal tantangan integrasi sosial pengungsi. Survei secara khusus mengkaji tentang kesiapan masyarakat Indonesia untuk menerima pengungsi ke dalam masyarakat. Studi ini mengeksplorasi status integrasi sosial masyarakat lokal Indonesia saat ini, persepsi publik tentang pengungsi yang tinggal di antara mereka, dan persepsi publik jika pengungsi dan pencari suka mendapat akses ke komunitas lokal dan akses ke penghidupan. Survei berusaha untuk memperoleh tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan utama berikut:

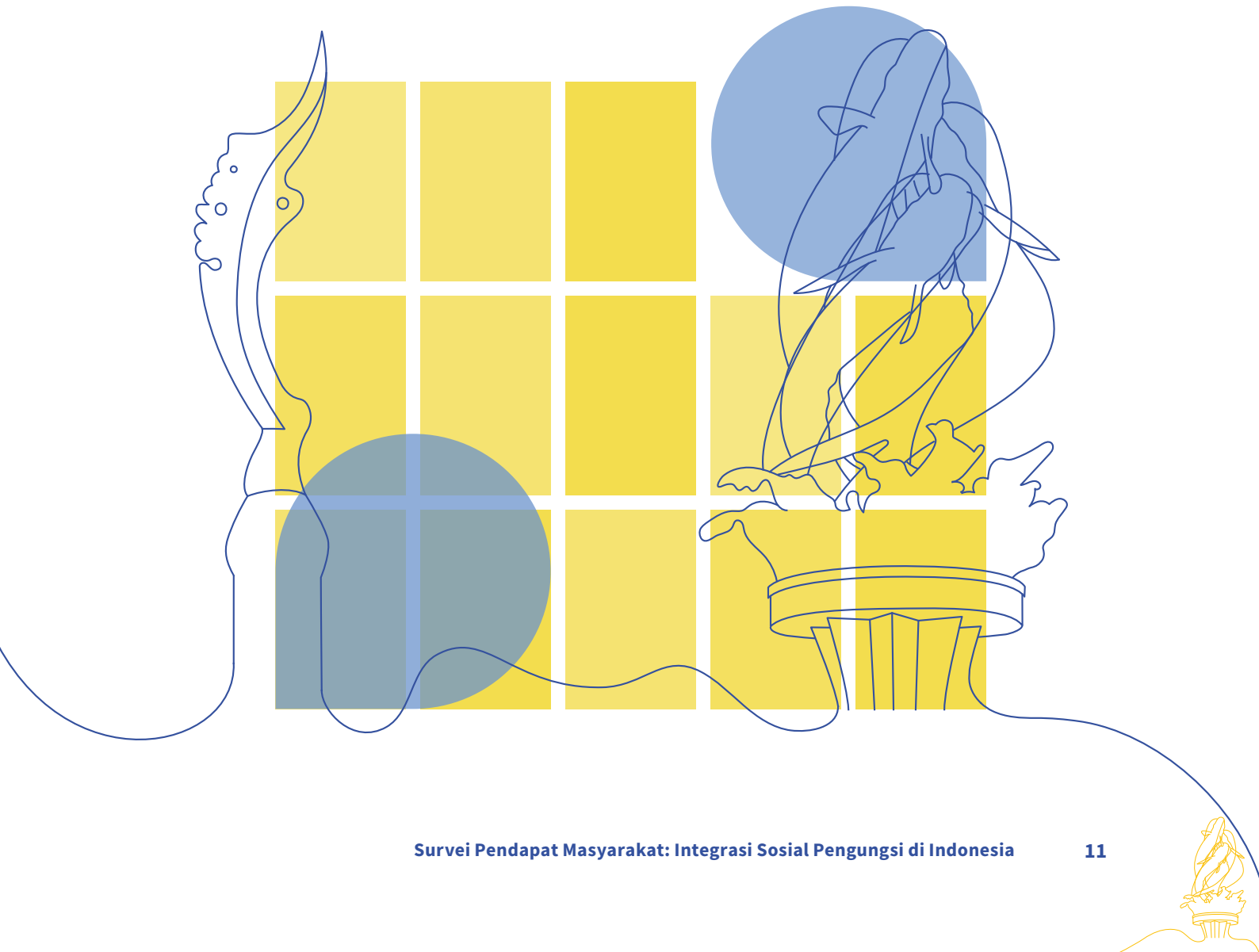
1. Bagaimana pandangan dan pemahaman umum masyarakat Bogor (Kabupaten dan Kota) dan Kota Pekanbaru terhadap isu migrasi paksa?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengungsi di Bogor (Kabupaten dan Kota) dan Kota Pekanbaru, serta pengalaman interaksi mereka saat ini?
3. Bagaimana persepsi masyarakat jika pengungsi dan pencari suka diberikan akses penghidupan (pekerjaan, pendidikan dan kesehatan)?

Survei ini adalah studi empiris yang dapat digunakan untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan berbasis data bagi pemerintah, sebagai masukan untuk program sosial masyarakat sipil dan upaya advokasi, dan data primer untuk penelitian akademis lebih lanjut.



3

Metodologi



3. Metodologi

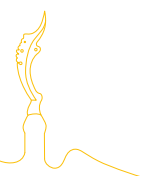
Survei dibagi menjadi dua bagian: Bogor (gabungan Kota dan Kabupaten) dan Kota Pekanbaru. Survei di kedua unit menggunakan metode pengambilan sampel acak berjenjang (*multistage random sampling*). Jumlah sampel tiap unit adalah 400 orang. Kisaran usia responden adalah 18 hingga 65 tahun. Dengan asumsi metode pengambilan sampel acak sederhana, ukuran sampel 400 responden memiliki *Margin of Error* (MoE; toleransi kesalahan) sekitar $\pm 5\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk Bogor, sampel berasal dari kecamatan di mana komunitas pengungsi berada dan kecamatan yang berdekatan. Untuk Pekanbaru, sampel diambil dari seluruh kecamatan di dalam kota. Kecamatan dengan komunitas pengungsi di kedua unit menerima 25% *oversampling*.

Tahapan pemilihan responden:

1. Dari kecamatan terpilih, desa ditentukan menggunakan metode acak sederhana.
2. Dari setiap desa terpilih, lima Rukun Tetangga dipilih dari setiap desa dengan menggunakan simple random sampling.
3. Di setiap Rukun Tetangga yang terpilih, dua keluarga dipilih menggunakan metode simple random sampling.
4. Dari setiap keluarga terpilih, dipilih satu orang (perempuan atau laki-laki) sebagai responden dengan metode Kish Grid.

Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara dengan dibantu kuesioner. Kuesioner dan wawancara adalah dalam bahasa Indonesia. Semua pewawancara adalah mahasiswa atau lulusan universitas. Mengingat survei dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19, semua pewawancara wajib telah divaksinasi lengkap dengan vaksin COVID-19. Pelatihan bagi pewawancara dan sesi wawancara dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Pengendalian kualitas hasil wawancara dilakukan secara acak terhadap 20% dari total sampel oleh supervisor melalui telepon ke responden atau dengan kunjungan ke responden terpilih (spot check). Dalam pengendalian kualitas, tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Wawancara lapangan di Bogor berlangsung dari tanggal 9 hingga 16 November 2021. Wawancara lapangan di Pekanbaru berlangsung antara tanggal 9 hingga 25 November 2021.

Kuesioner untuk survei ini dikembangkan berdasarkan tinjauan pustaka tentang pengungsi perkotaan di Indonesia dan penelitian kualitatif. Selain itu, dua lokakarya diadakan untuk mendapatkan masukan dari para ahli. Lokakarya pertama dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pertanyaan, dengan ahli pengungsi sebagai pembahas. Lokakarya kedua adalah tentang metodologi



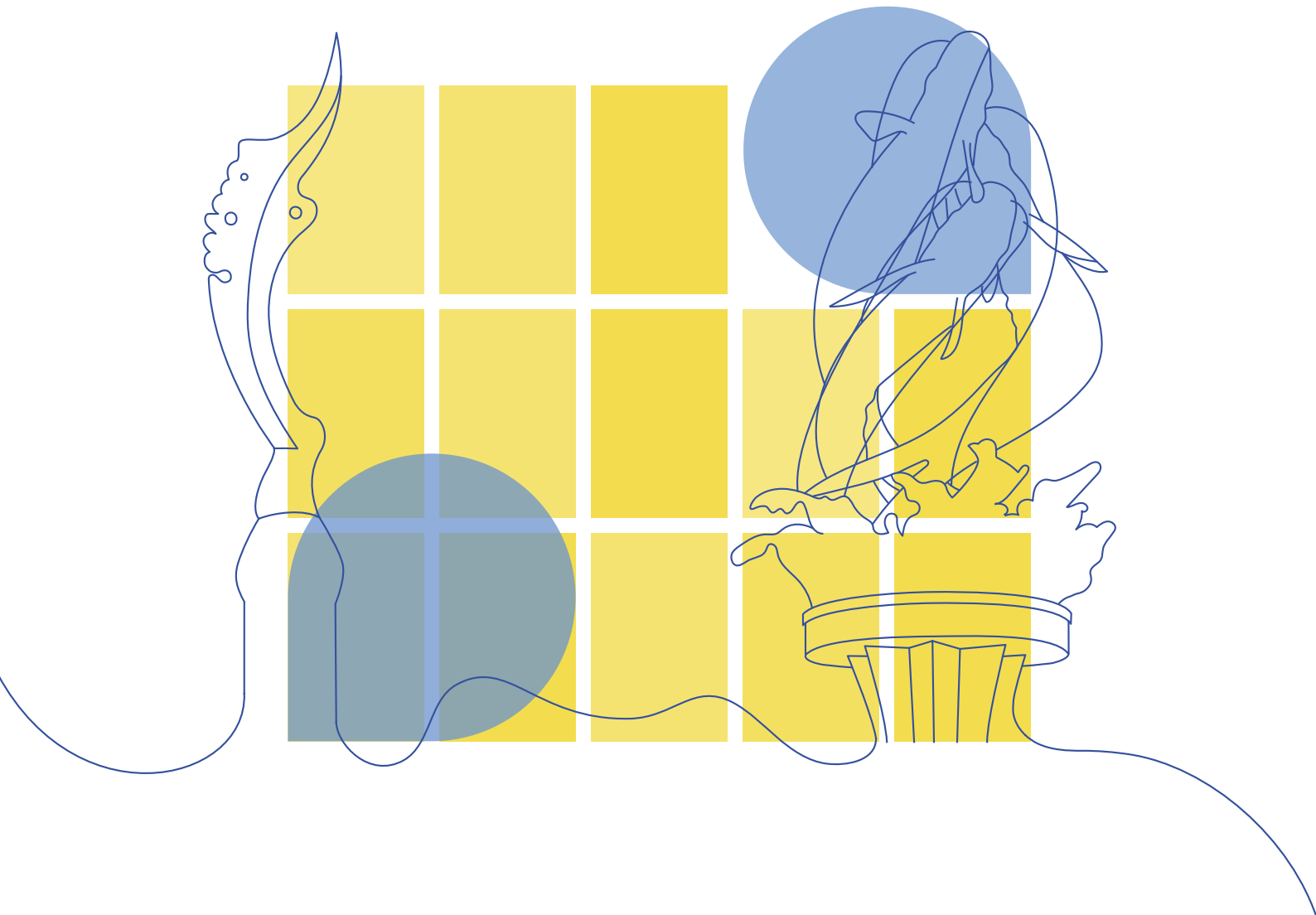
survei dan analisis statistik, dengan ahli statistik sebagai pembahas. Kuesioner berisi total 163 pertanyaan; namun, setiap responden menjawab antara 120 dan 148 pertanyaan, tergantung pada variasi tanggapan dan metode lompat yang diterapkan untuk pertanyaan tertentu.

Mengenai etika survei, semua responden berpartisipasi secara sukarela, telah menandatangani formulir persetujuan, dan dijamin anonimitas dan kerahasiaan mereka. Tanggapan responden dalam kuesioner diberi kode dan kuesioner disimpan untuk melindungi identitas responden, sedangkan data mentah didokumentasikan dan dapat diakses untuk akuntabilitas.



4

Temuan Utama



4. Temuan Utama

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terpilih yang ada dalam laporan ini, bab ini menyoroti kesimpulan-kesimpulan penting survei tersebut. Data secara rinci dapat ditemukan di Bab 5.

Tentang Pemahaman Umum Situasi Pengungsi

Masyarakat pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai krisis pengungsi. Hanya 32,25% responden Pekanbaru dan 21,5% responden Bogor yang mengetahui keberadaan pengungsi dan pencari suaka di dunia. Sentimen serupa juga terungkap terkait kesadaran masyarakat terhadap pengungsi yang tinggal sementara di Indonesia. Meskipun kota mereka merupakan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi, hanya 30% responden Pekanbaru dan 19,45% responden Bogor yang mengetahui keberadaan pengungsi dan pencari suaka di kota mereka. Namun, terkait pemahaman mengenai alasan pengungsi mencari perlindungan, sebagian besar responden yakin bahwa pengungsi dan pencari suaka melarikan diri dari kekerasan.

Mengenai diskusi terkait pihak yang bertanggung jawab atas nasib pengungsi, mayoritas responden setuju bahwa negara asal adalah yang pertama, disusul oleh pengungsi itu sendiri. Responden juga berpendapat bahwa umat manusia (penduduk dunia) dan negara-negara sekitarnya mestinya turut berbagi tanggung jawab pada pengungsi. Responden memahami bahwa pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia adalah tinggal untuk sementara waktu atau sebagai persinggahan dalam perjalanan ke negara ketiga di negara maju atau di salah satu negara tetangga. Responden di kedua kota yakin bahwa pengungsi berada di Indonesia untuk mencari perlindungan. Namun, perlu untuk dicatat bahwa 24,5% responden Bogor merasa bahwa pengungsi berada di Indonesia juga untuk alasan mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Tentang alasan Indonesia mengizinkan pengungsi dan pencari suaka untuk transit di negara ini, sebagian besar responden percaya bahwa alasan utamanya adalah kemanusiaan. Faktor lainnya adalah peran Indonesia di dunia internasional dan nilai-nilai bangsa. Selain itu, responden setuju bahwa pemerintah Indonesia harus melindungi pengungsi asing di Indonesia.

Tentang Hubungan Sosial Antara Komunitas Pengungsi dan Penduduk Setempat

Hambatan masyarakat Indonesia untuk bersosialisasi dengan pengungsi asing adalah kurangnya kemampuan bahasa Indonesia para pengungsi dan status mereka sebagai orang asing. Akan tetapi responden akan termotivasi



untuk bersosialisasi jika pengungsi yang memulai percakapan dan memahami budaya lokal. Sebagian besar responden juga tidak memiliki prasyarat khusus untuk berkomunikasi dengan pengungsi. Tetapi, bagi responden yang memiliki prasyarat untuk mengizinkan keluarga mereka berbaur dengan pengungsi, kemampuan pengungsi untuk berbicara bahasa Indonesia dan kesamaan agama adalah mendasar.

Tentang Peluang Integrasi

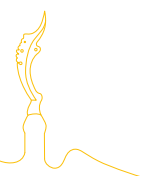
Mayoritas responden tidak setuju jika pengungsi dilibatkan dalam proses musyawarah di tingkat RT. Sedangkan mengenai pemberian kartu tanda penduduk bagi pengungsi yang tidak sama dengan kartu tanda penduduk (KTP) untuk masyarakat Indonesia asli, sebagian besar responden di Pekanbaru bersikap netral (36,75%) atau setuju (31,50%), sedangkan responden di Bogor sangat setuju (44,75%) dan netral (27,75%). Mayoritas responden bersikap netral pada gagasan pemberian izin bagi pengungsi untuk memiliki rekening bank. Pendapat responden tentang mengizinkan pengungsi menggunakan fasilitas umum seperti balai desa, balai RT/RW, taman umum, dan sejenisnya terbagi rata antara setuju, netral, dan tidak setuju. Gagasan agar pengungsi dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan sebagai administrator atau dalam peran struktural (kepemimpinan) ditentang oleh setengah dari responden.

Tentang Ketahanan dan Solidaritas Masyarakat Lokal

Lebih dari 37% responden di kedua kota menganggap bahwa interaksi sosial berada di urutan pertama sebagai dampak positif terhadap keberadaan pengungsi di suatu lingkungan. Urutan selanjutnya adalah pengayaan budaya yang dibawa pengungsi. Namun, responden juga mengkhawatirkan keamanan dan kemerosotan budaya lokal terkait kehadiran para pengungsi di masyarakat. Adapun mengenai kemampuan masyarakat untuk menerima dan hidup damai dengan pengungsi asing, mayoritas responden bersikap netral atau percaya pada kemampuan masyarakat.

Tentang Kegiatan Kemasyarakatan

Mayoritas responden terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan (82% di Pekanbaru dan 68,5% di Bogor), dan sekitar 70% responden tidak keberatan jika pengungsi asing berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.



Tentang Akses Penghidupan bagi Pengungsi

Tentang Hak-Hak Pengungsi Anak

Lebih dari separuh responden mengetahui atau pernah mendengar bahwa anak-anak termasuk di antara pengungsi di Indonesia. Mayoritas responden juga mengakui bahwa anak-anak adalah korban yang paling rentan, karena mereka dapat kehilangan masa depan, budaya, dan trauma akibat menjadi pengungsi. Mayoritas responden juga mengakui penting pendidikan bagi anak-anak pengungsi demi masa depan mereka. Sebagian besar responden menganggap orang tua dari anak-anak pengungsi dan pemerintah negara asal sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi anak-anak pengungsi. Akan tetapi, pemerintah negara transit juga ikut bertanggung jawab, meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah. Pihak lain yang dianggap mungkin untuk ikut memikul tanggung jawab terhadap anak-anak pengungsi adalah komunitas lokal di mana anak-anak pengungsi tinggal, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas pengungsi itu sendiri.

Tentang ide mengizinkan anak-anak pengungsi bersekolah di sekolah umum, responden di Pekanbaru setuju (34,75%) dan netral (42%) tentang, sedangkan responden di Bogor setuju (51,25%) dan netral (32,75%). Terkait gagasan memberikan fasilitas dan bantuan pendidikan kepada anak-anak pengungsi, termasuk biaya operasional sekolah, nomor induk siswa nasional, dan ijazah ketika lulus, 42,75% responden di Pekanbaru bersikap netral dan 46,75% responden di Bogor bersikap setuju. Mayoritas responden setuju bahwa remaja pengungsi harus diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti kelompok pemuda, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Mayoritas juga tidak keberatan anak-anaknya atau anggota keluarganya berbaur dengan anak-anak pengungsi seusia mereka baik di sekolah atau di luar sekolah.

Tentang Layanan Kesehatan Pengungsi

Pada gagasan tentang memberikan izin kepada pengungsi untuk menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan dengan membayar iuran, responden di Pekanbaru netral (37,5%) dan tidak setuju (33,25%), sedangkan responden di Bogor setuju (32,75%) dan netral (35%). Akan tetapi, mayoritas responden bersikap netral dan setuju dengan gagasan pengungsi dapat menerima Bansos (Bantuan Sosial) dari pemerintah. Selain itu, hanya antara 3% hingga 5% responden yang menentang gagasan agar bayi dan balita pengungsi ikut mendapat layanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di lingkungan mereka. Mengenai situasi terkait Pandemi COVID-19, lebih dari separuh responden setuju dan sangat setuju bahwa pengungsi bisa mendapatkan vaksinasi dari pemerintah dan ketika pengungsi terinfeksi COVID-19, mereka dapat menerima layanan kesehatan seperti halnya masyarakat lain di Indonesia.

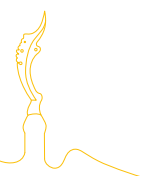


Tentang Hak Asasi Pengungsi

Mayoritas responden memilih untuk tidak setuju (39,75% di Pekanbaru dan 39,50% di Bogor) atau netral (36% di setiap wilayah) terhadap gagasan kebebasan bergerak bagi pengungsi. Di kedua lokasi, sekitar 47% responden memilih netral mengenai keberadaan pengungsi yang tinggal di wilayah perkotaan atau urban; 23% responden Pekanbaru sangat setuju dan setuju, sedangkan di Bogor 34% responden sangat setuju dan setuju. Namun, mengenai gagasan tentang penempatan pengungsi kamp-kamp dibandingkan dengan tinggal di kota, lebih dari 50% responden sangat setuju atau setuju dengan gagasan tersebut; yang memilih netral adalah 41,25% di Pekanbaru dan 32,5% di Bogor. Responden di Pekanbaru dan Bogor bersikap positif terhadap anak-anak pengungsi, dengan 45% dan 57,25% setuju, dan netral (40,5% dan 30,75%) terkait pemberian hak pendidikan yang sama kepada anak-anak dan remaja pengungsi sebagaimana anak-anak dan remaja Indonesia. Sebagian besar responden juga berpendapat bahwa pengungsi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan kesehatan seperti orang Indonesia. Mengenai gagasan pengungsi luar negeri memiliki hak untuk bekerja atau mencari nafkah seperti masyarakat pada umumnya, sebagian besar responden di kedua kota bersikap netral (44%) dan setuju (28,75% di Pekanbaru dan 33,5% di Bogor).

Tentang Hak untuk Bekerja dan Kontribusi Pengungsi terhadap Ekonomi

Sebagian besar responden bersikap netral tetapi cenderung setuju dengan gagasan bahwa pengungsi dapat mengakses pasar kerja melalui hak untuk memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan. Tetapi terkait dengan gagasan mengizinkan pengungsi bekerja di sektor pemerintah, lebih dari setengah dari responden tidak setuju atau sangat tidak setuju. Sebagian besar responden bersikap netral tetapi cenderung tidak setuju jika ada kesempatan bagi pengungsi untuk bekerja di sektor swasta menengah, seperti pegawai bank atau guru di sekolah swasta. Sedangkan pada peluang pengungsi asing untuk bekerja di sektor swasta kecil seperti menjadi buruh bangunan, pegawai toko, sopir, dan sejenisnya, sebagian besar responden setuju (sekitar 39%) dan netral (sekitar 40%). Tentang peluang pengungsi menjadi guru kontrak di sekolah negeri, sebagian besar bersikap netral (sekitar 40%) dan tidak setuju (35,75% di Pekanbaru dan 32% di Bogor). Mayoritas responden bersikap netral atau setuju jika pengungsi mendapat kesempatan untuk berdagang di pasar bersama masyarakat. Terkait pengungsi yang bekerja sebagai wiraswasta sebagai penjahit, jasa perbaikan, dan lainnya, 40% responden di kedua kota setuju, sementara 40% lainnya netral. Mayoritas responden mendukung atau netral terhadap gagasan pengungsi menjadi wajib pajak jika memenuhi syarat (di Pekanbaru, 11,53% sangat setuju, 27,32% setuju, dan 45,11% netral; di Bogor,



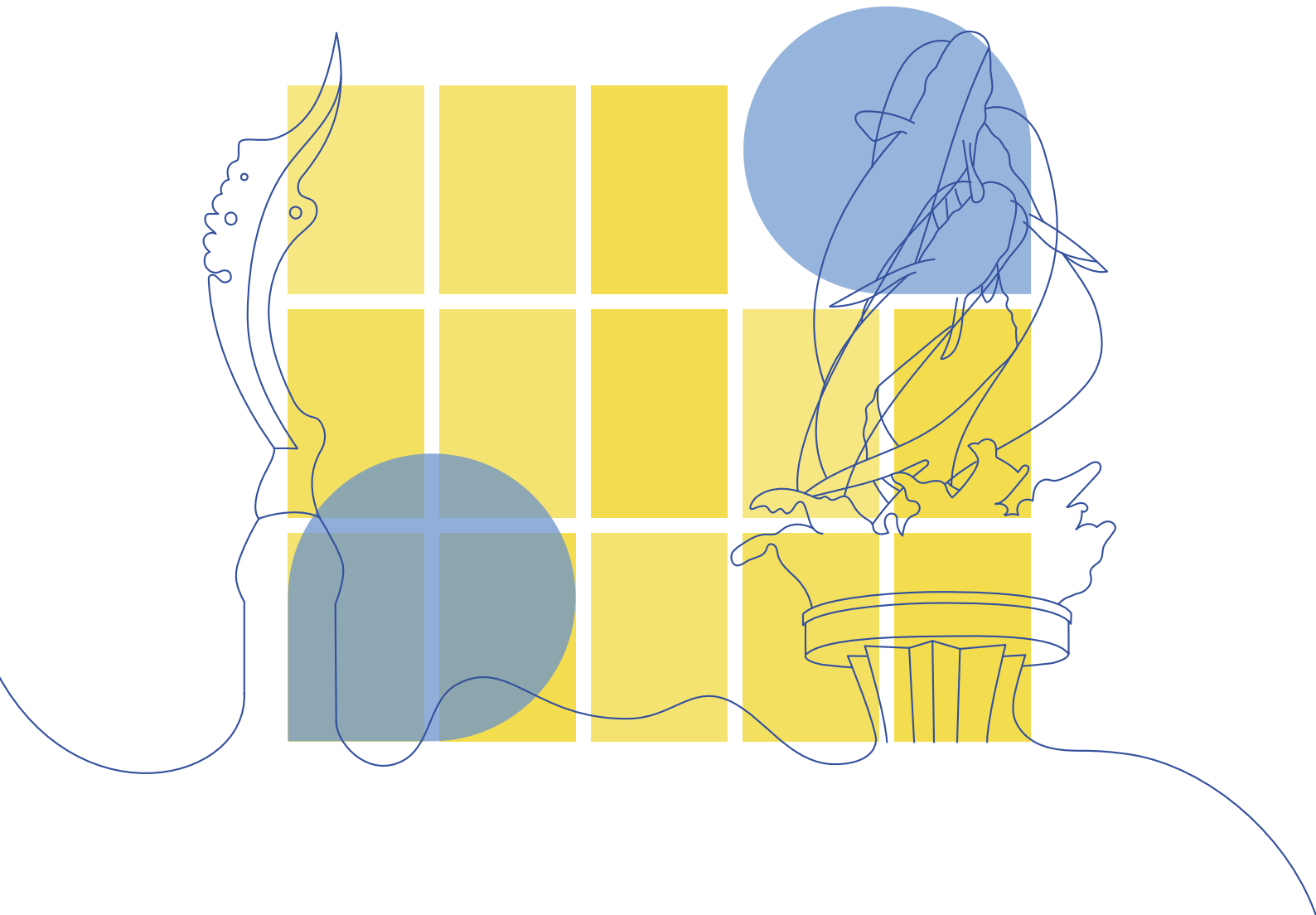
15,25% sangat setuju, 49,75 % setuju , dan 25,25% netral).

Lebih dari 60% responden di kedua wilayah merasa bahwa ada kendala bagi pengungsi untuk mendapatkan hak untuk bekerja. Kendala utama adalah kurangnya kesempatan kerja (62%-70%) dan peraturan pemerintah (7%-8%). Namun, mayoritas responden percaya bahwa faktor pendorong dalam pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi bekerja adalah kebijakan pemerintah. Selain itu, sekitar 60% responden bersedia bekerja dengan pengungsi asalkan peraturan mengizinkan. Responden termotivasi untuk bekerja berdampingan dengan pengungsi jika pengungsi menguasai Bahasa Indonesia, menganut agama yang sama, dan memiliki keahlian tertentu. Sebaliknya, alasan mereka yang tidak mau bekerja dengan pengungsi antara lain karena pengungsi kurang lancar berbahasa Indonesia, perbedaan agama, perbedaan budaya, kurangnya keterampilan khusus pengungsi, perbedaan gender, dan persaingan dalam pekerjaan.



5

Pertanyaan Kunci dan Jawaban



5. Pertanyaan Kunci dan Jawaban

Laporan ini hanya memuat beberapa pertanyaan utama dan tanggapan dari responden dalam survei. Pertanyaan dikelompokkan berdasarkan tema. Tanggapan dalam persentase. Penomoran soal mengikuti sistem penomoran pada kuesioner.

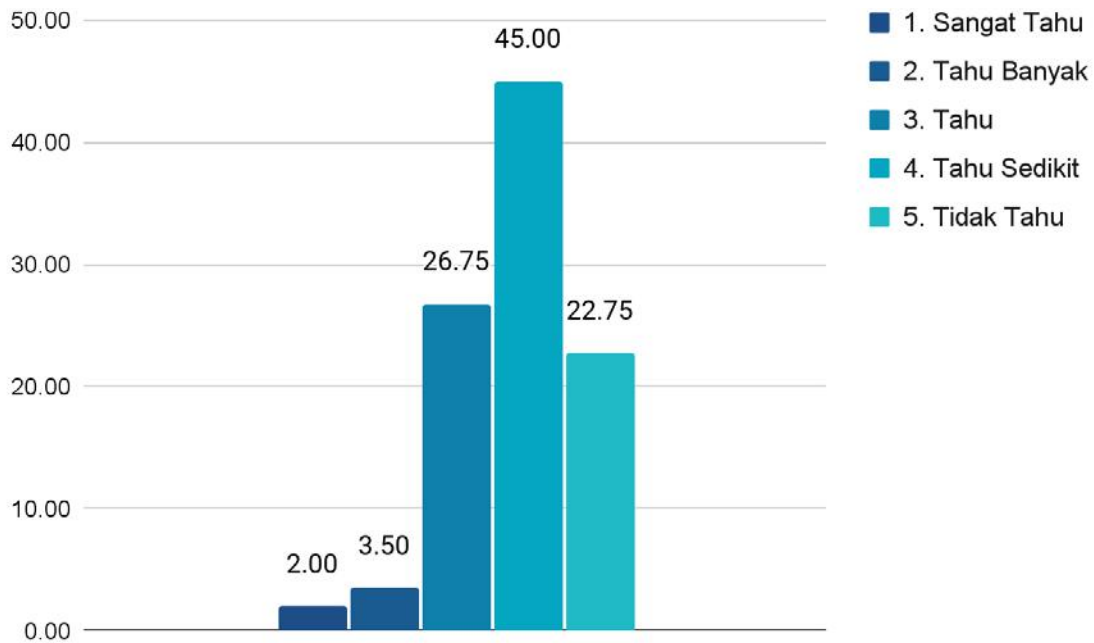
5.1. Pemahaman Umum Terkait Situasi Pengungsi

Pengantar: Beberapa kota di Indonesia termasuk kota tempat tinggal Ibu/Bapak adalah kota yang disinggahi pengungsi luar negeri untuk transit, dalam perjalanan mereka dari negara asal menuju negara penerima. Sayangnya, masa singgah/transit pengungsi ini terjadi dalam waktu panjang hingga bertahun-tahun karena berbagai sebab. Kami ingin menggali pemahaman Ibu/Bapak mengenai pengungsi ini.

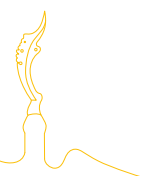
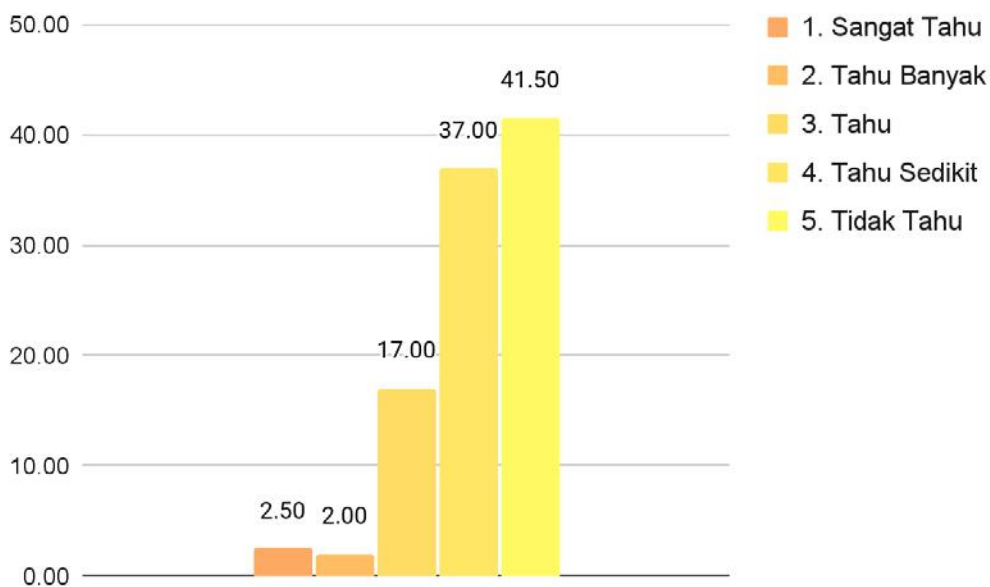


B-1. Seberapa tahu/paham ibu/bapak mengenai adanya pengungsi dari luar negeri atau orang asing pencari suaka di berbagai negara?

1) Pekanbaru

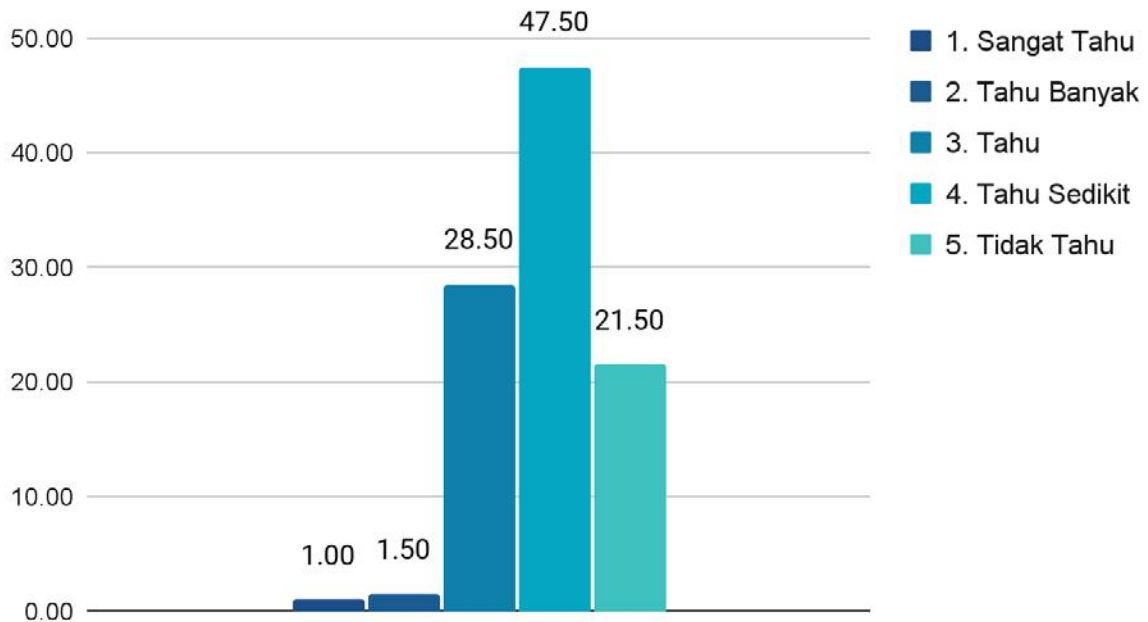


2) Bogor

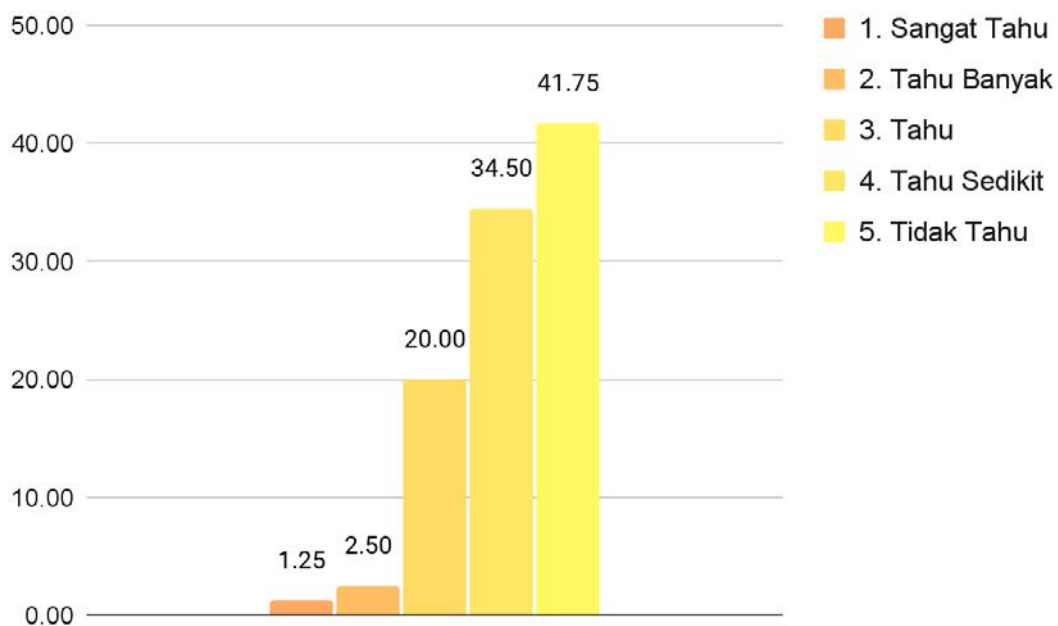


B-6. Seberapa tahu/paham Ibu/Bapak mengenai adanya pengungsi dari luar negeri yang tinggal sementara di Indonesia?

1) Pekanbaru

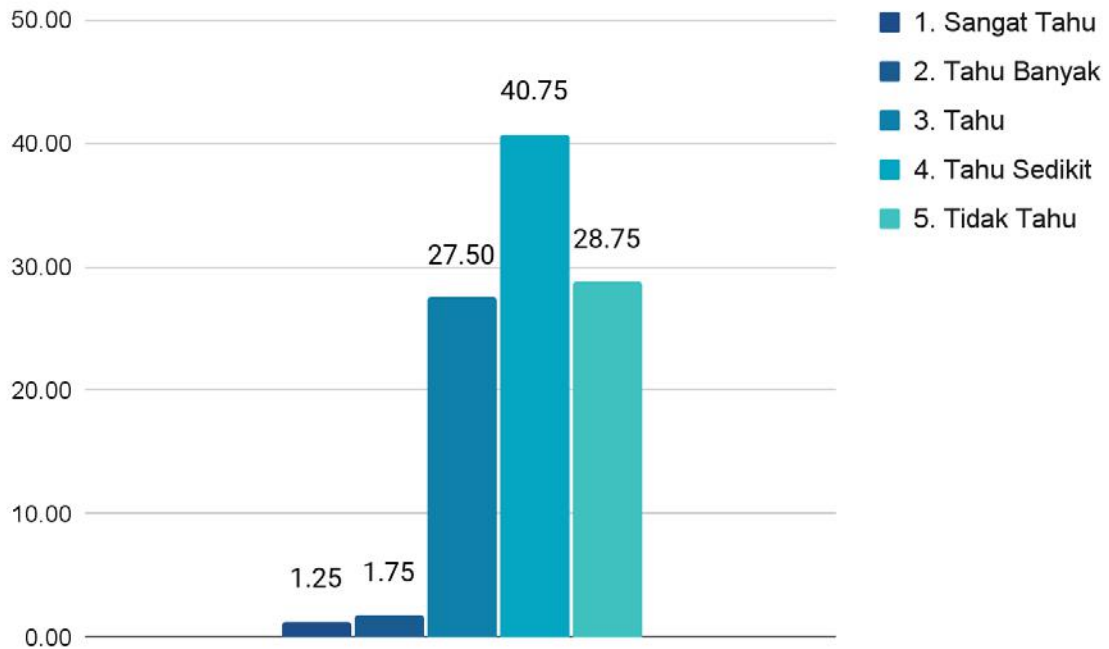


2) Bogor

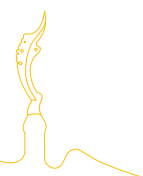
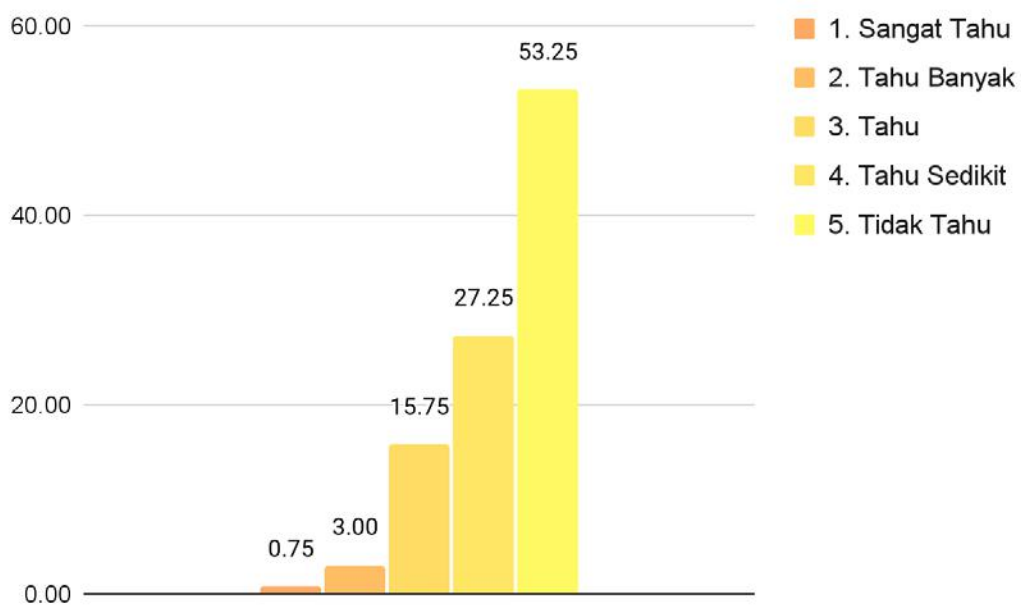


B-7. Seberapa tahu/paham Ibu/Bapak mengenai adanya pengungsi dari luar negeri yang tinggal sementara di kota Ibu/Bapak?

1) Pekanbaru

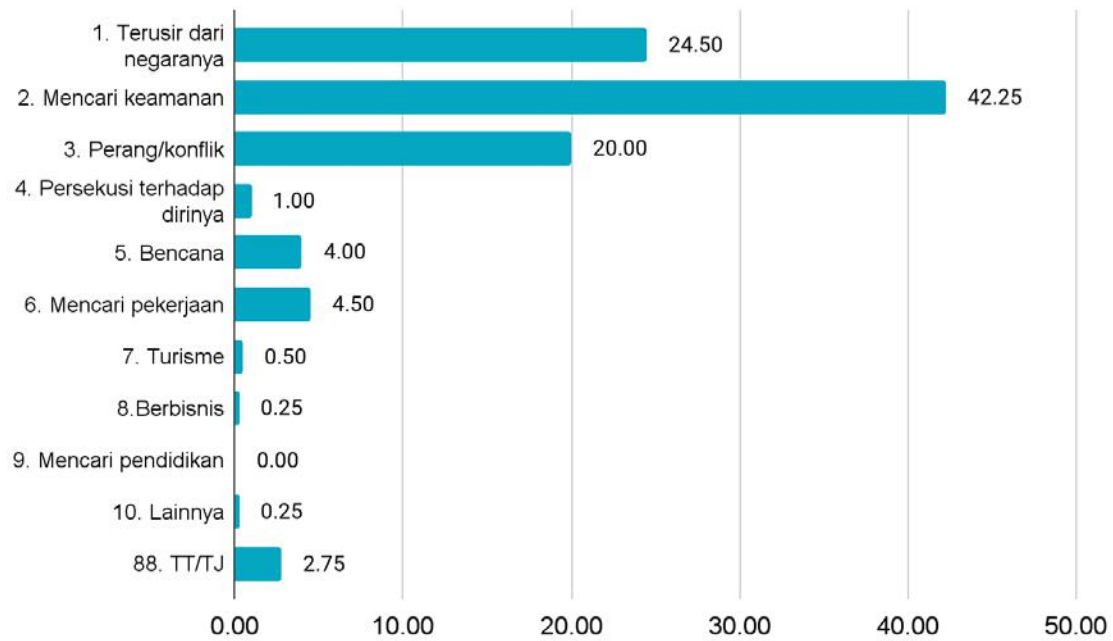


2) Bogor

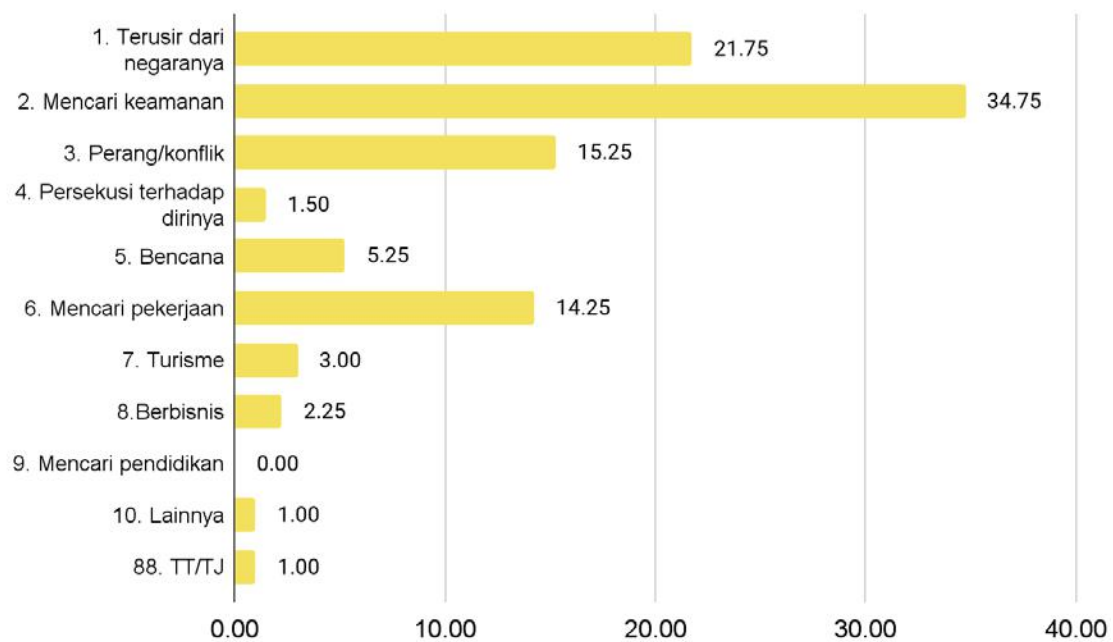


C-1. Menurut Ibu/Bapak mengapa peristiwa mengungsi dan mencari suaka dapat terjadi?

1) Pekanbaru

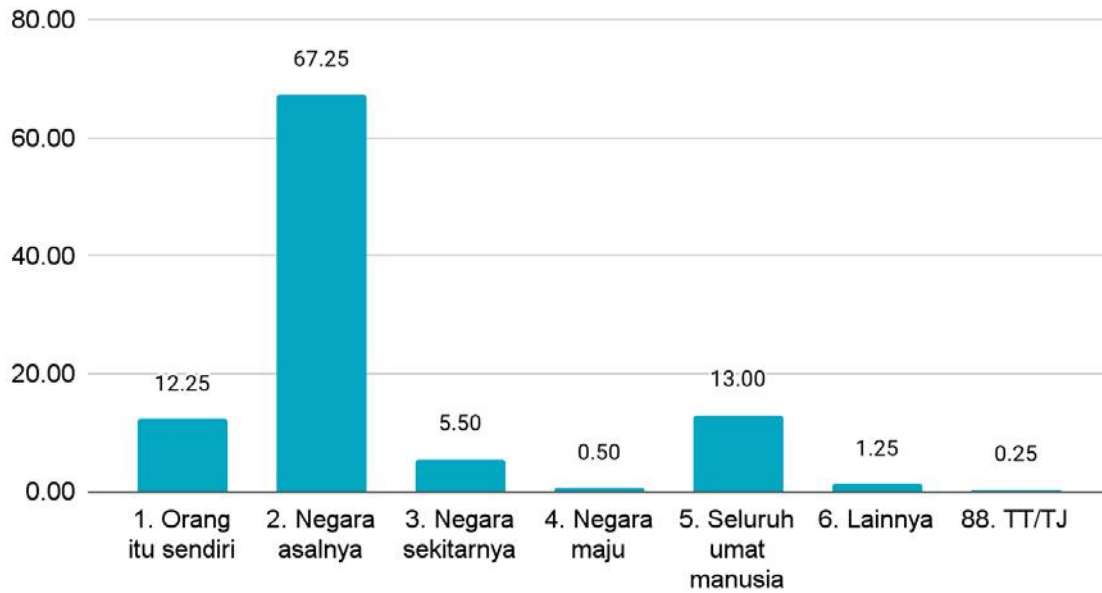


2) Bogor

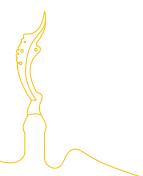
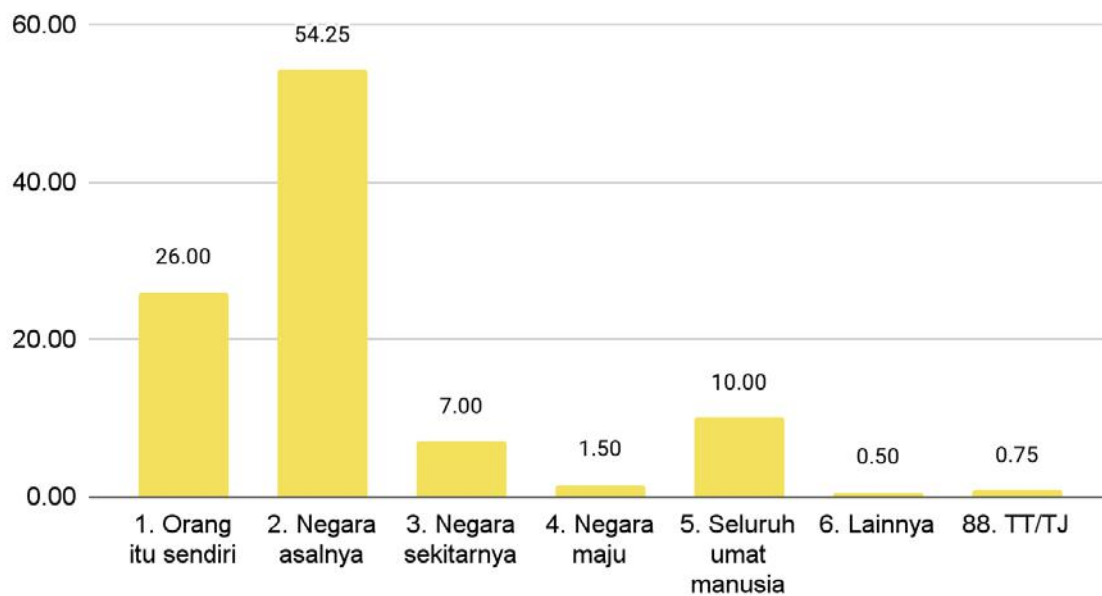


D-2. Menurut Ibu/Bapak, siapa yang seharusnya bertanggung jawab pada orang-orang yang terpaksa lari dari negaranya karena terjadi konflik dan kekerasan?

1) Pekanbaru

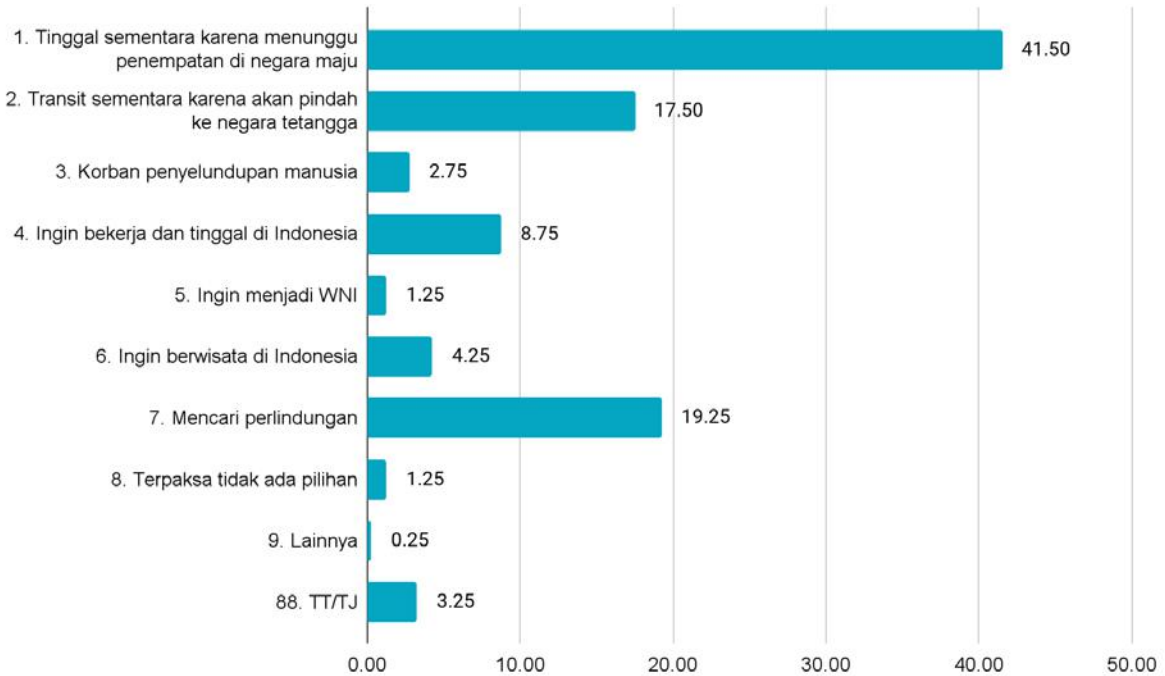


2) Bogor

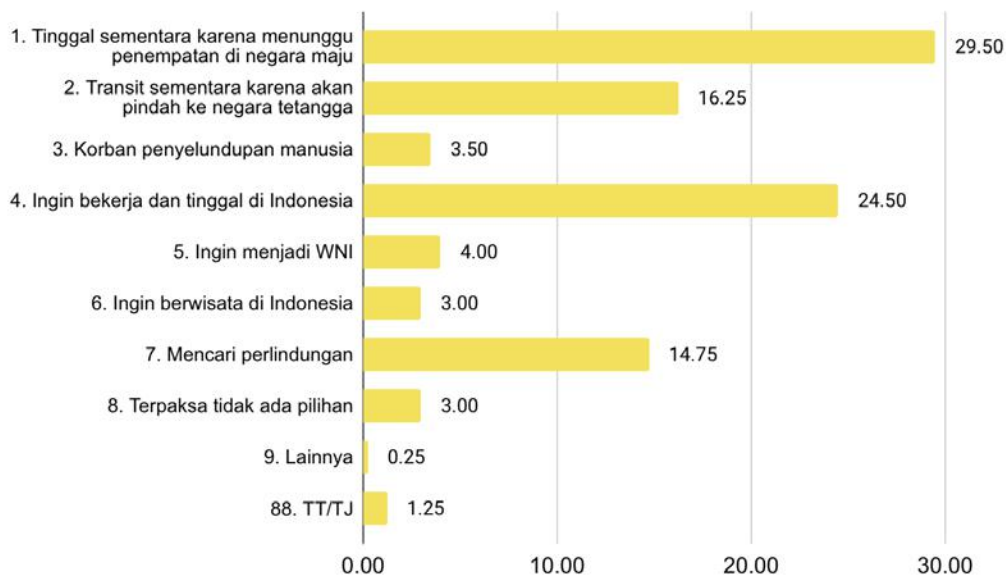


D-3. Menurut Ibu/Bapak, mengapa pengungsi luar negeri berada di Indonesia saat ini? (Responden boleh memilih lebih dari satu jawaban)

1) Pekanbaru

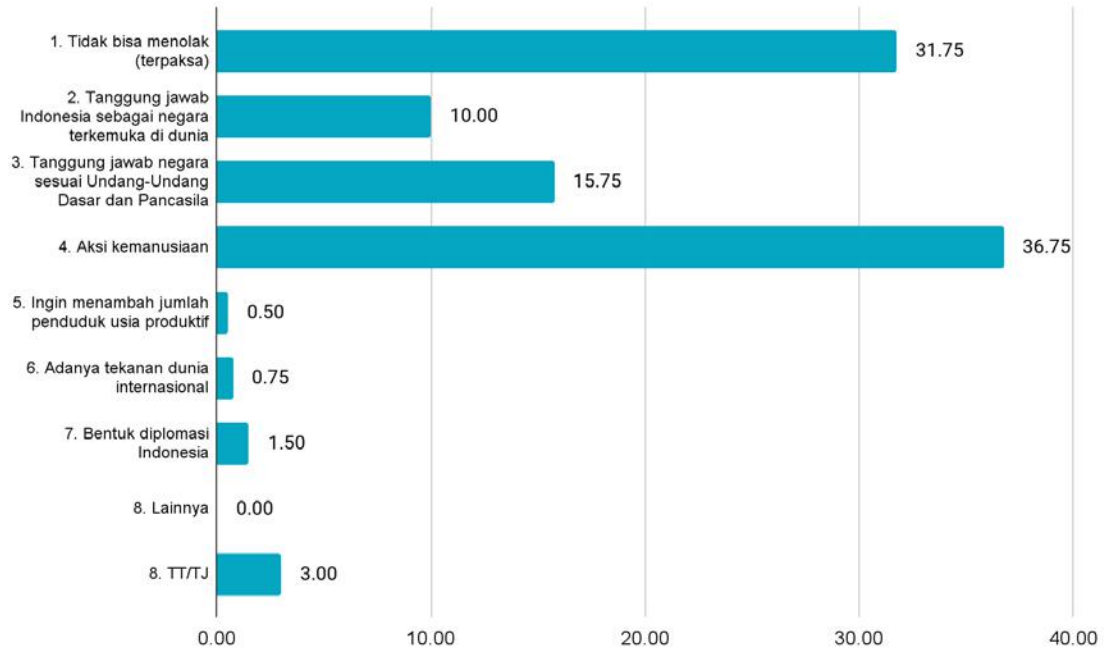


2) Bogor

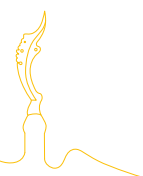
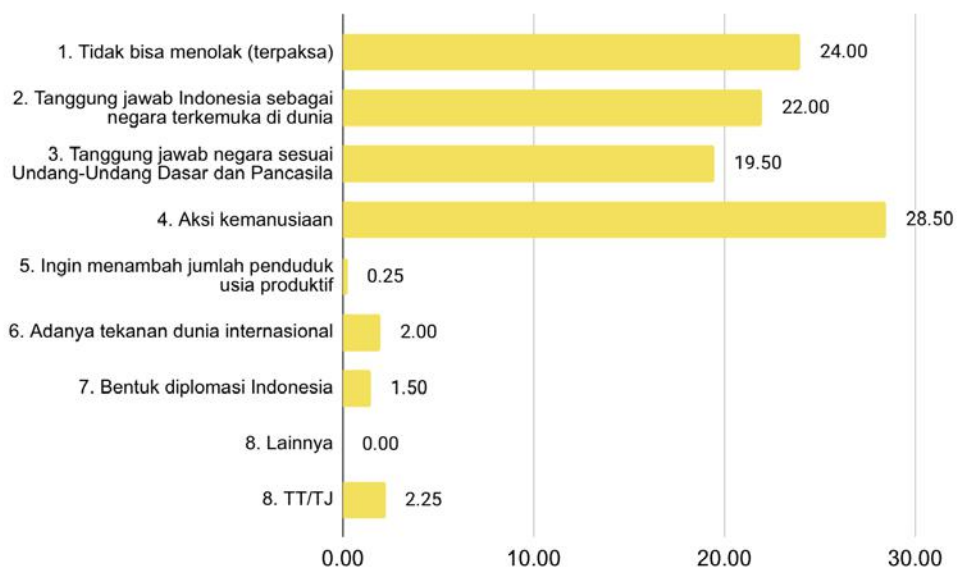


D-4. Menurut Ibu/Bapak, mengapa Indonesia menerima pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal sementara di Indonesia sampai mendapat tempat di negara lain? (Responden boleh memilih lebih dari satu jawaban)

1) Pekanbaru

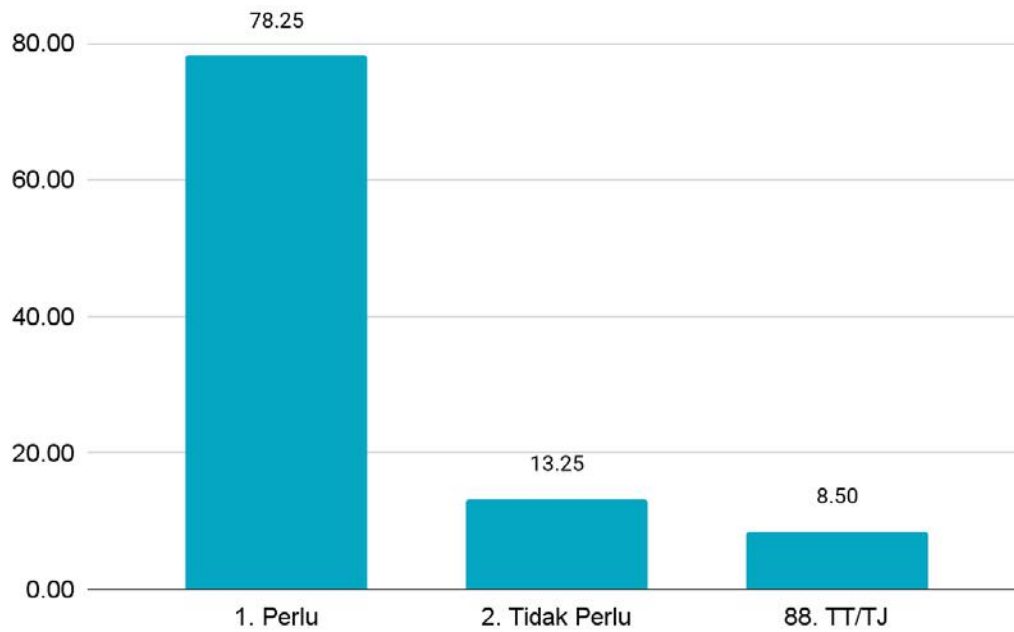


2) Bogor

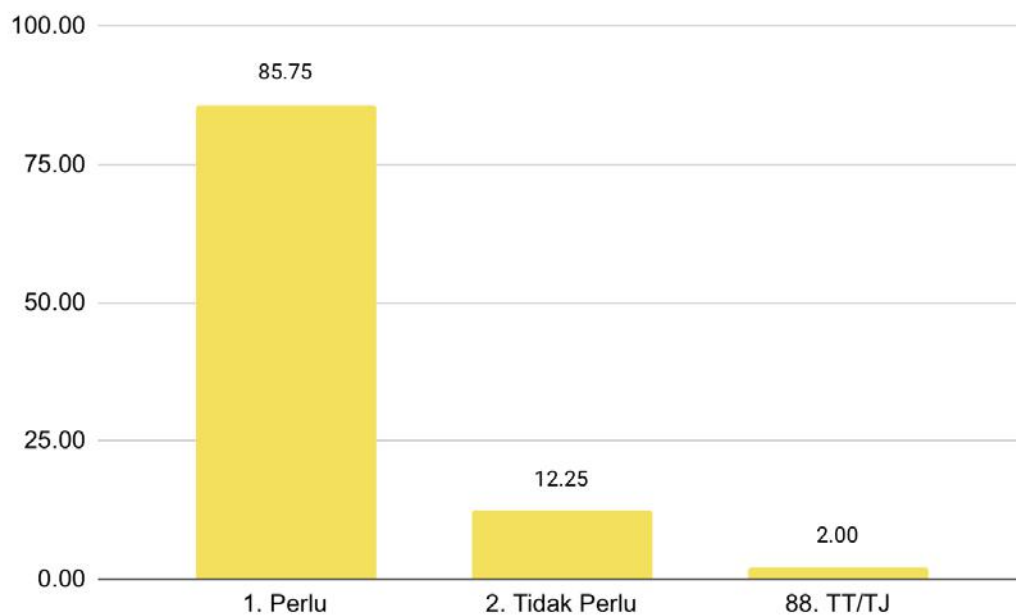


D-5. Apakah rakyat dan pemerintah Indonesia perlu tanggap melindungi pengungsi luar negeri yang mencari perlindungan ke Indonesia?

1) Pekanbaru

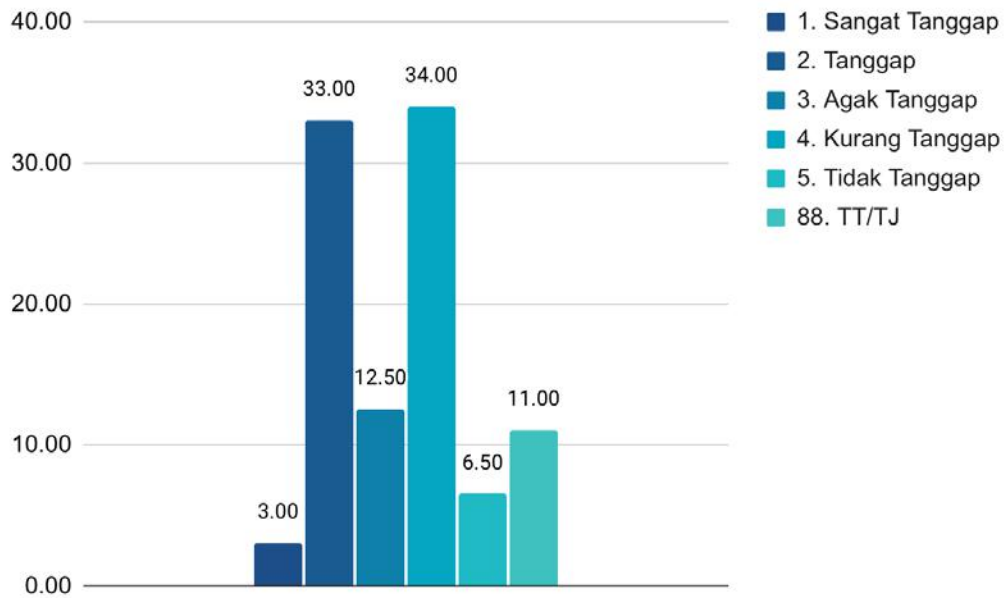


2) Bogor

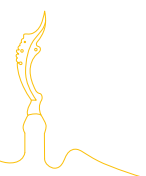
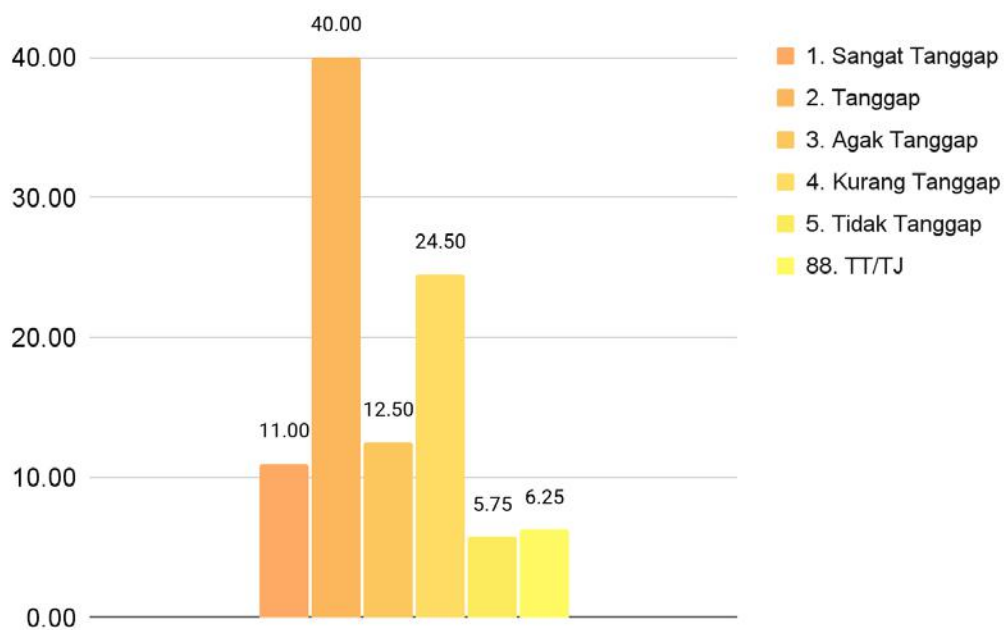


D-7. Bagaimana respon atau ketanggapan pemerintah terhadap kehadiran pengungsi luar negeri yang mencari perlindungan ke Indonesia?

1) Pekanbaru



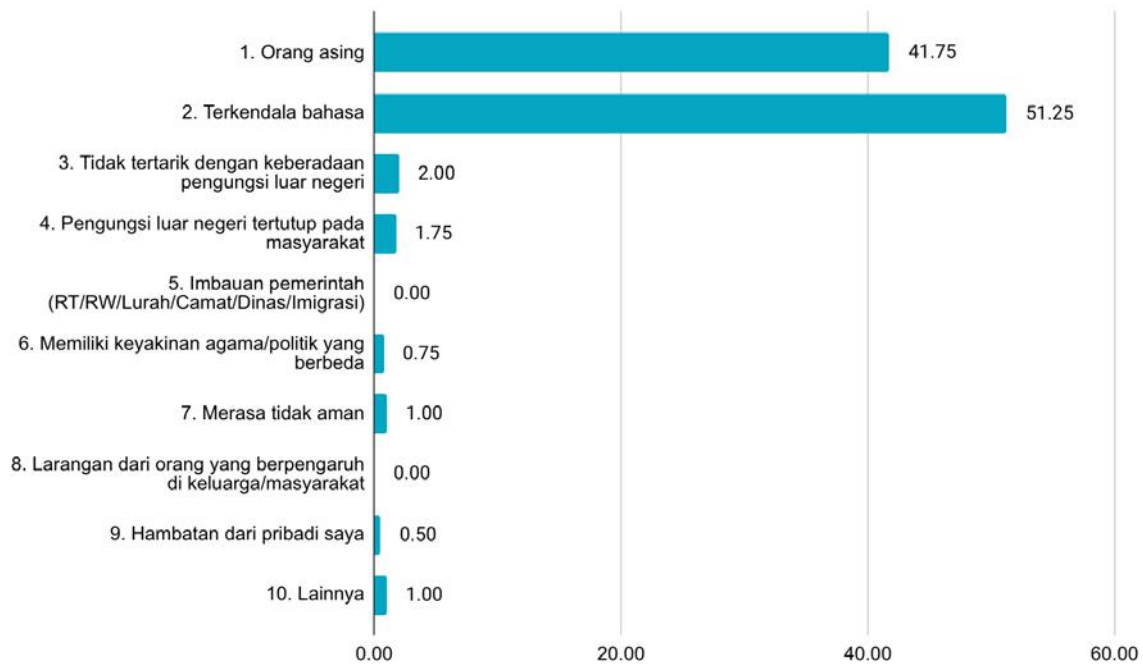
2) Bogor



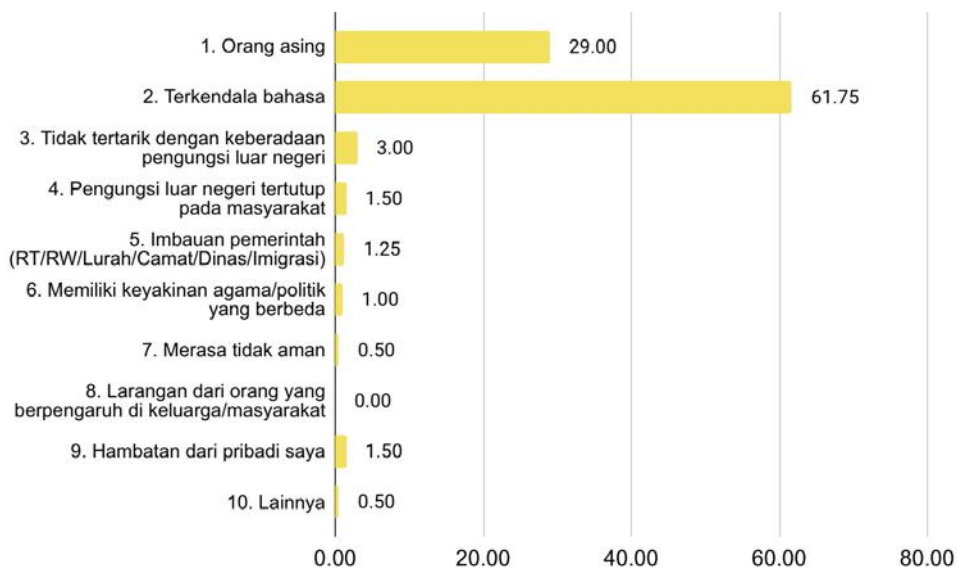
5.2. Hubungan Sosial Antara Komunitas Pengungsi Asing Dan Masyarakat Lokal

J-1. Apa yang dapat menjadi faktor penghambat Ibu/Bapak untuk bersosialisasi dengan pengungsi luar negeri?

1) Pekanbaru

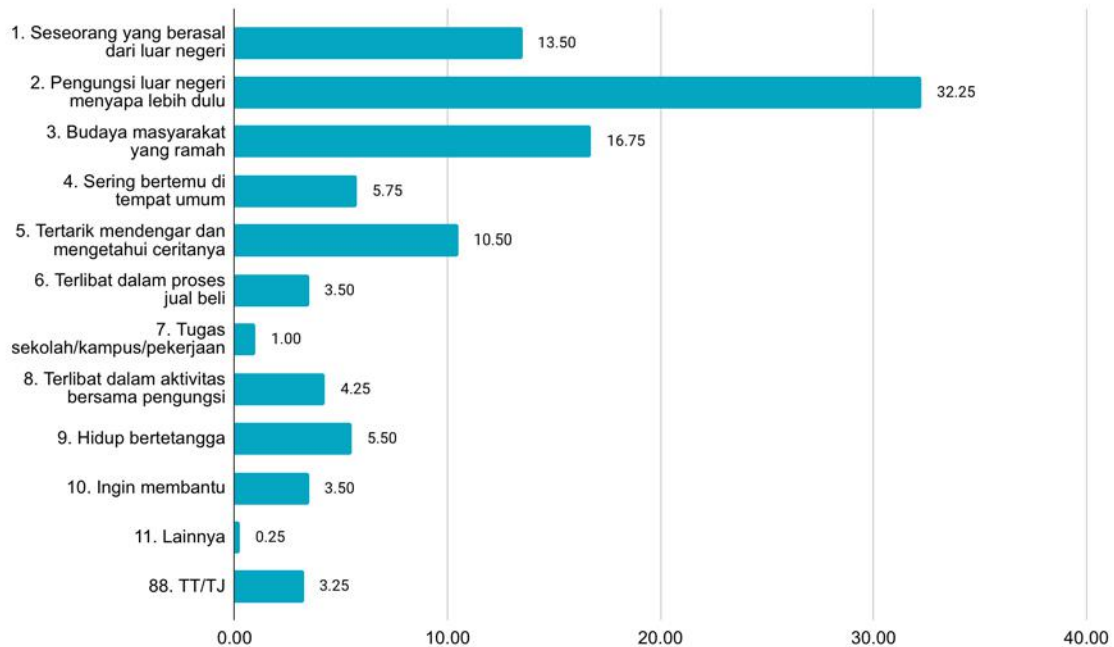


2) Bogor

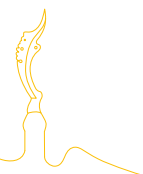
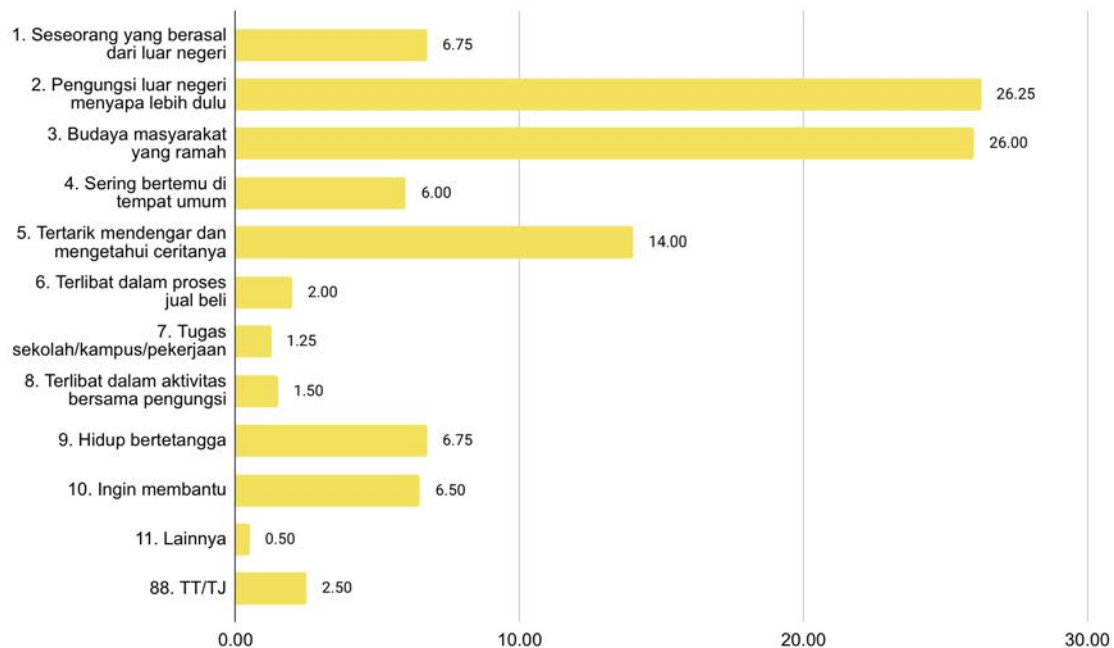


J-2. Apa yang dapat menjadi faktor pendukung ibu/bapak untuk bersosialisasi dengan pengungsi luar negeri?

1) Pekanbaru

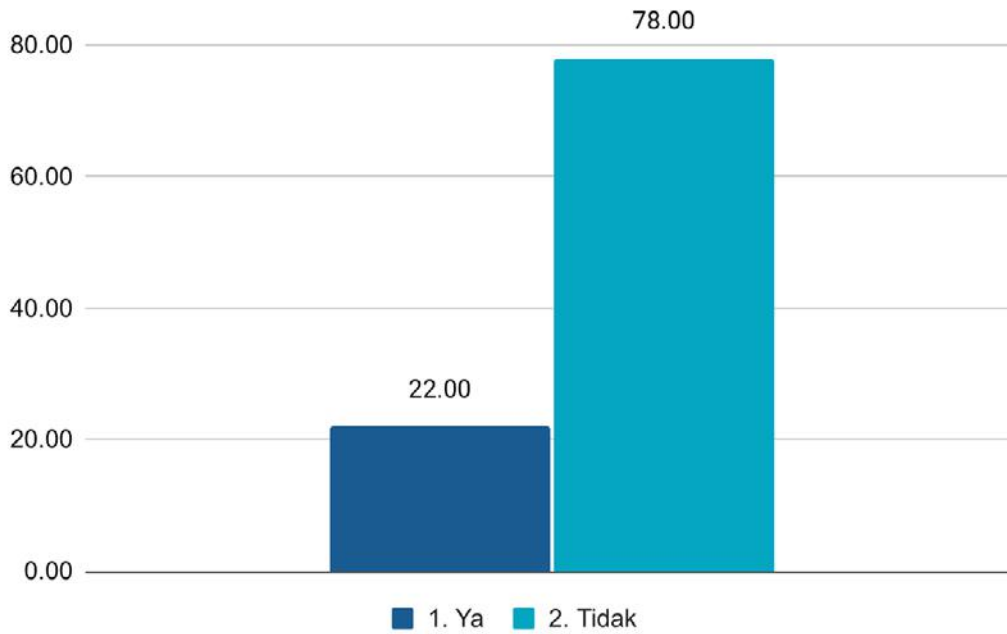


2) Bogor

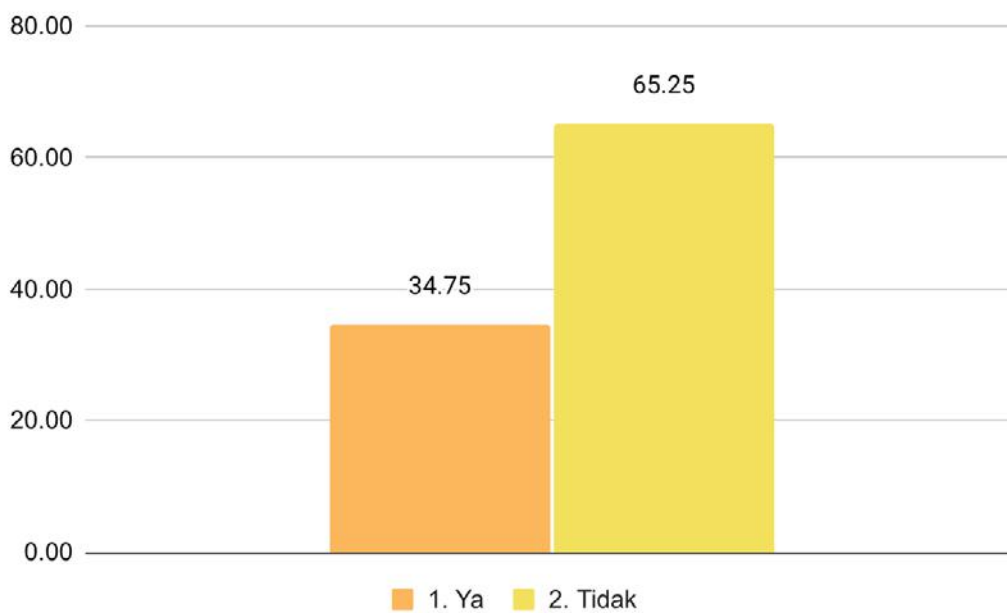


J-3. Apakah Ibu/Bapak memiliki kriteria/syarat untuk pengungsi luar negeri yang diperkenankan berteman dengan Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak?

1) Pekanbaru

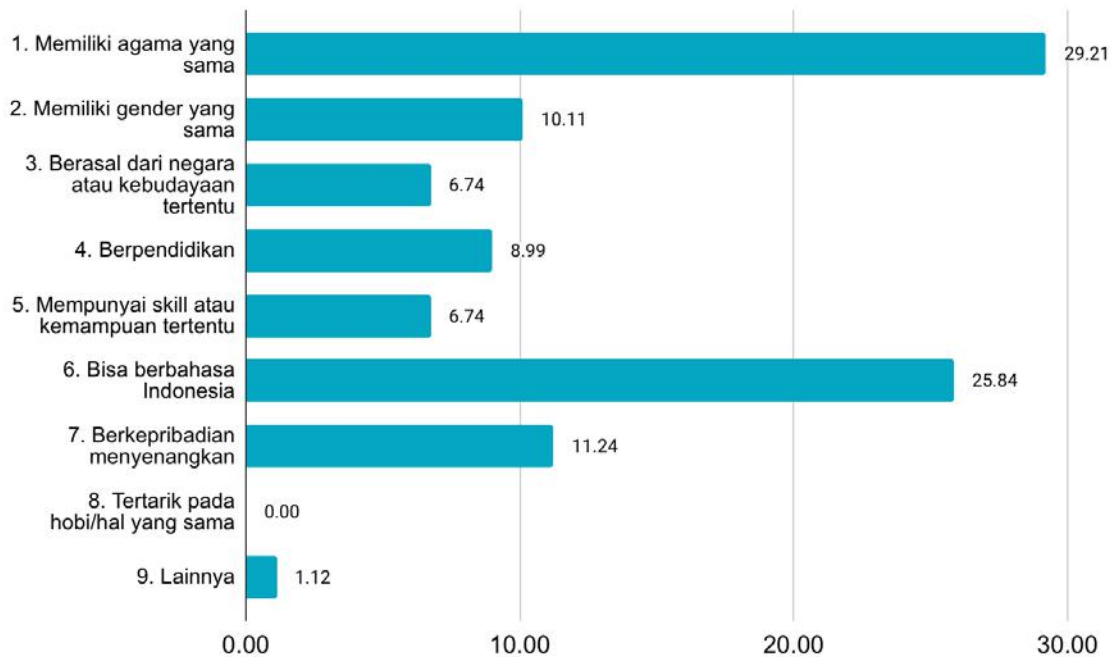


2) Bogor

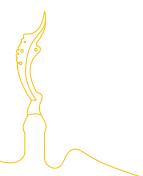
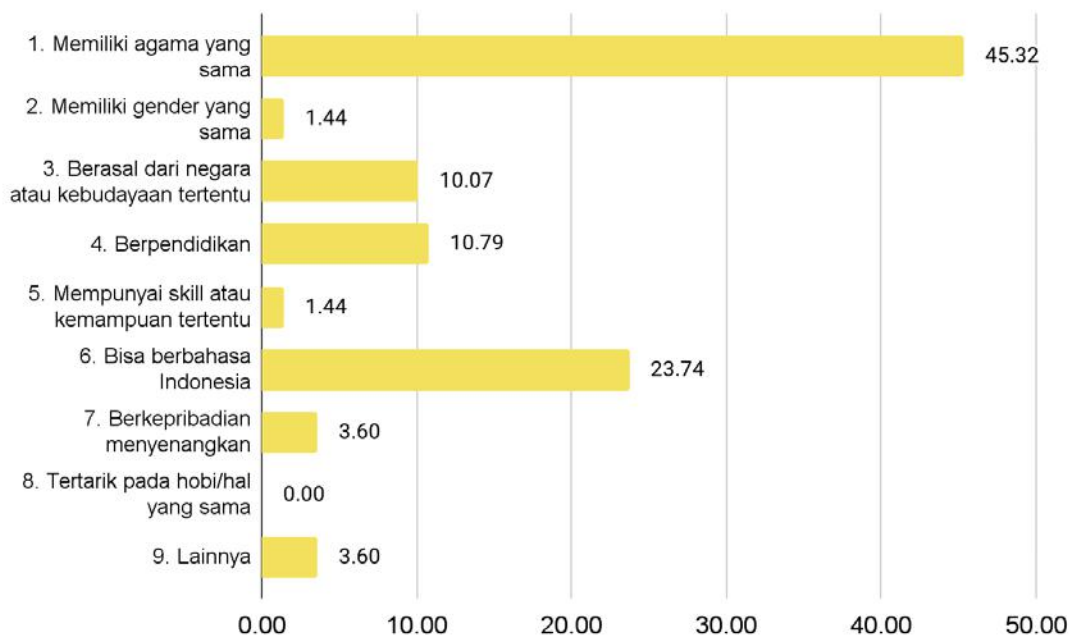


J-4. [Pada yang memiliki syarat untuk izin berteman] Apa yang menjadi kriteria/syarat untuk pengungsi luar negeri yang diperkenankan berteman dengan Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak?

1) Pekanbaru



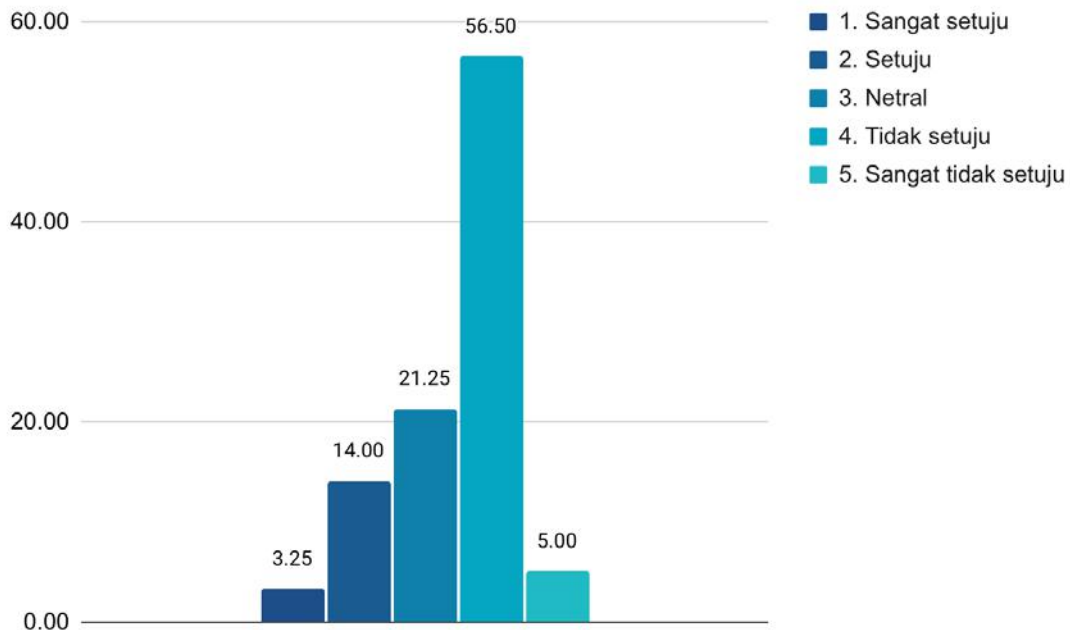
2) Bogor



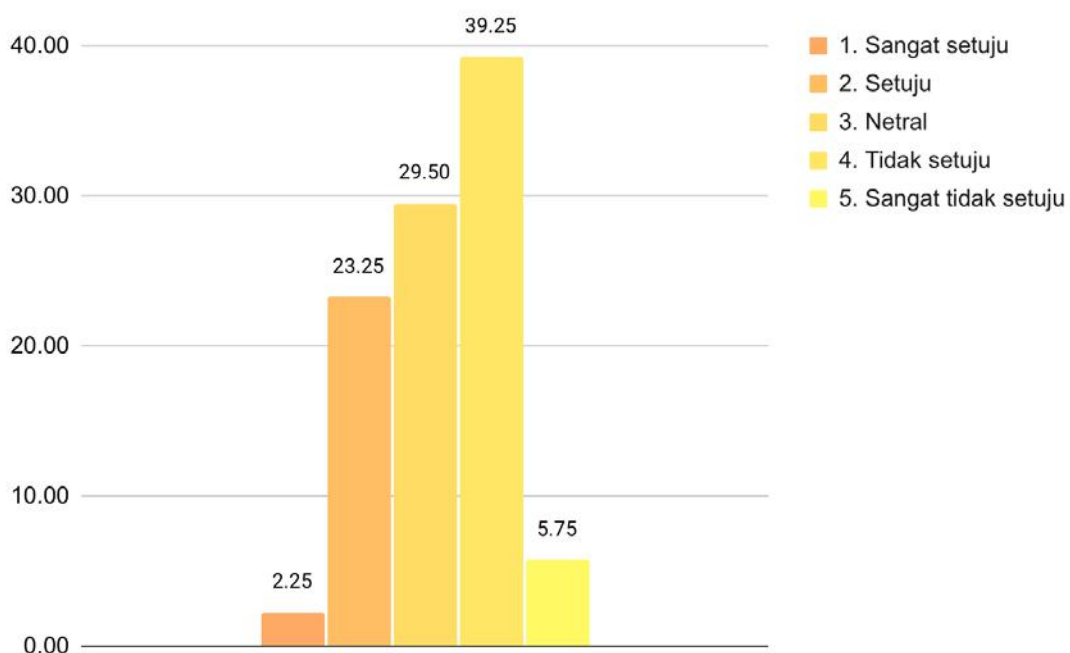
5.3. Peluang Integrasi Sosial

J-5-1. Mengenai integrasi pengungsi dengan masyarakat, bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri di suatu wilayah dilibatkan dalam musyawarah RT/RW?

1) Pekanbaru

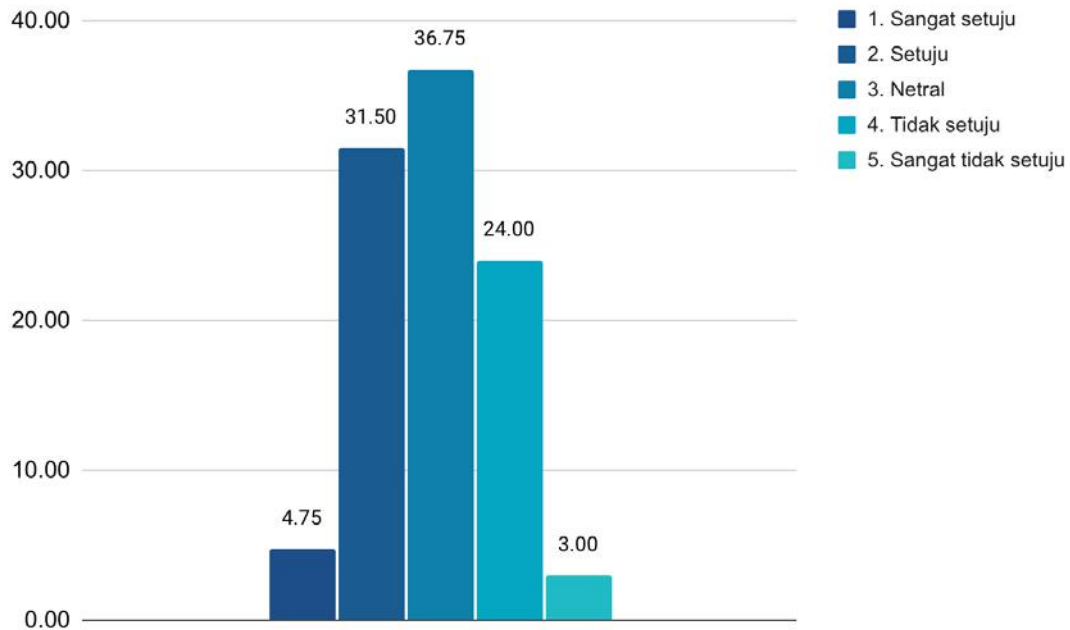


2) Bogor

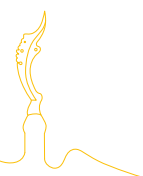
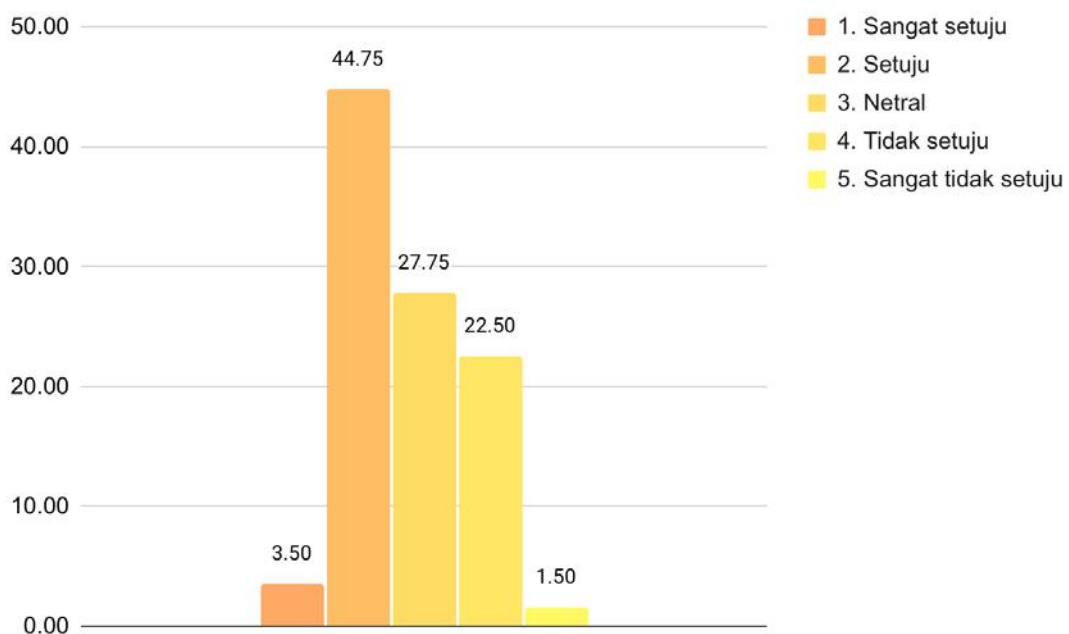


J-5-3. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri mendapat kartu identitas sementara sebagai penduduk, tetapi bukan KTP atau kartu identitas kewarganegaraan?

1) Pekanbaru

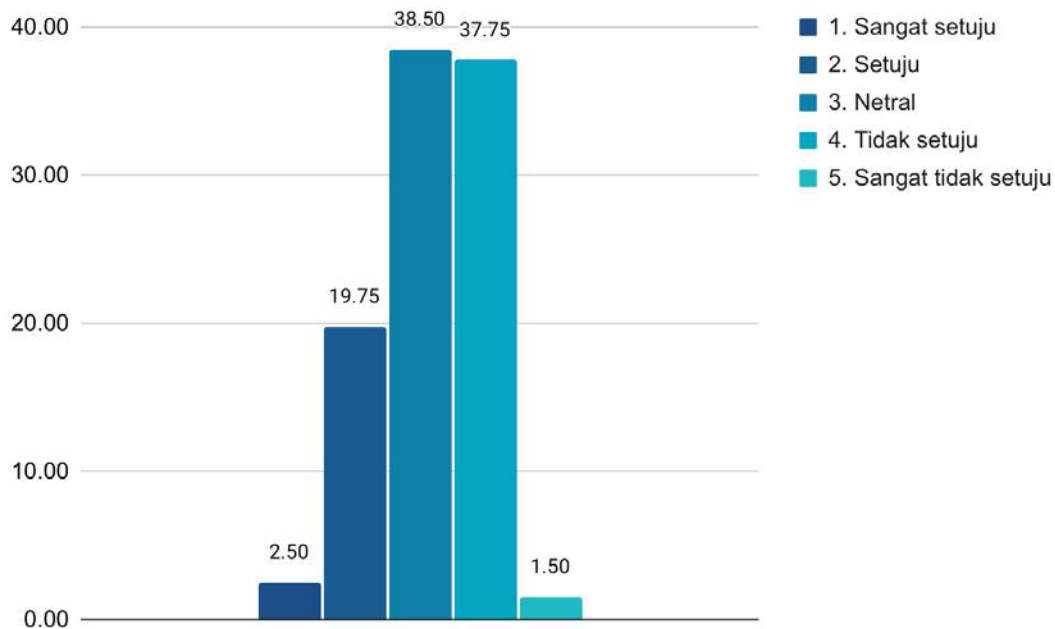


2) Bogor

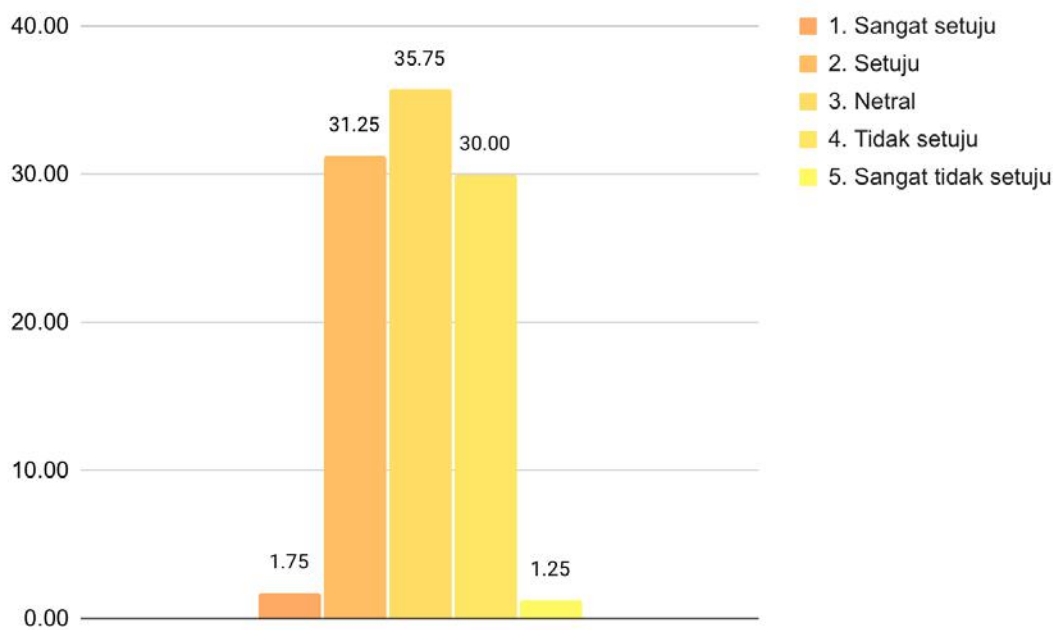


J-5-4. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki akses untuk membuka rekening bank?

1) Pekanbaru

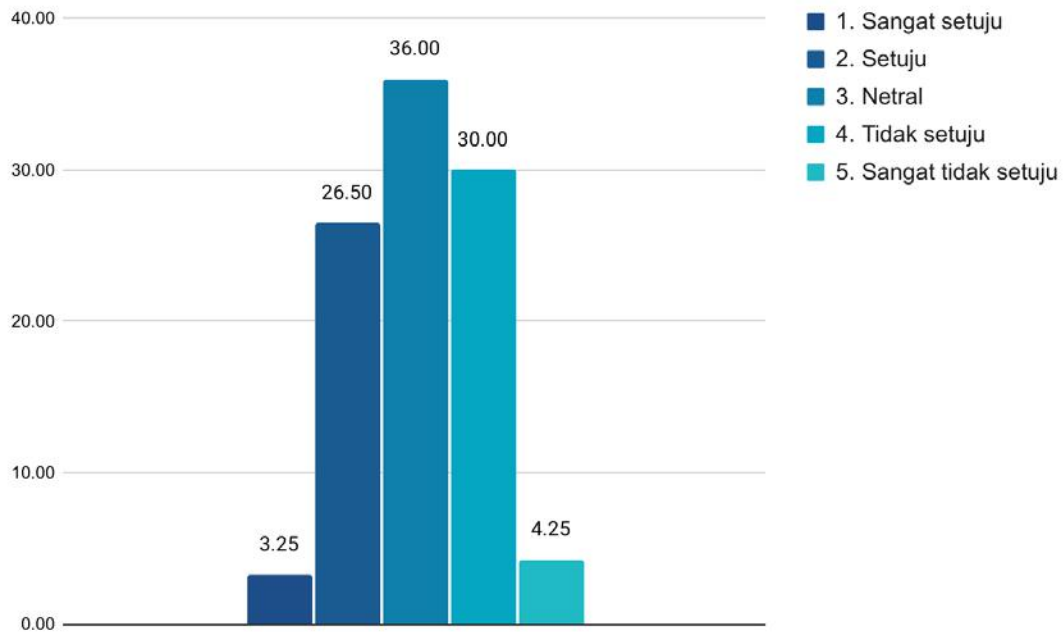


2) Bogor

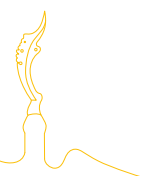
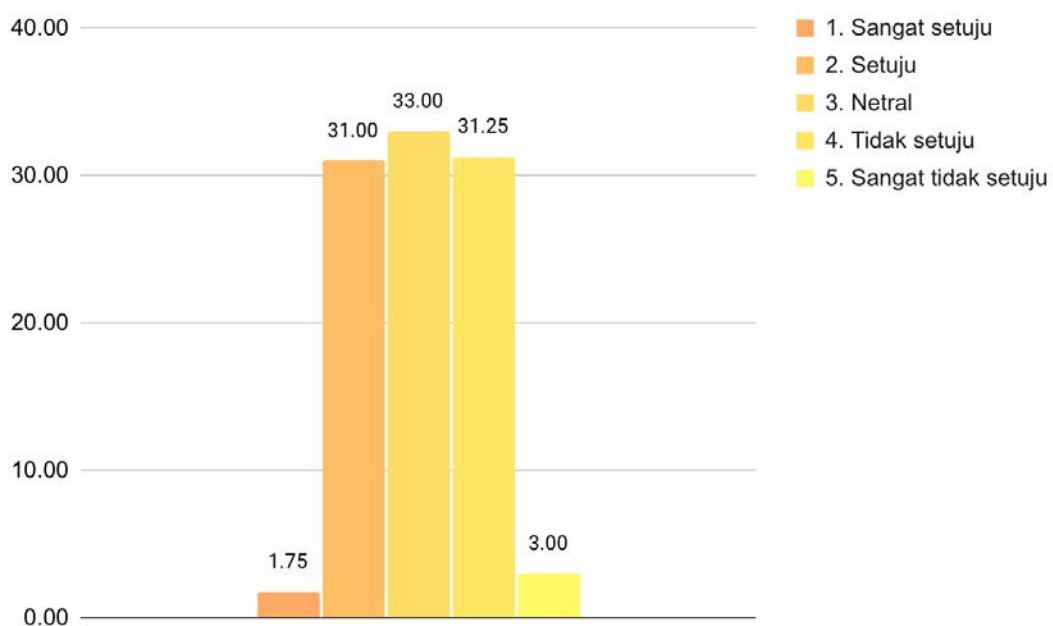


J-5-5. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki akses untuk menggunakan fasilitas umum milik negara untuk kegiatan mereka, misalnya meminjam Balai RW, Balai Kelurahan, Lapangan Umum, Gedung Kesenian, dsb.?

1) Pekanbaru

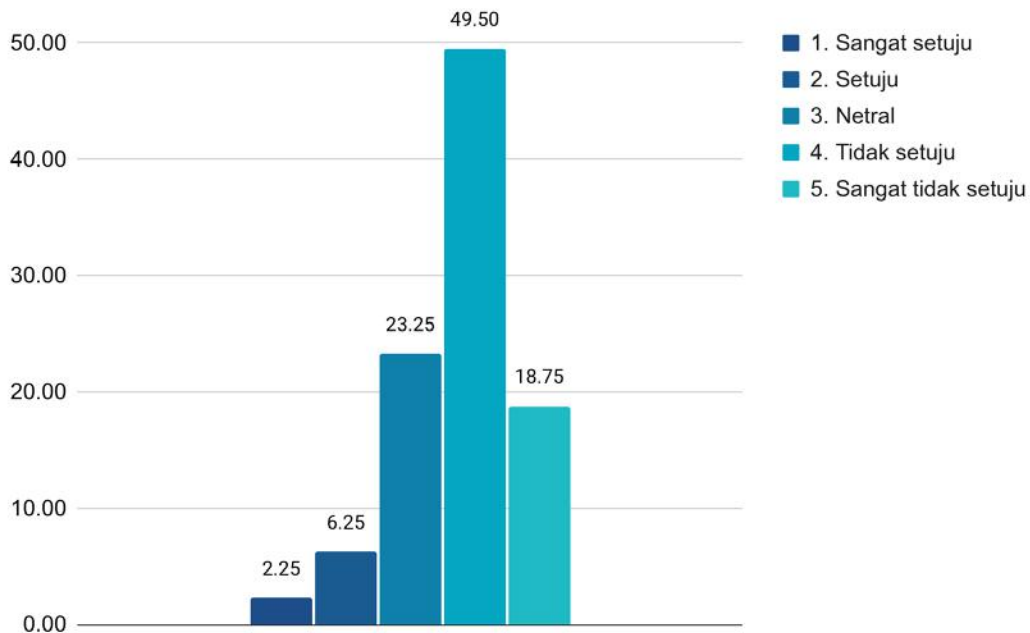


2) Bogor

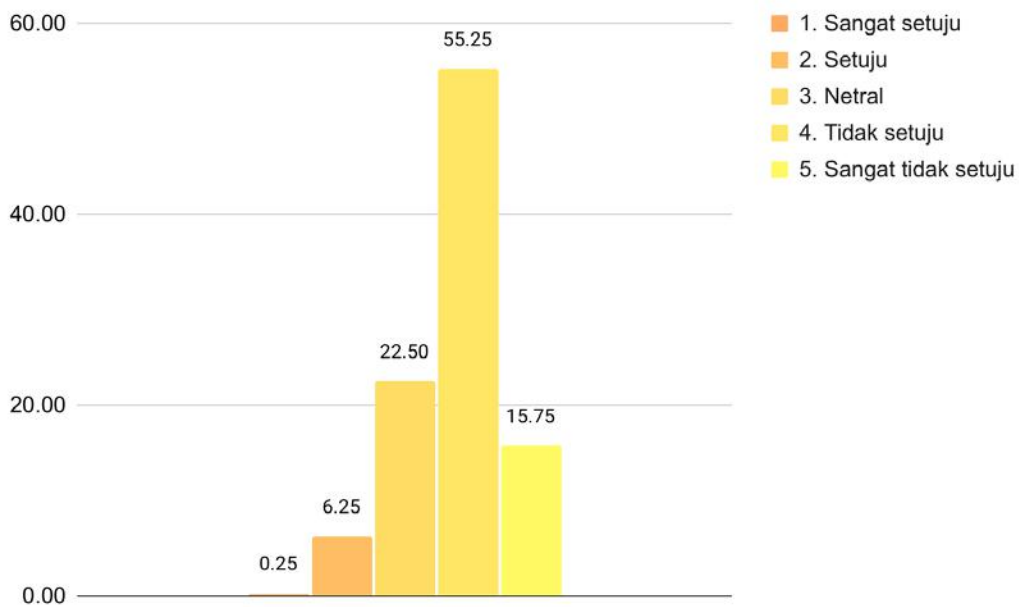


J-5-6. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri menjadi pengurus atau duduk di struktur organisasi kemasyarakatan?

1) Pekanbaru



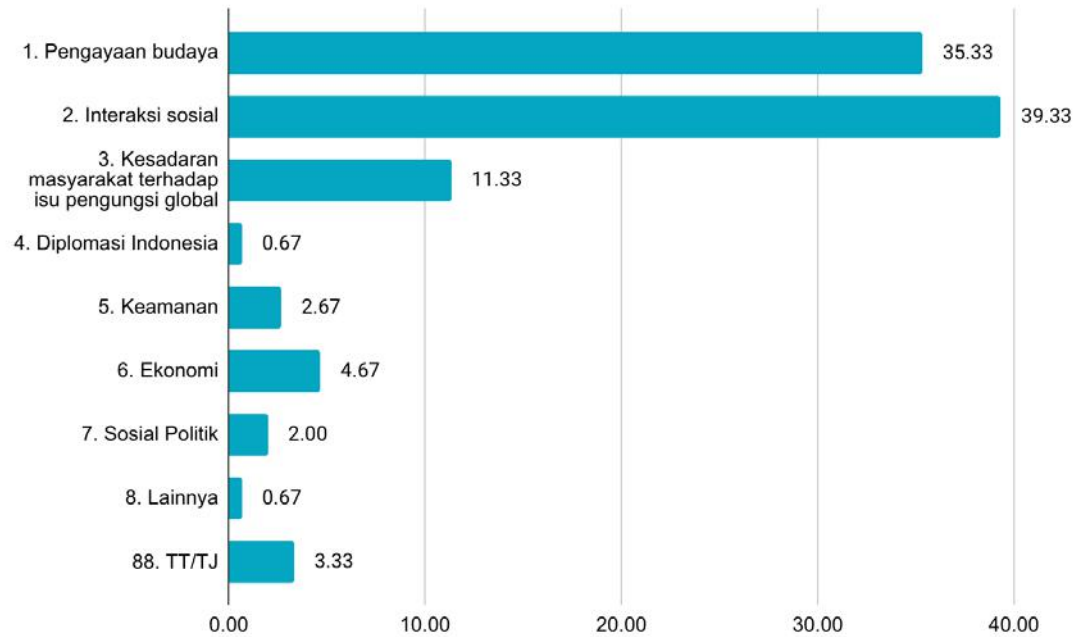
2) Bogor



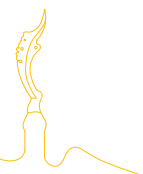
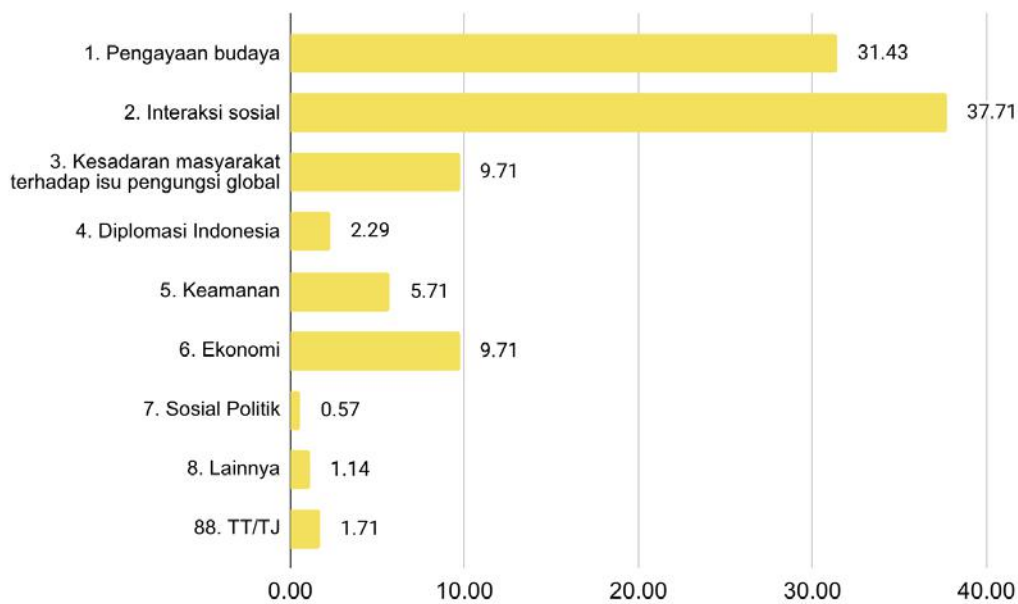
5.4. Ketahanan & Solidaritas Masyarakat Lokal

K-17. Menurut Ibu/Bapak, keberadaan pengungsi di sebuah lingkungan berdampak positif pada:

1) Pekanbaru

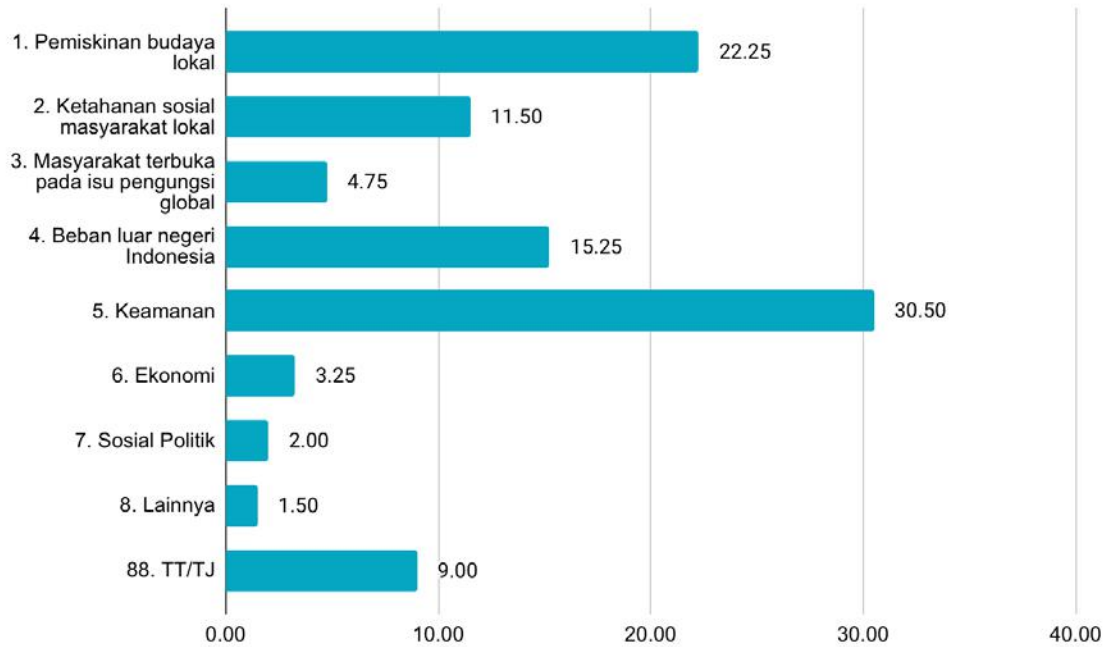


2) Bogor

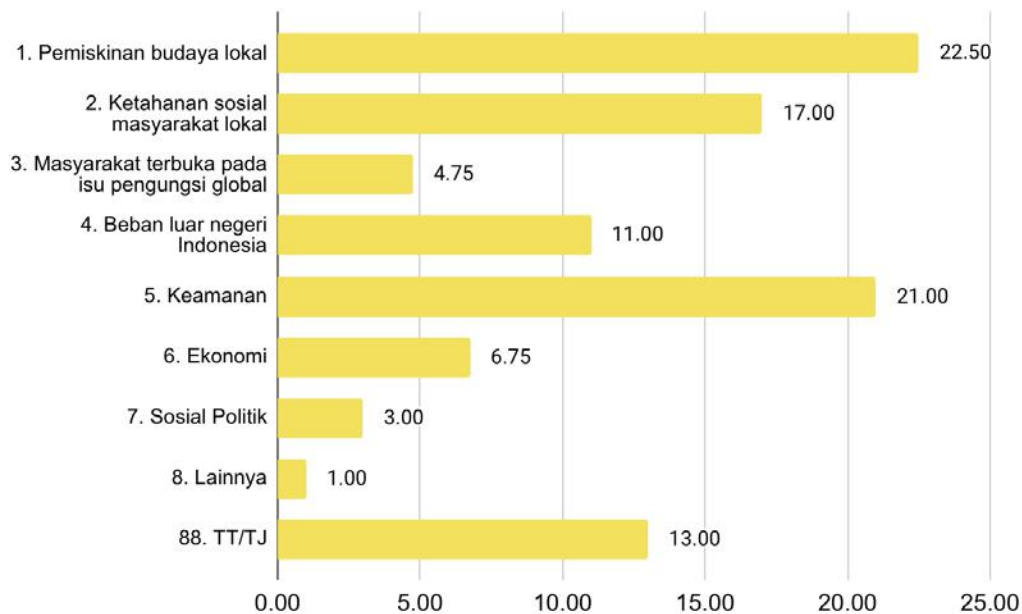


K-18. Menurut Ibu/Bapak, keberadaan pengungsi di sebuah lingkungan berdampak negatif pada:

1) Pekanbaru

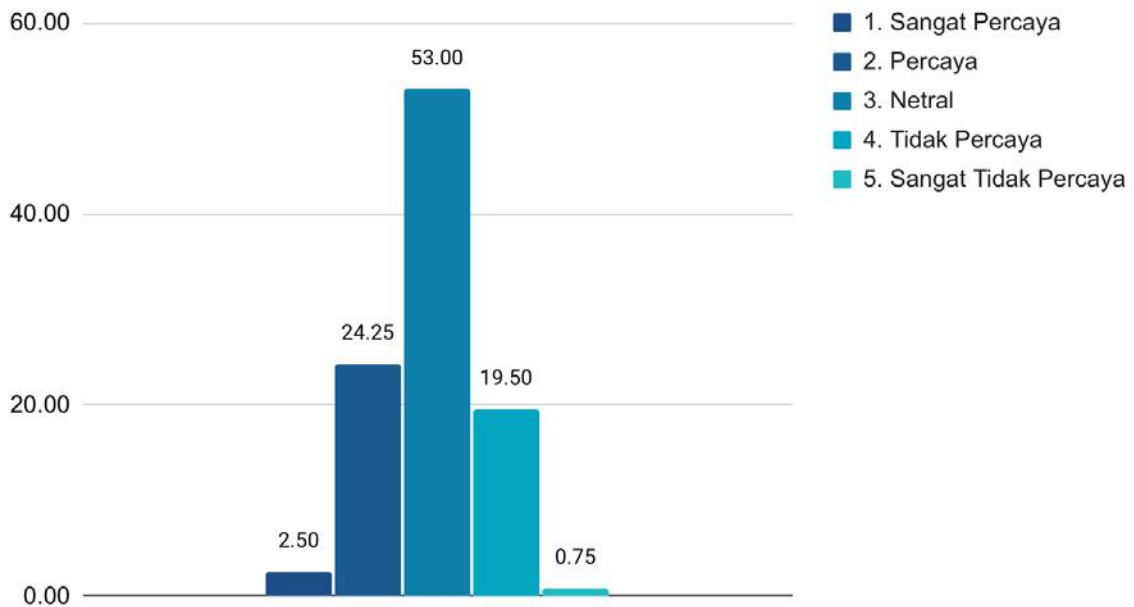


2) Bogor

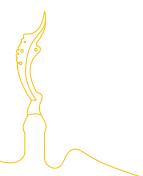
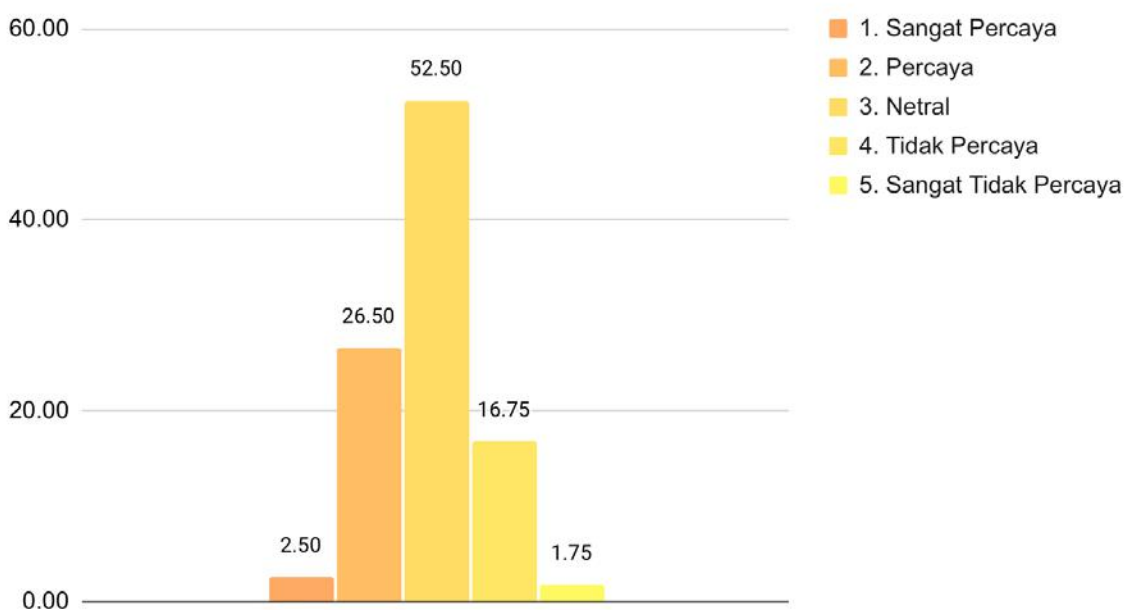


M-1. Seberapa percaya Ibu/Bapak terhadap kemampuan masyarakat untuk menerima pengungsi luar negeri untuk hidup bersama dengan damai dalam satu wilayah?

1) Pekanbaru

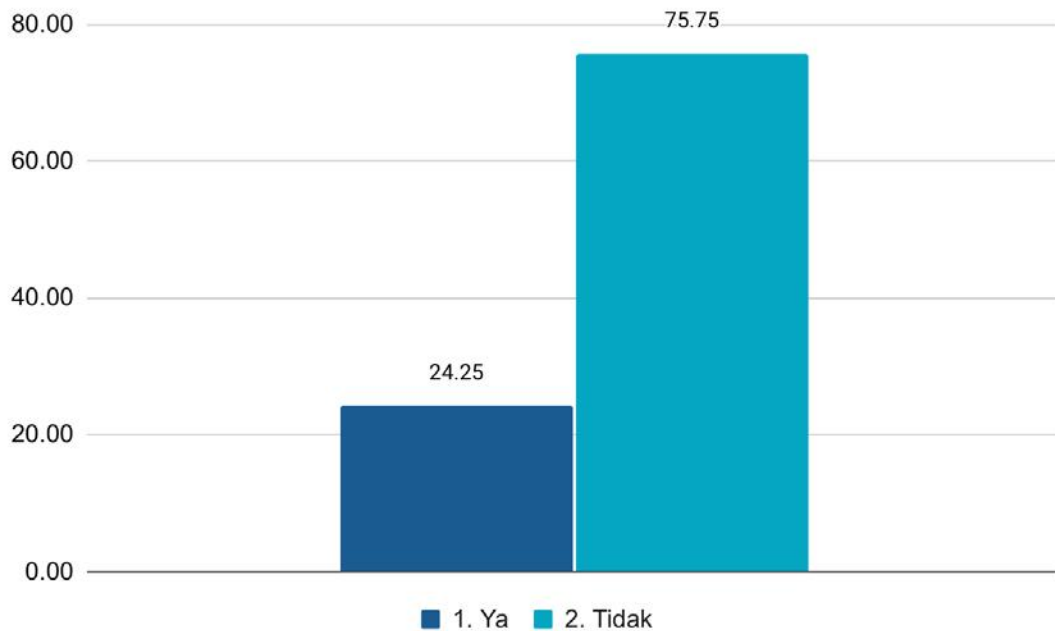


2) Bogor

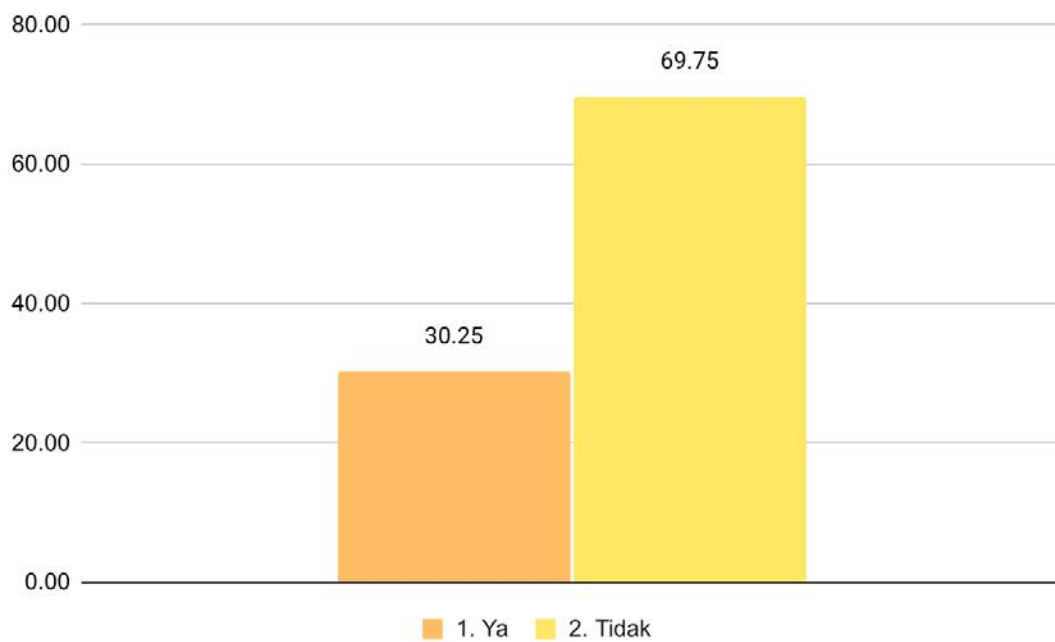


N-1. Apakah Ibu/Bapak pernah membayangkan Indonesia akan jatuh dalam peperangan dan warganya harus mengungsi?

1) Pekanbaru



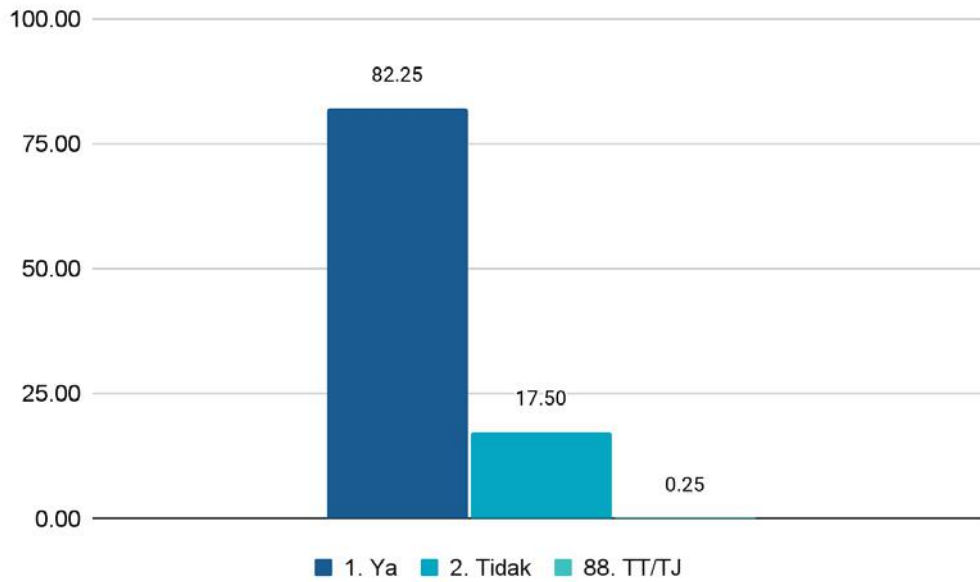
2) Bogor



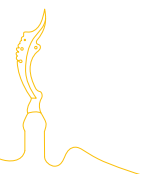
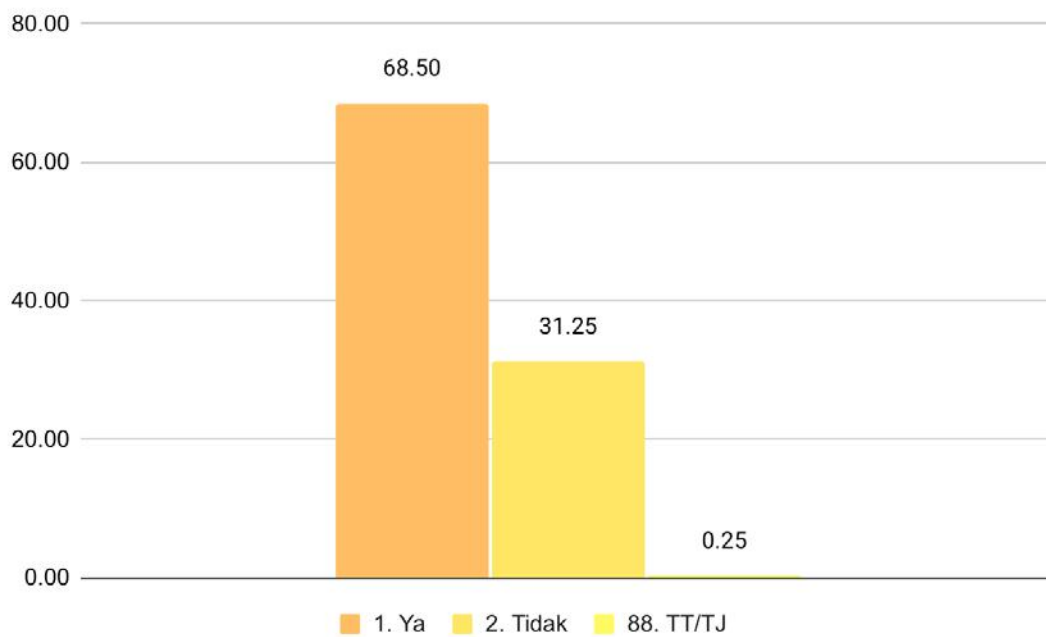
5.5. Kegiatan Kemasyarakatan

S-1. Apakah Ibu/Bapak turut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan?

1) Pekanbaru

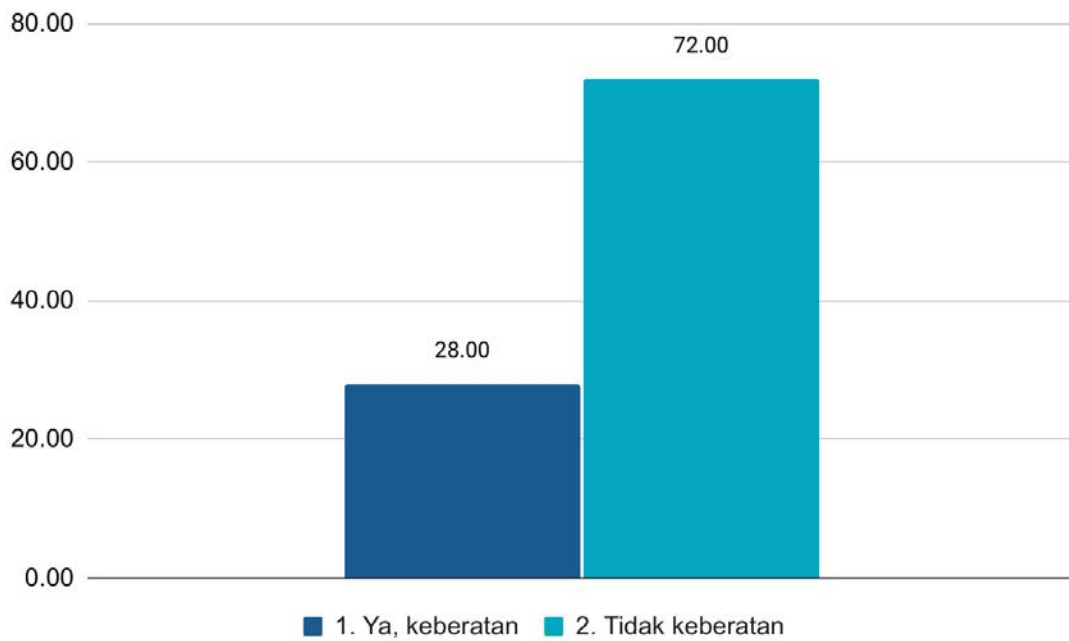


2) Bogor

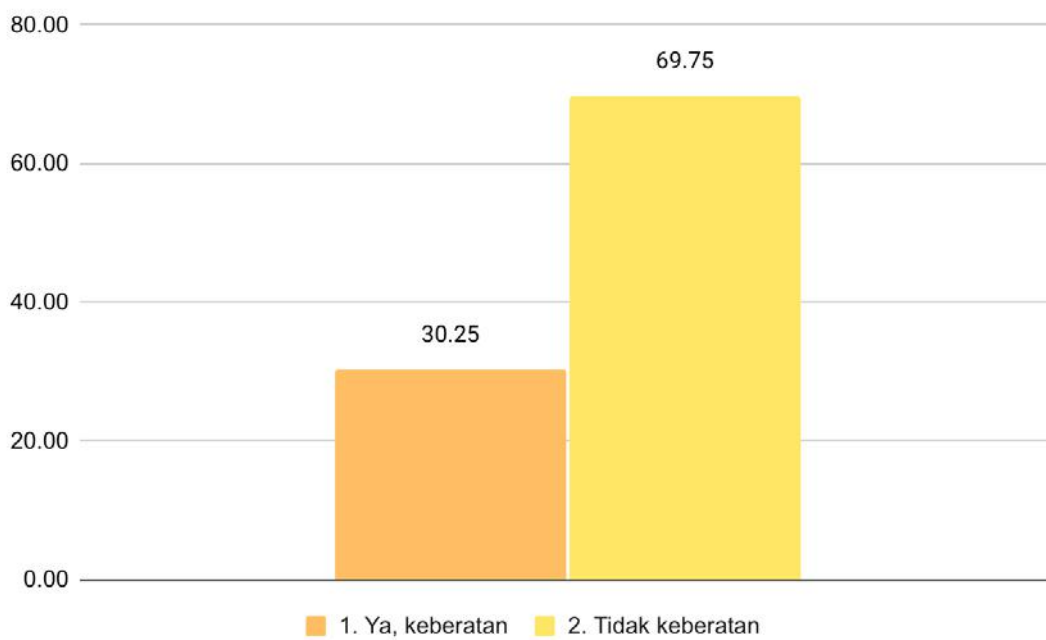


T-1. Apakah Ibu/Bapak keberatan atau tidak keberatan jika pengungsi luar negeri dan keluarganya terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan?

1) Pekanbaru

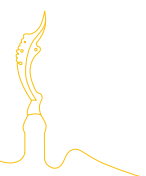


2) Bogor



5.6. Akses Untuk Penghidupan Bagi Pengungsi

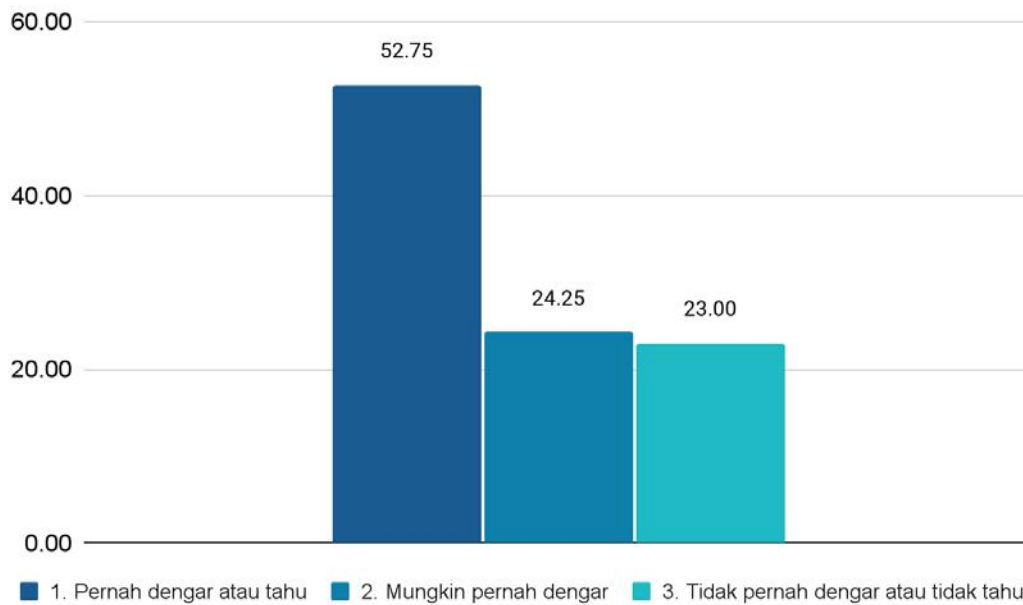
Pengantar: Pengungsi dari luar negeri di Indonesia telah terjebak dalam situasi transit yang berkepanjangan, selama kurun waktu mulai tiga tahun hingga tak terbatas, dalam upaya mereka untuk mencapai negara tujuan. Status sebagai pengungsi asing dan pencari suaka membuat mereka kehilangan hak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti hak untuk mencari nafkah, pendidikan, dan kesehatan.



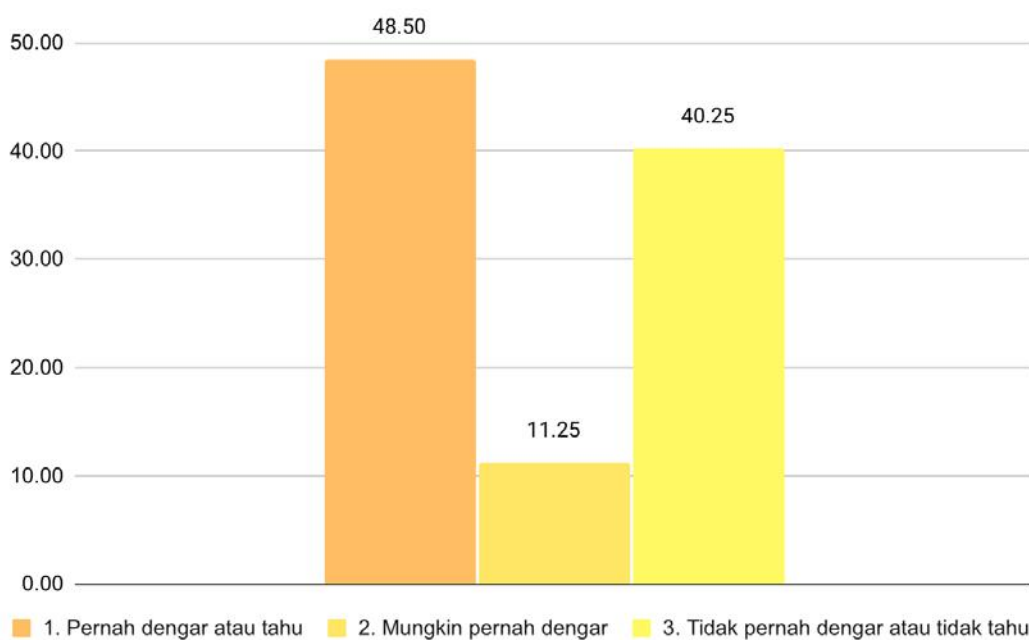
Hak Pengungsi Anak

U-1. Apakah Ibu/Bapak pernah mendengar atau mengetahui bahwa anak-anak juga mengungsi?

1) Pekanbaru

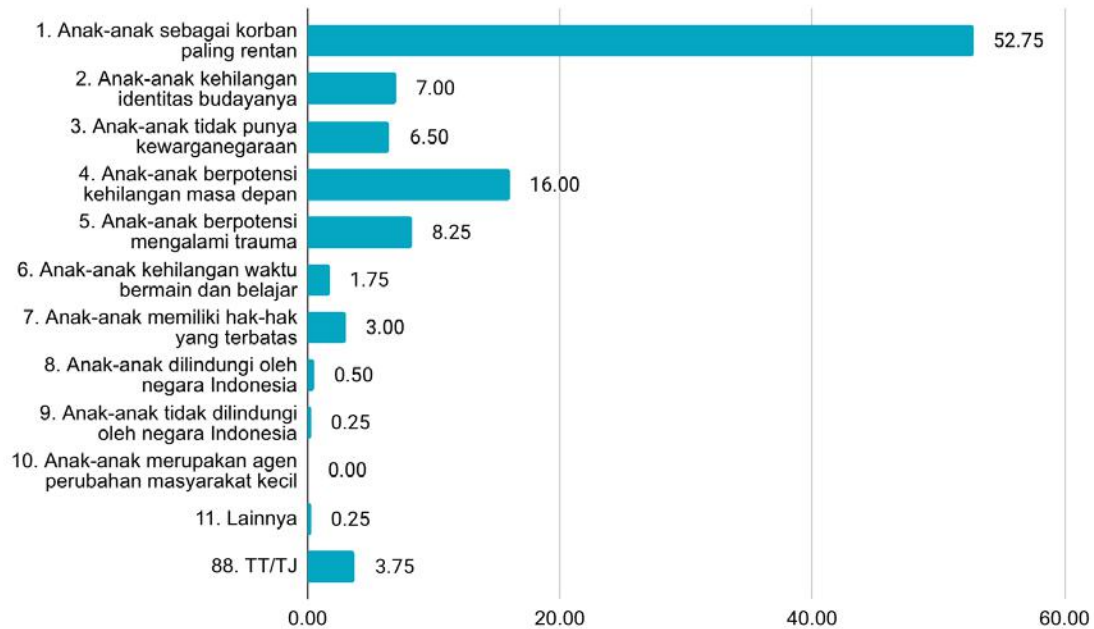


2) Bogor

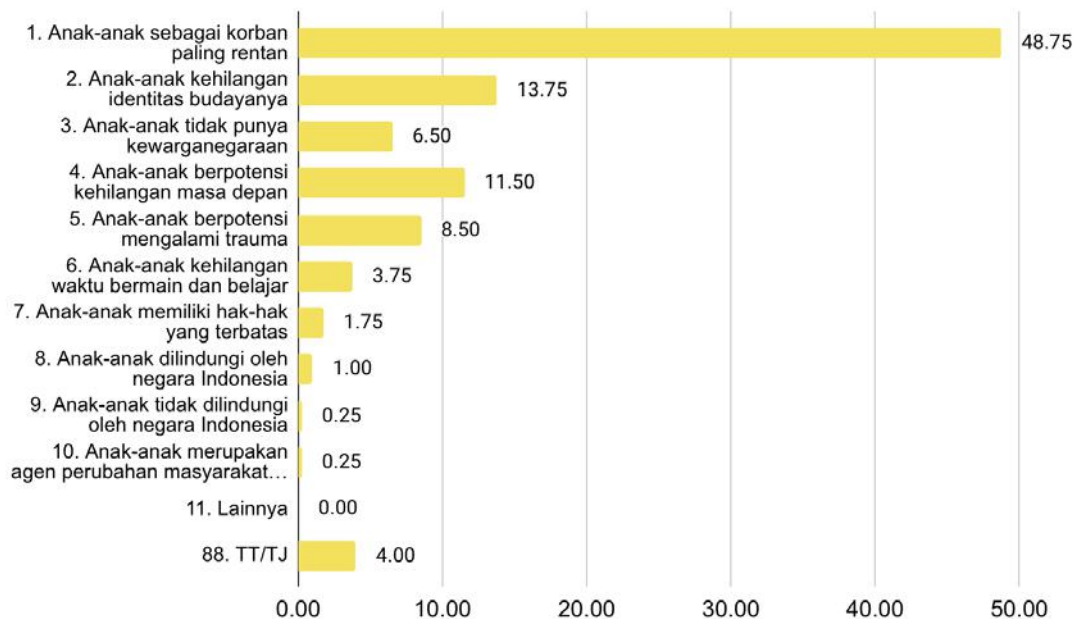


U-2. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak mengenai pengungsi anak?

1) Pekanbaru

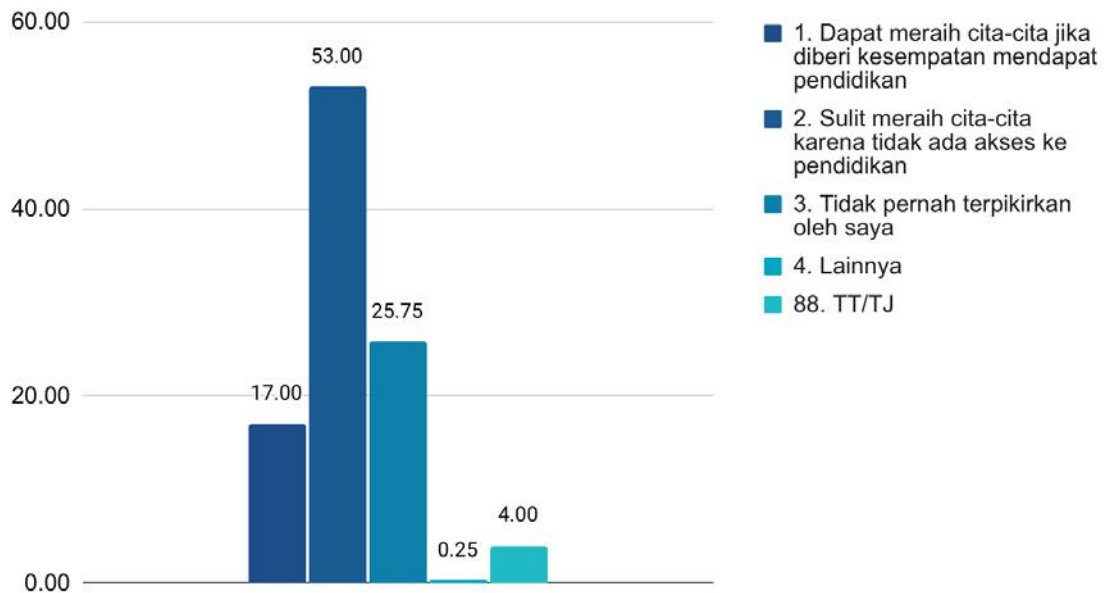


2) Bogor

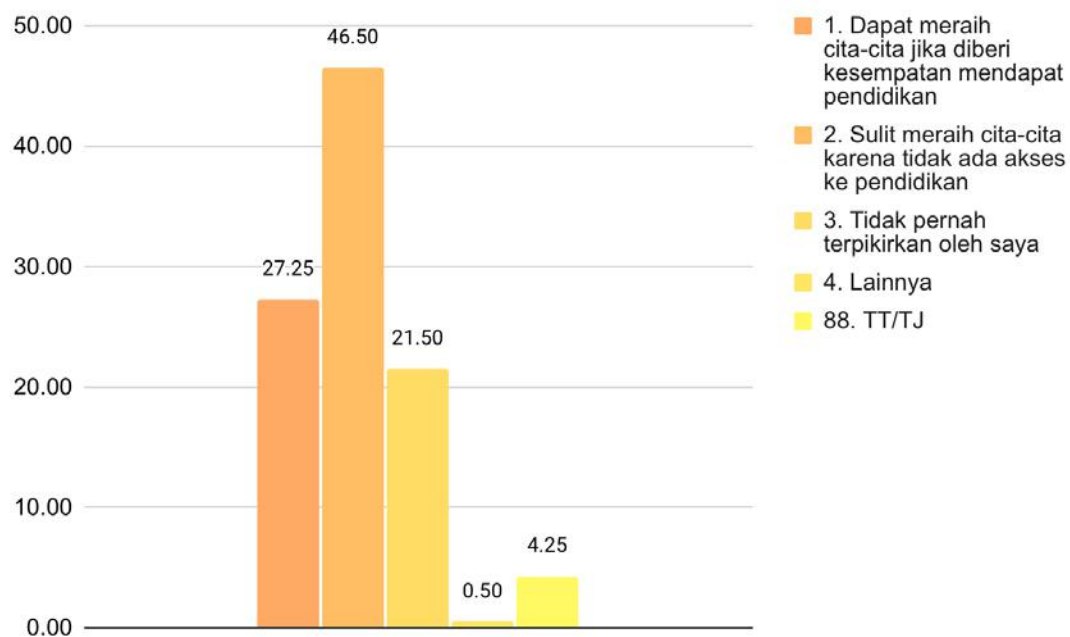


U-3. Menurut Ibu/Bapak, akan bagaimanakah masa depan anak-anak dan pemuda yang mengalami masa pengungsian?

1) Pekanbaru

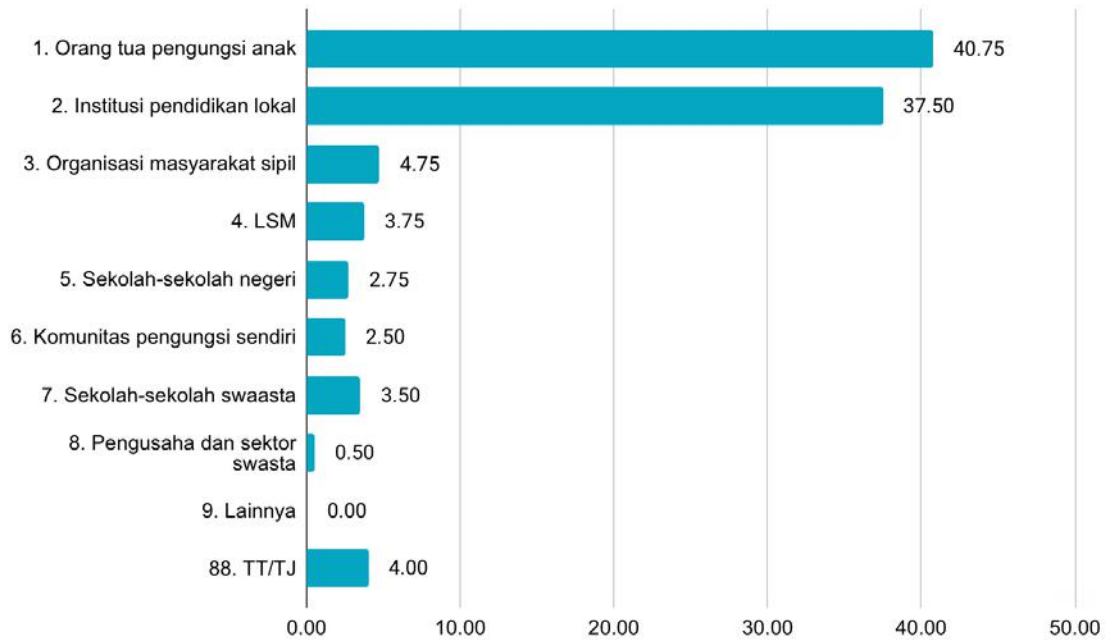


2) Bogor

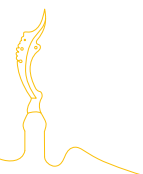
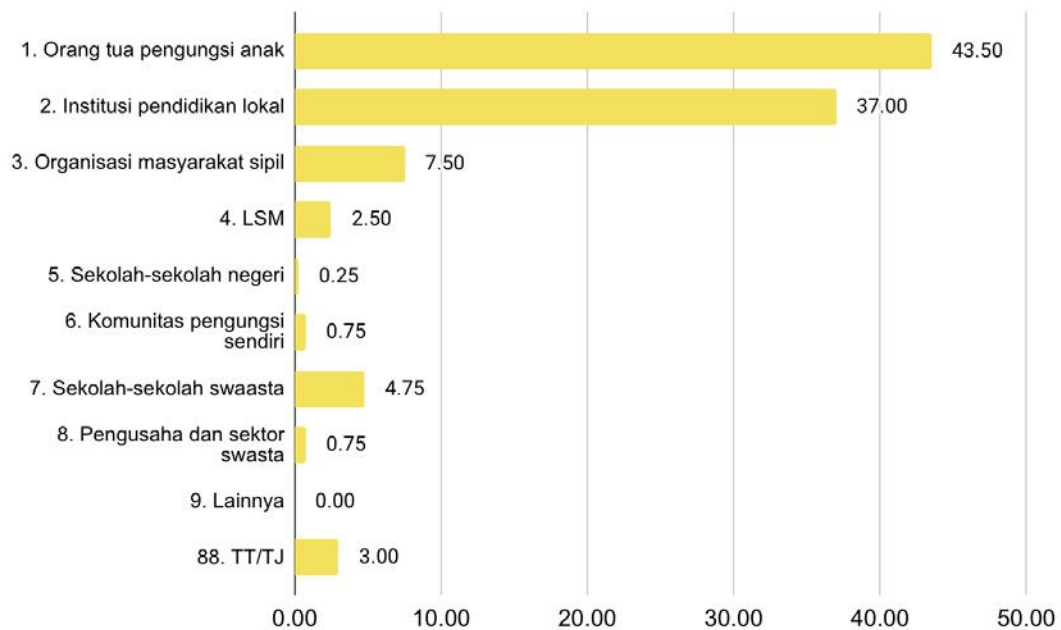


U-4. Menurut Ibu/Bapak, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab pada pengungsi anak?

1) Pekanbaru

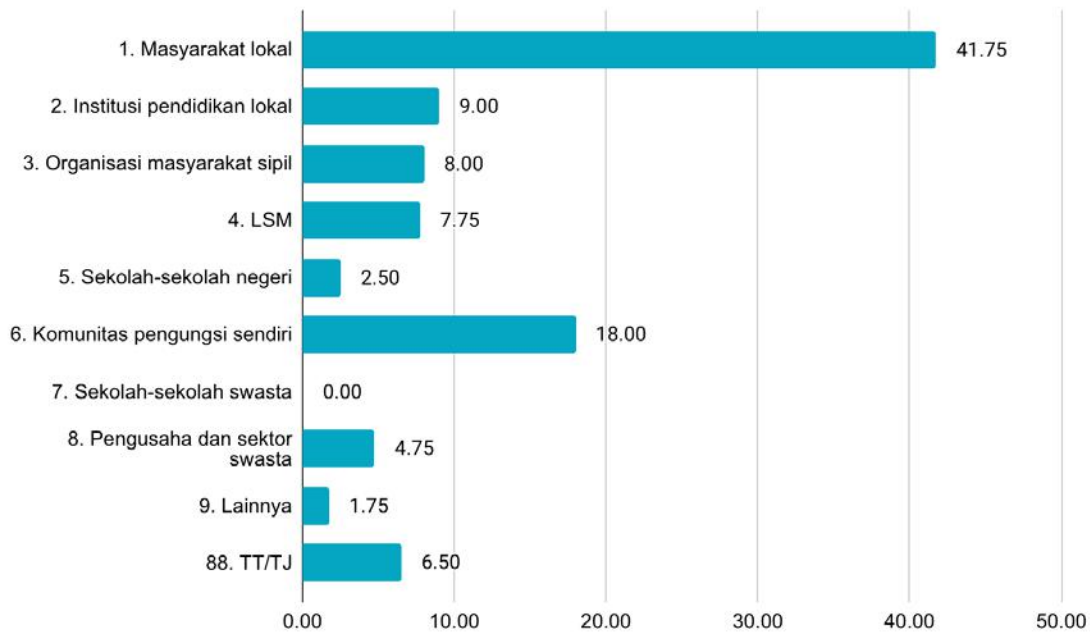


2) Bogor

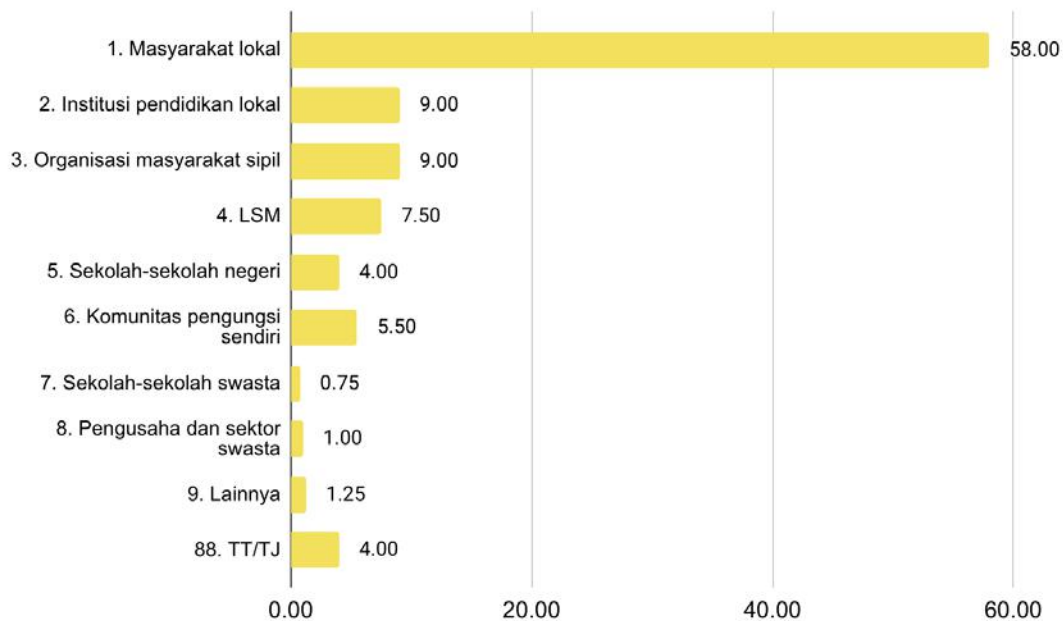


U-5. Menurut Ibu/Bapak, siapa yang bisa turut serta bertanggung jawab pada pengungsi anak?

1) Pekanbaru

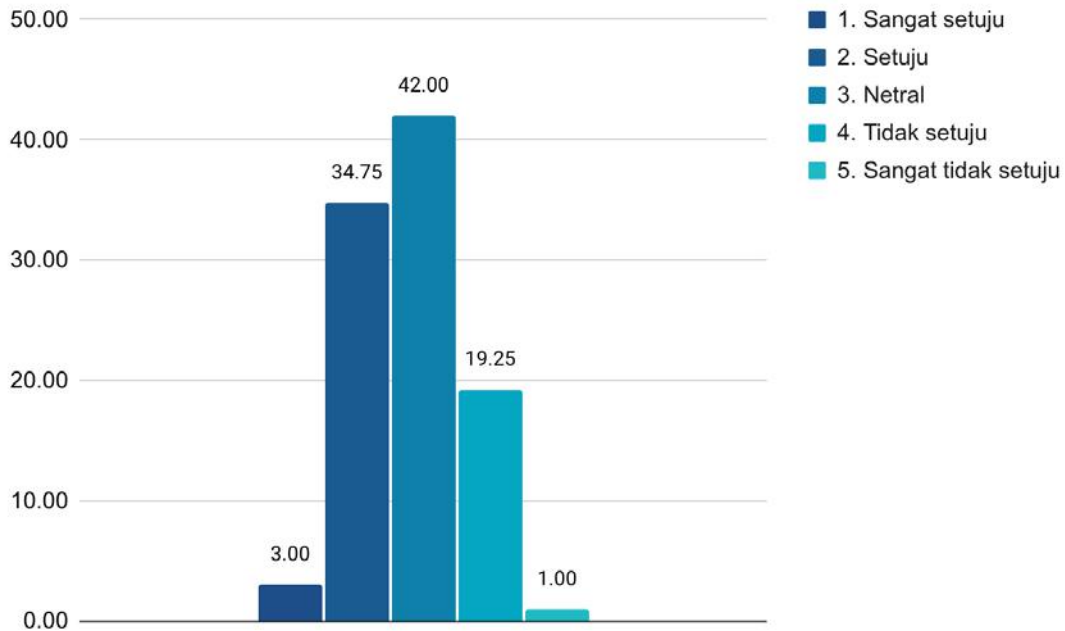


2) Bogor

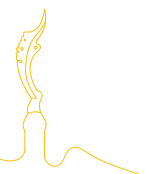
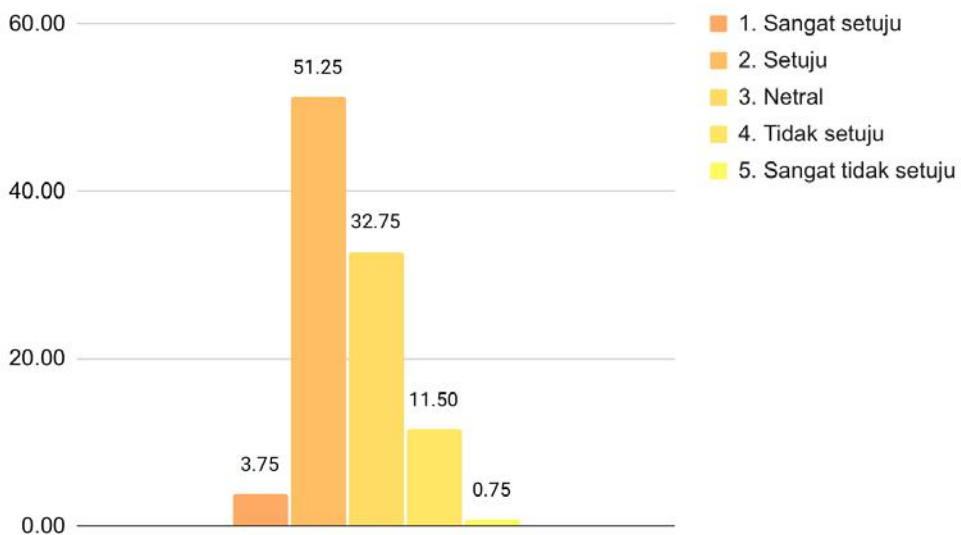


V-1-1. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi anak boleh bersekolah di sekolah negeri?

1) Pekanbaru

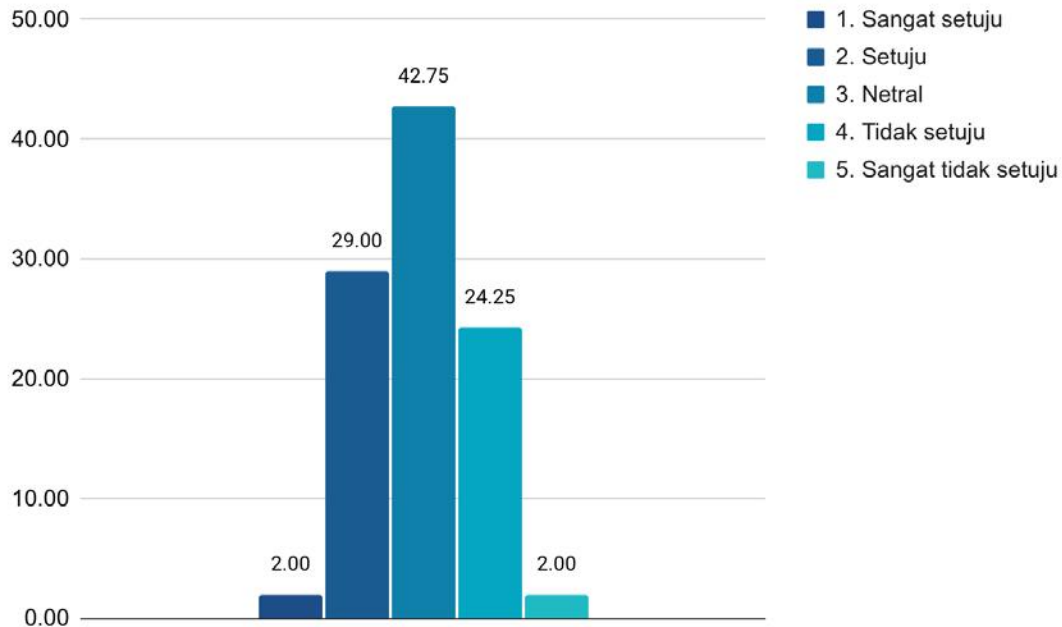


2) Bogor

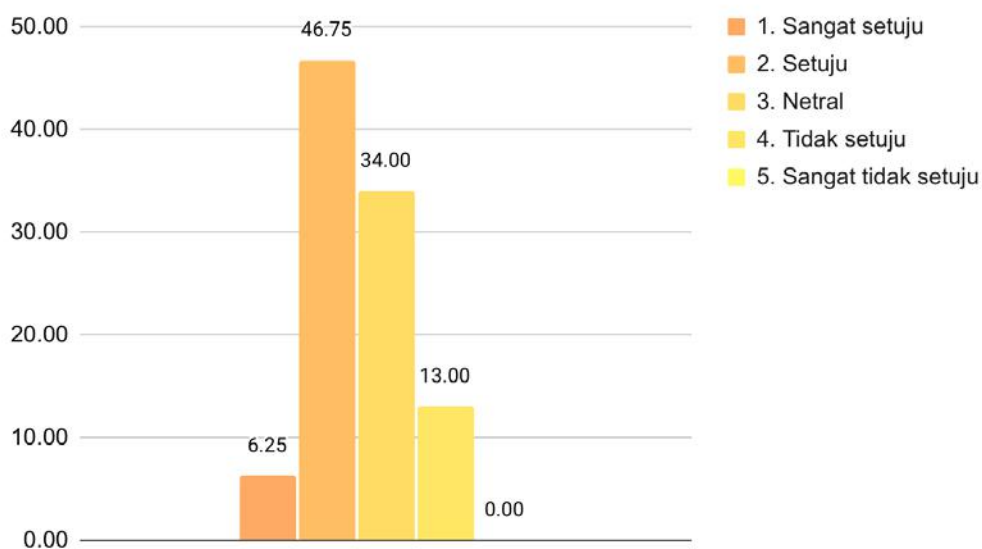


V-1-2. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi anak dan remaja boleh bersekolah di sekolah negeri atau swasta dan mendapat bantuan operasional sekolah, nomor induk, dan ijazah?

1) Pekanbaru

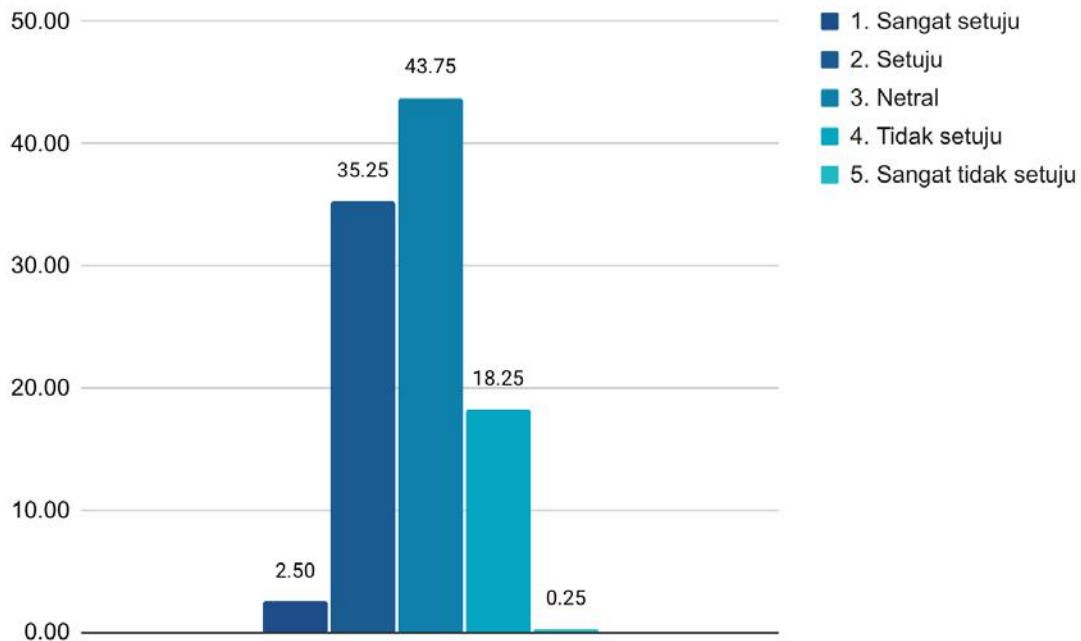


2) Bogor

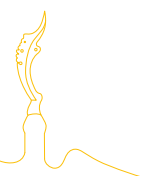
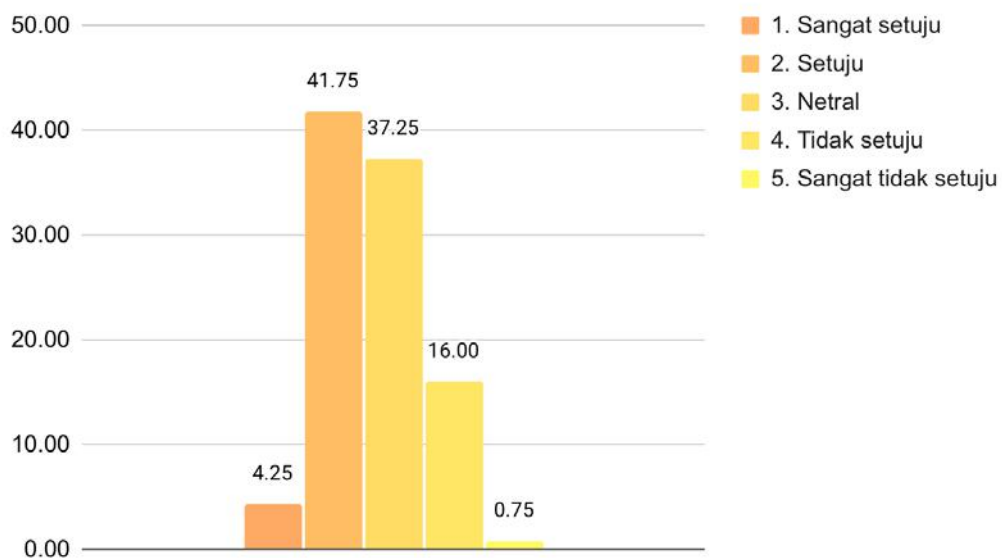


V-1-3. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi remaja diterima untuk aktif di kegiatan masyarakat seperti karang taruna, remaja masjid, dan semacamnya?

1) Pekanbaru

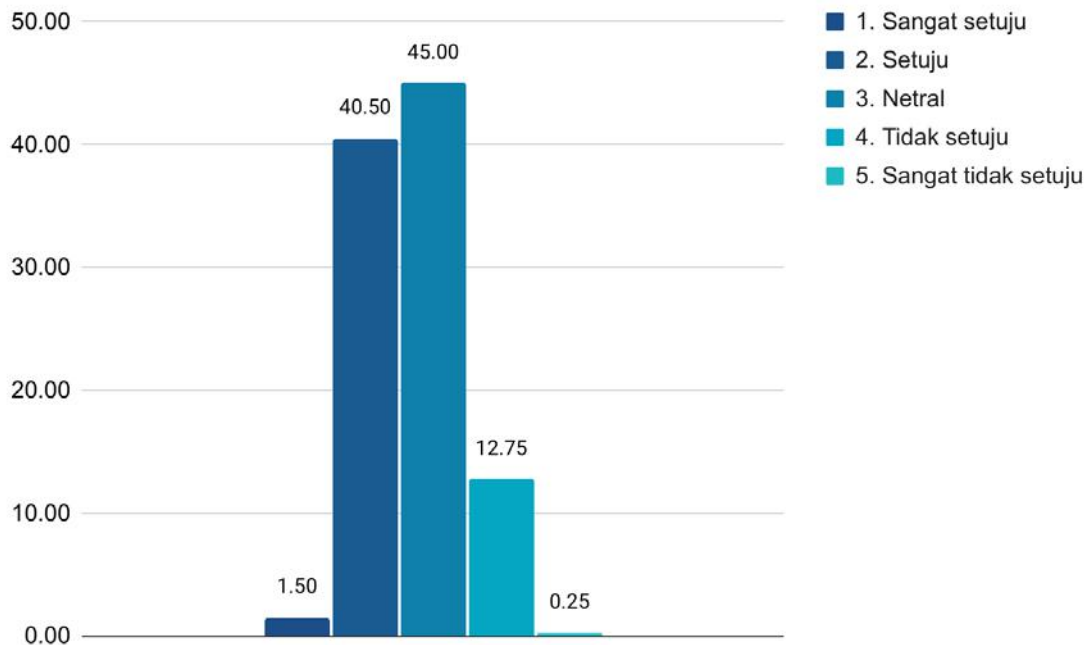


2) Bogor

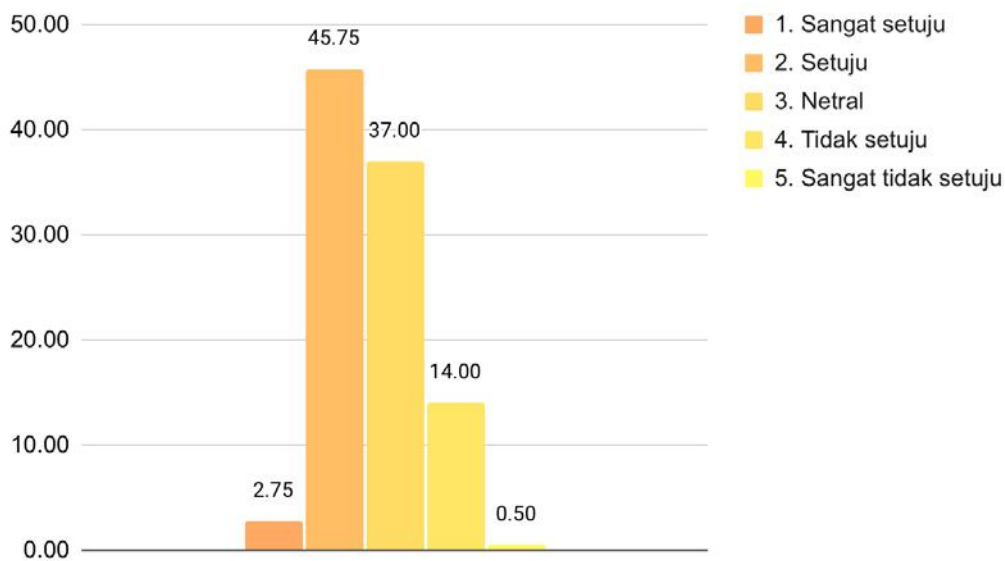


V-1-4. Setujukah Ibu/Bapak jika anak atau keluarga Ibu/Bapak berteman dengan pengungsi anak atau remaja yang sebaya di sekolah?

1) Pekanbaru

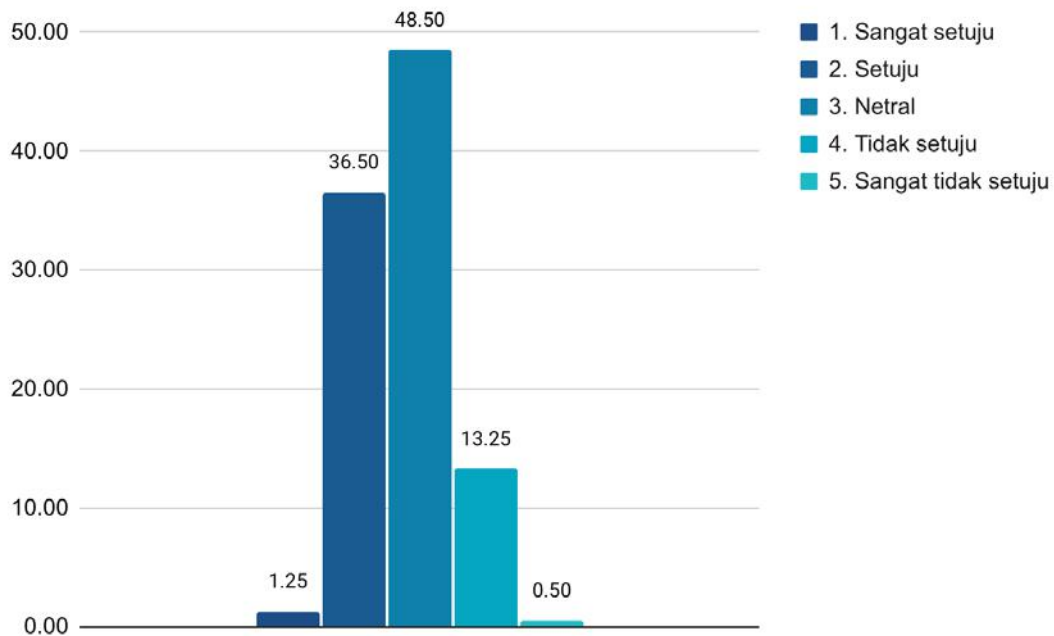


2) Bogor

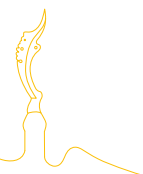
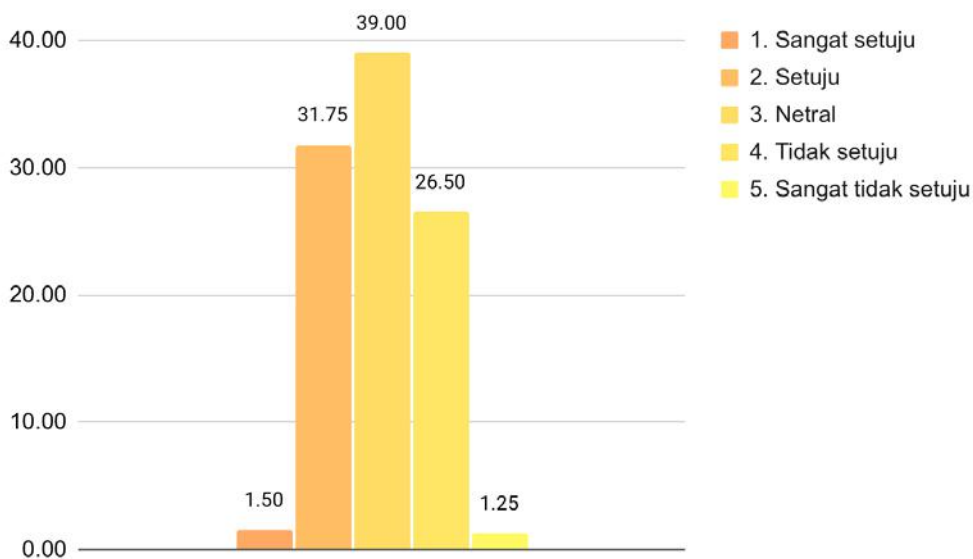


V-1-5. Setujukah Ibu/Bapak jika anak atau keluarga Ibu/Bapak berteman dengan pengungsi anak atau remaja yang sebaya di kegiatan luar sekolah?

1) Pekanbaru

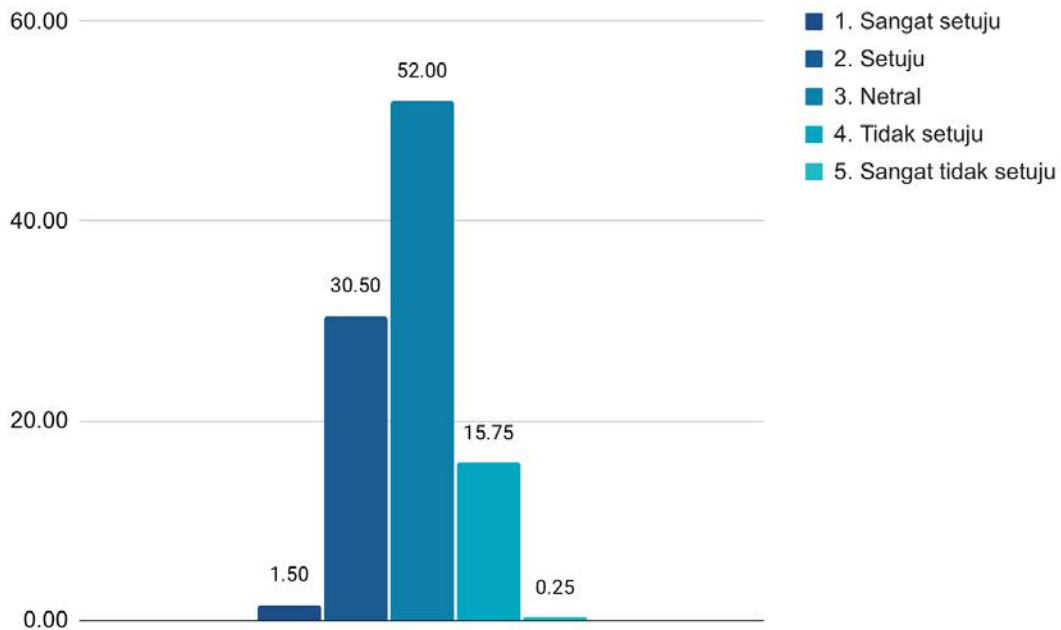


2) Bogor

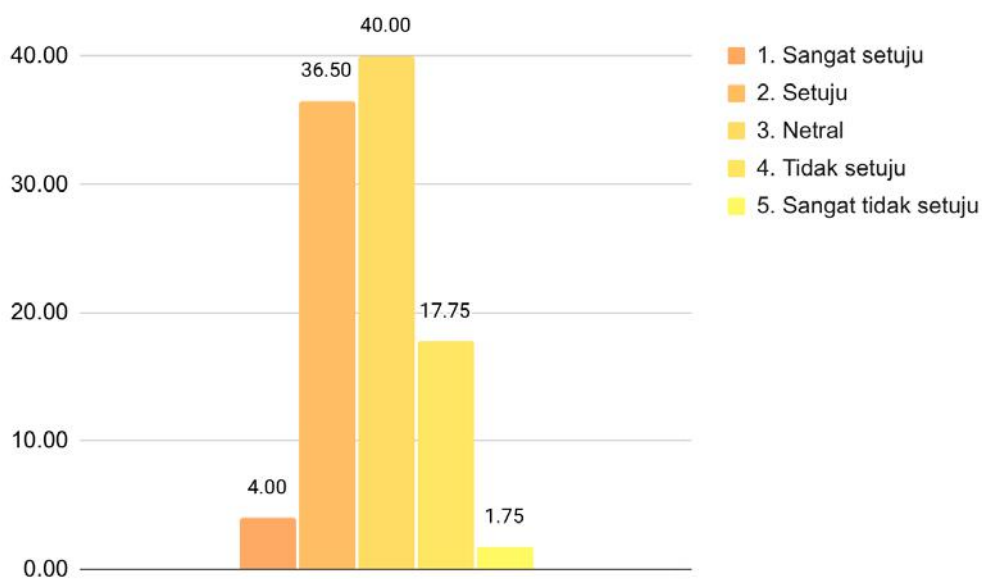


V-1-6. Setujukah Ibu/Bapak jika anak atau keluarga Ibu/Bapak berteman dengan pengungsi dewasa dalam kapasitas sebagai guru, pengasuh, perawat, dan sejenisnya?

1) Pekanbaru



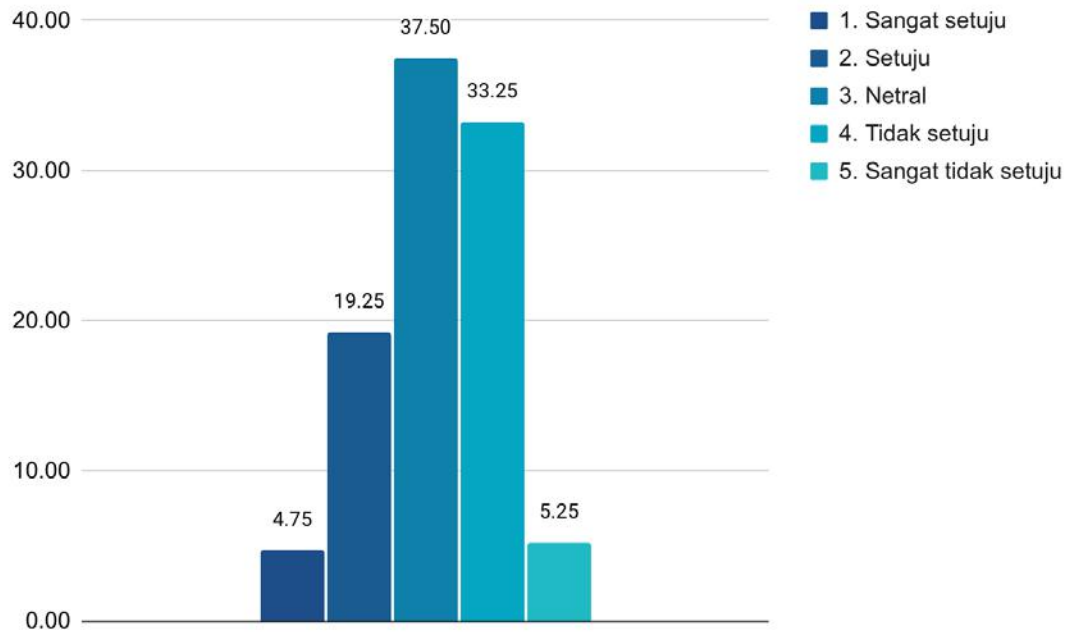
2) Bogor



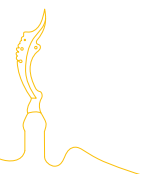
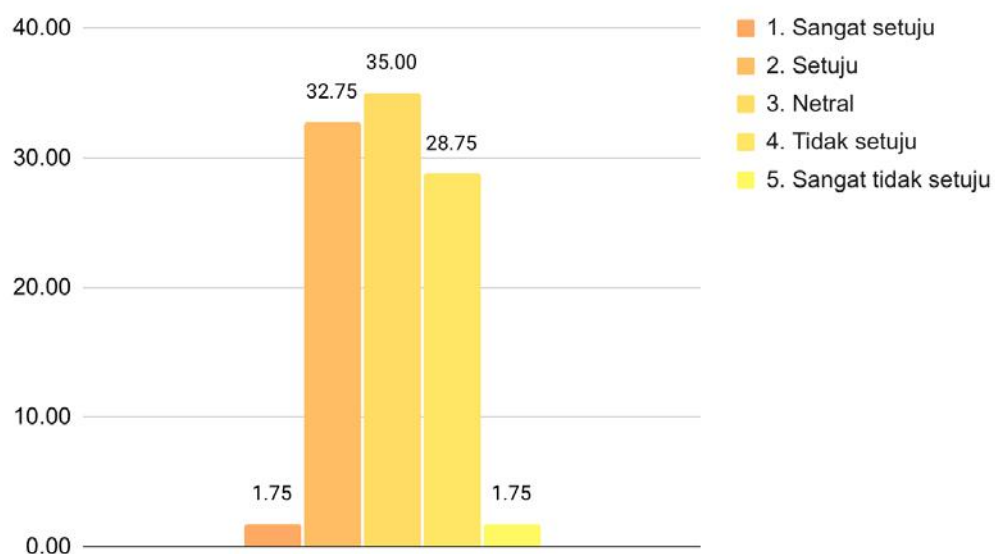
Layanan Kesehatan bagi Pengungsi Luar Negeri

V-2-1. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan dengan membayar iuran?

1) Pekanbaru

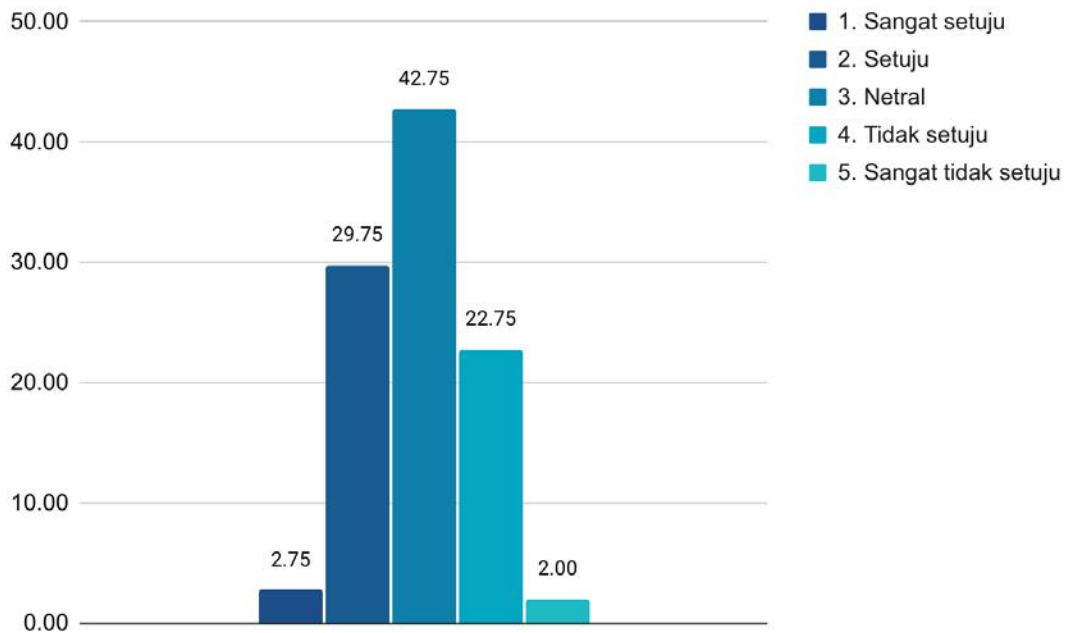


2) Bogor

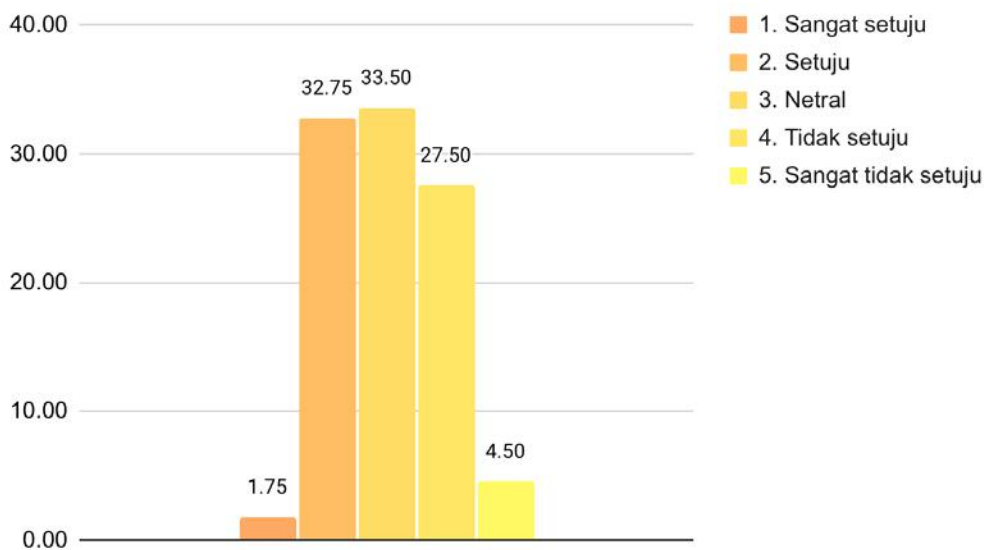


V-2-2. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi mendapatkan bantuan sosial pemerintah?

1) Pekanbaru

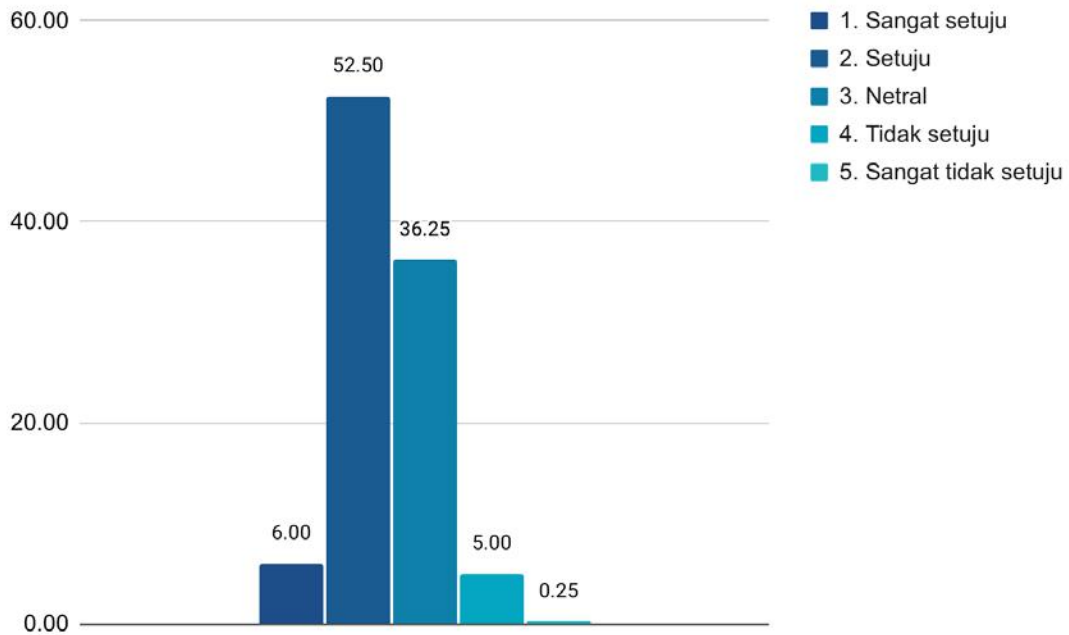


2) Bogor

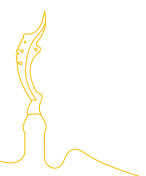
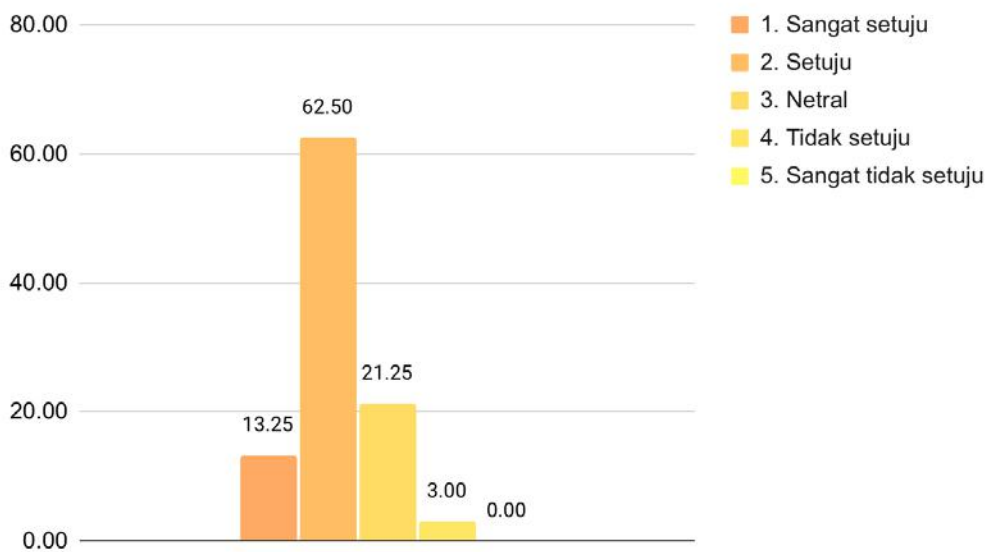


V-2-3. Setujukah Ibu/Bapak jika bayi dan balita pengungsi mendapat layanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di lingkungan?

1) Pekanbaru

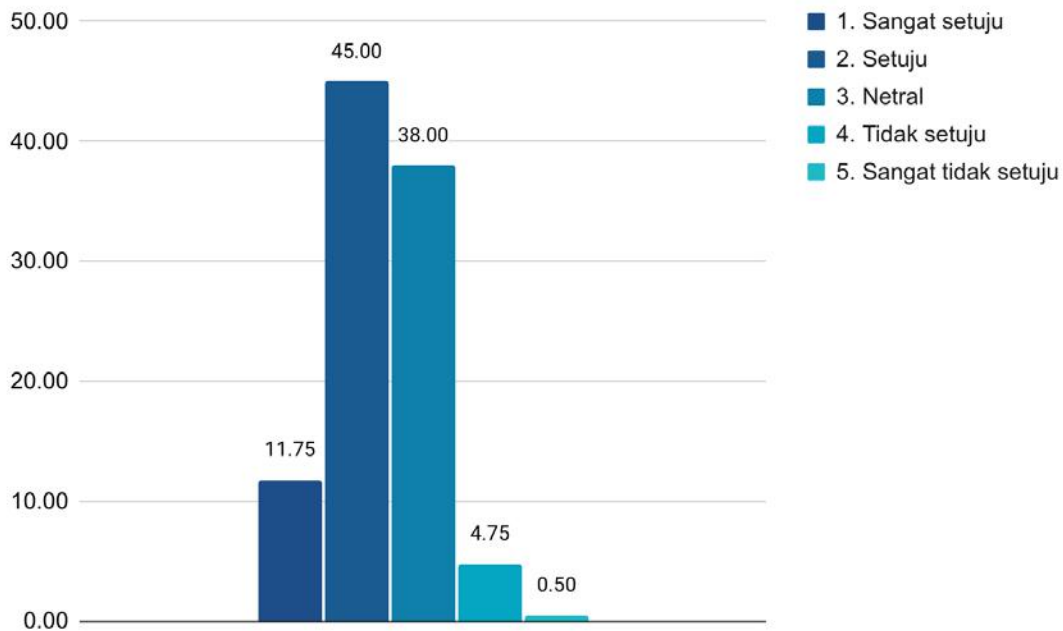


2) Bogor

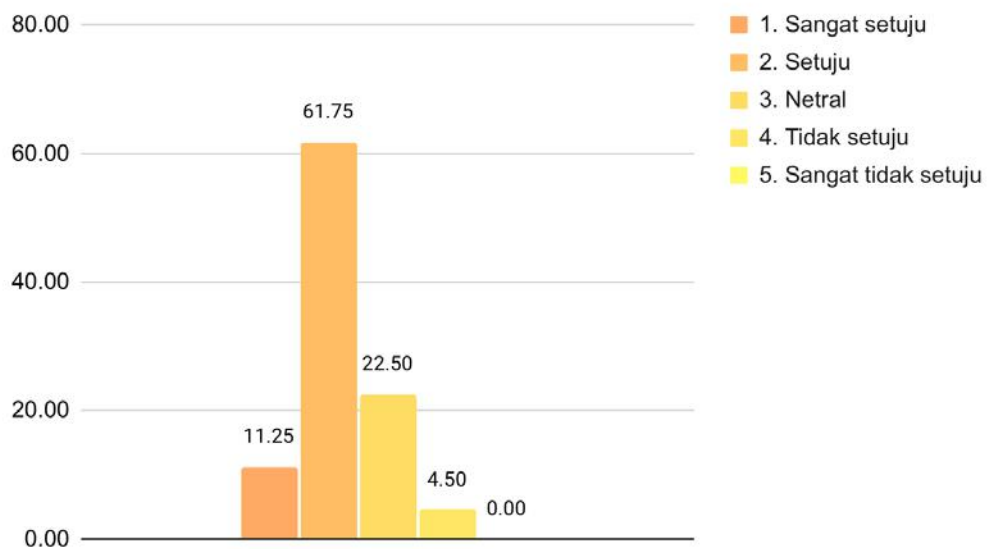


V-2-4. (DC-9) Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi dapat mengakses layanan vaksinasi COVID-19?

1) Pekanbaru

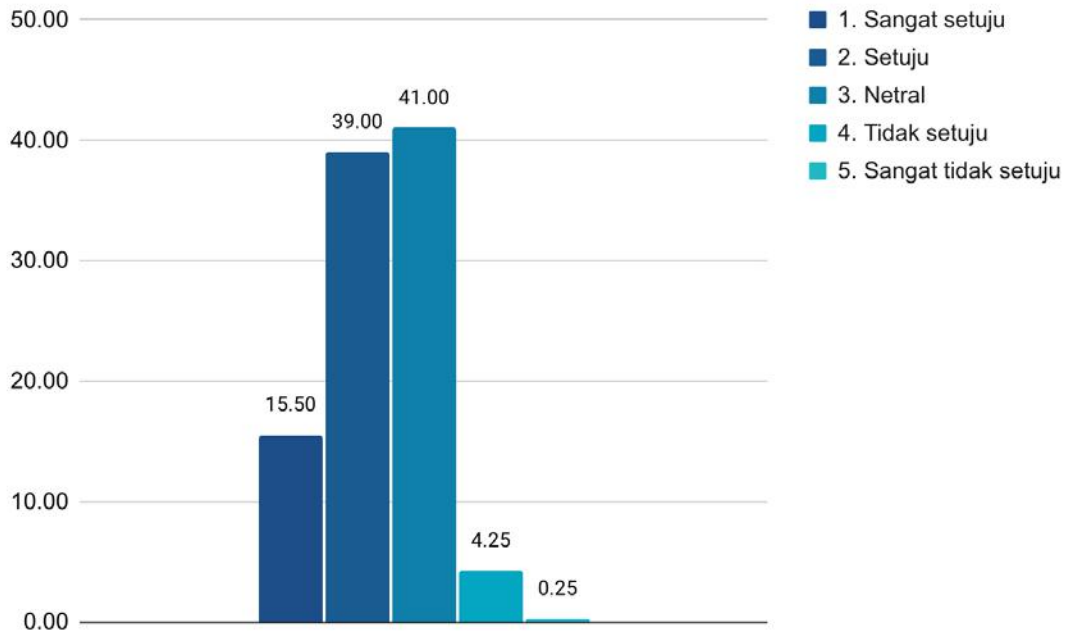


2) Bogor

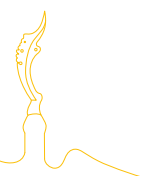
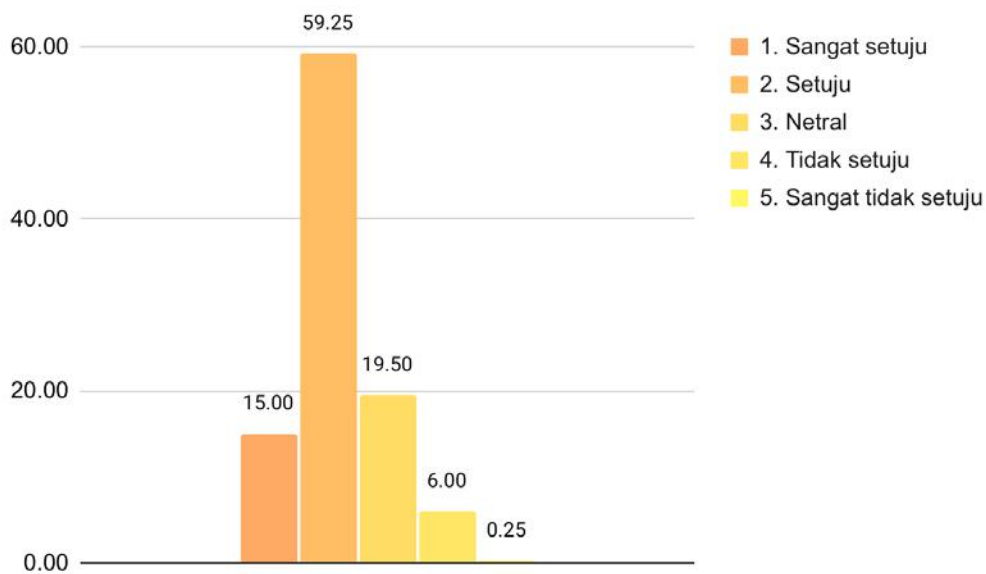


V-2-5. (DC-10) Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan pemerintah ketika terinfeksi COVID-19 sebagaimana masyarakat pada umumnya?

1) Pekanbaru



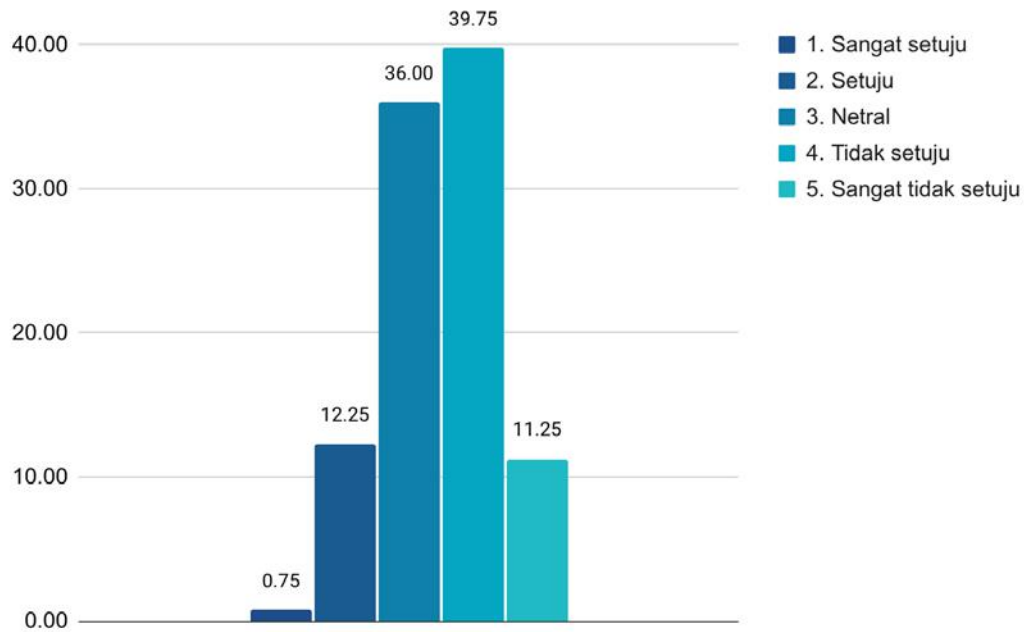
2) Bogor



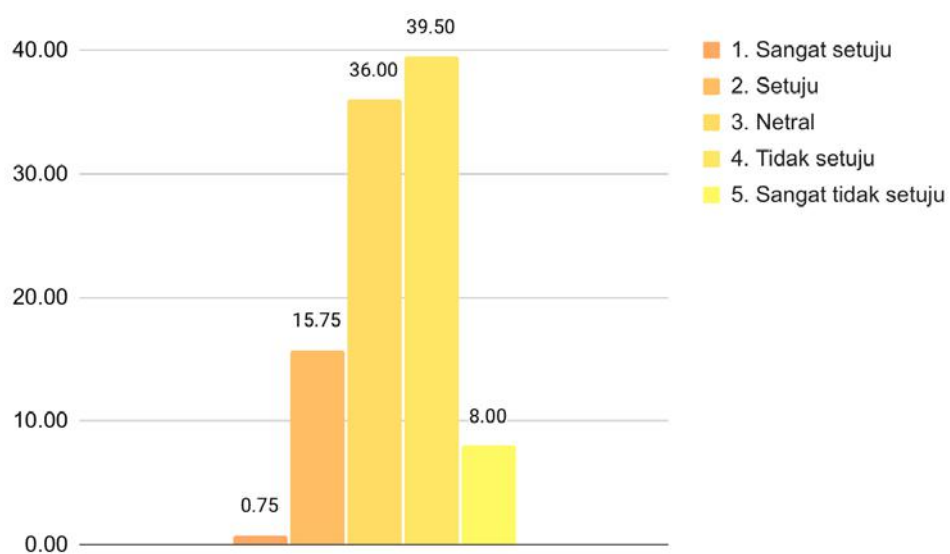
5.7. Hak Asasi Pengungsi

V-3-1. Setujukah Ibu/Bapak jika ruang gerak pengungsi luar negeri tidak perlu dibatasi?

1) Pekanbaru

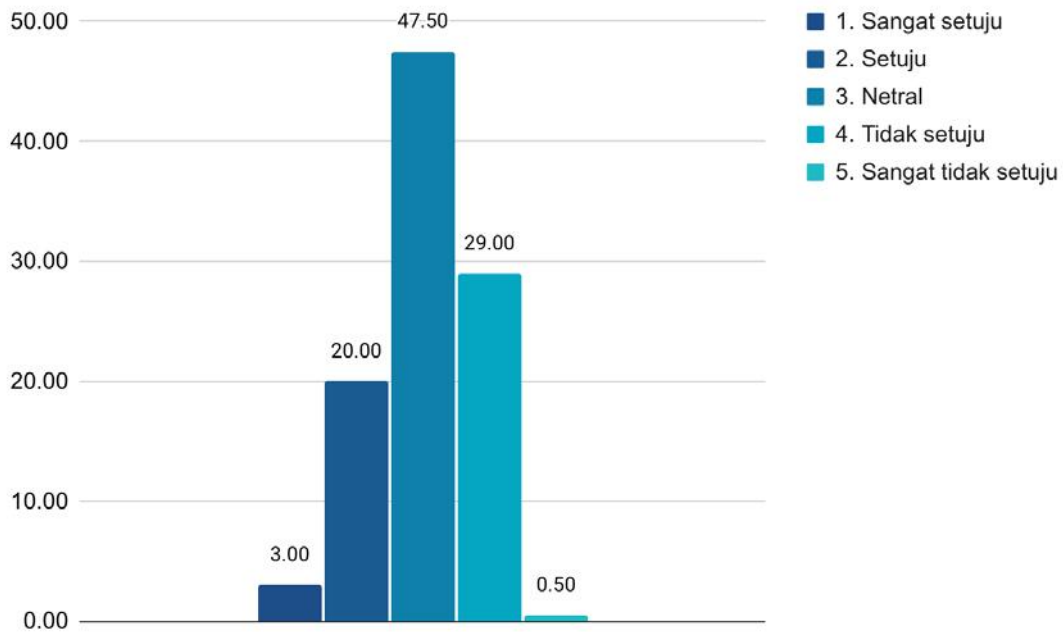


2) Bogor

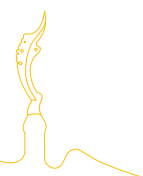
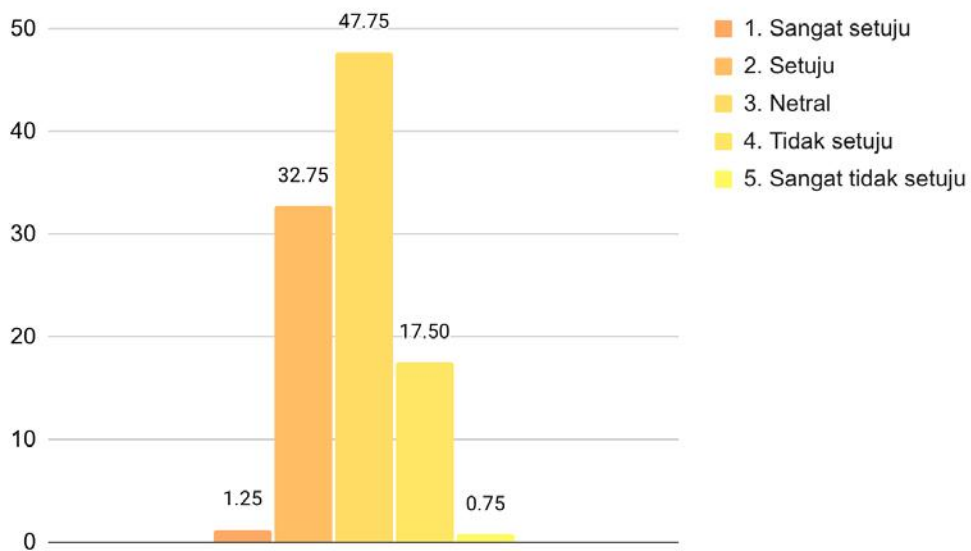


V-3-2. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri boleh tinggal di perkotaan dan hidup berdampingan dengan masyarakat lokal?

1) Pekanbaru

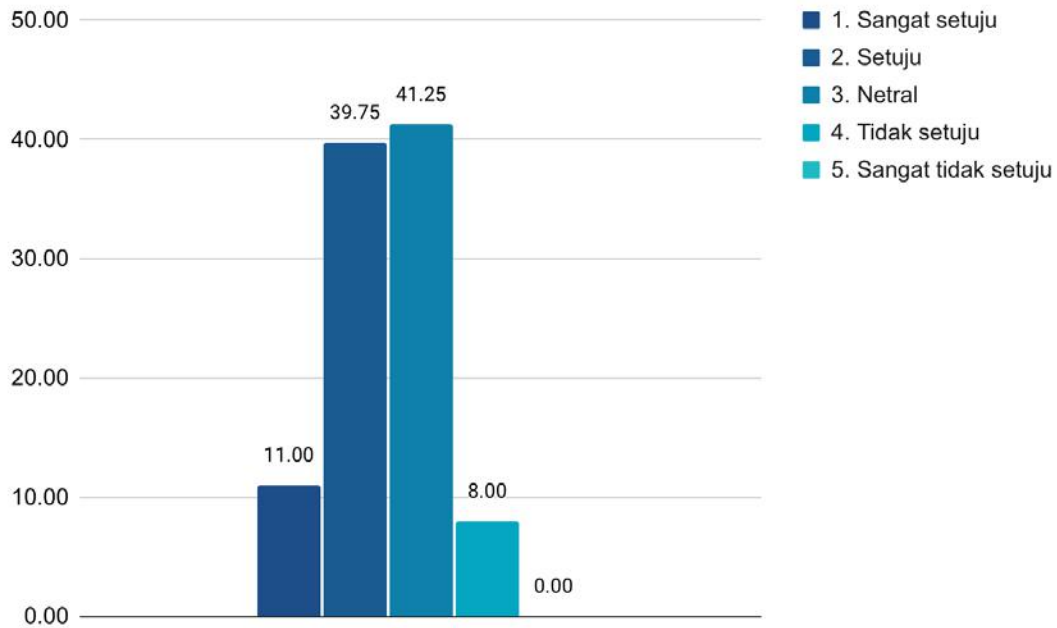


2) Bogor

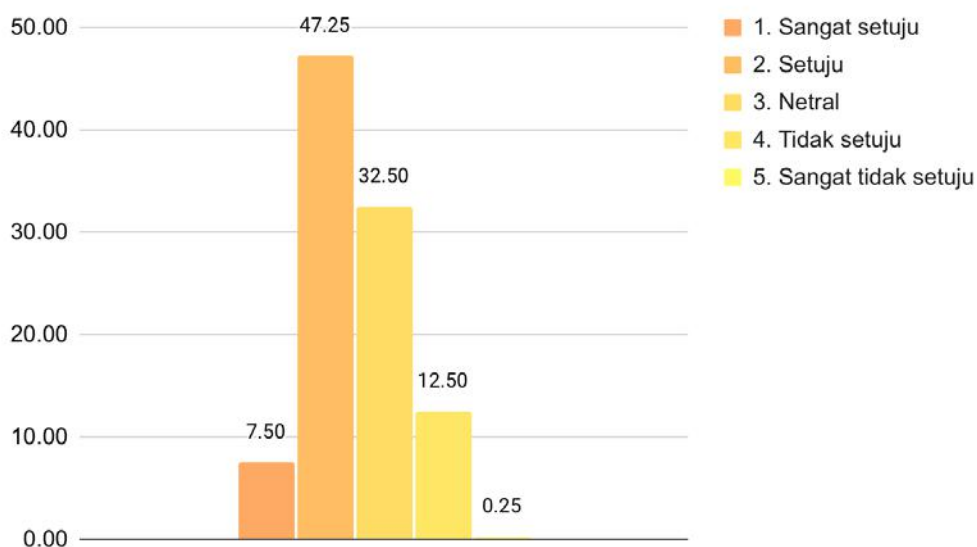


V-3-3. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri sebaiknya ditempatkan di kamp pengungsian, tidak di wilayah perkotaan atau di lingkungan tinggal masyarakat lokal?

1) Pekanbaru

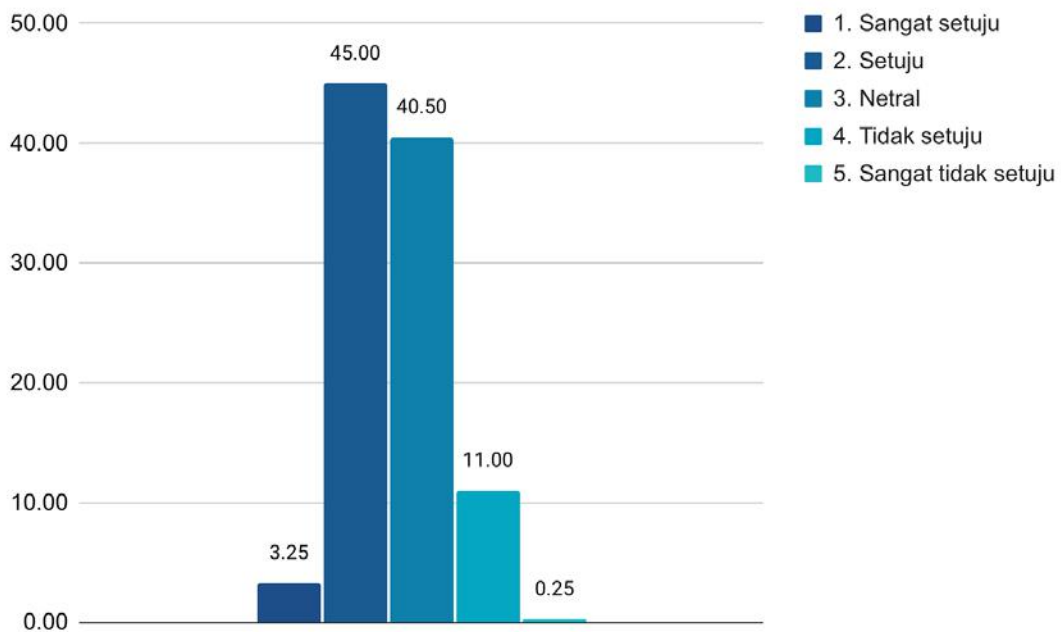


2) Bogor

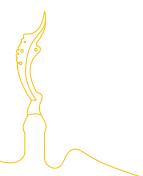
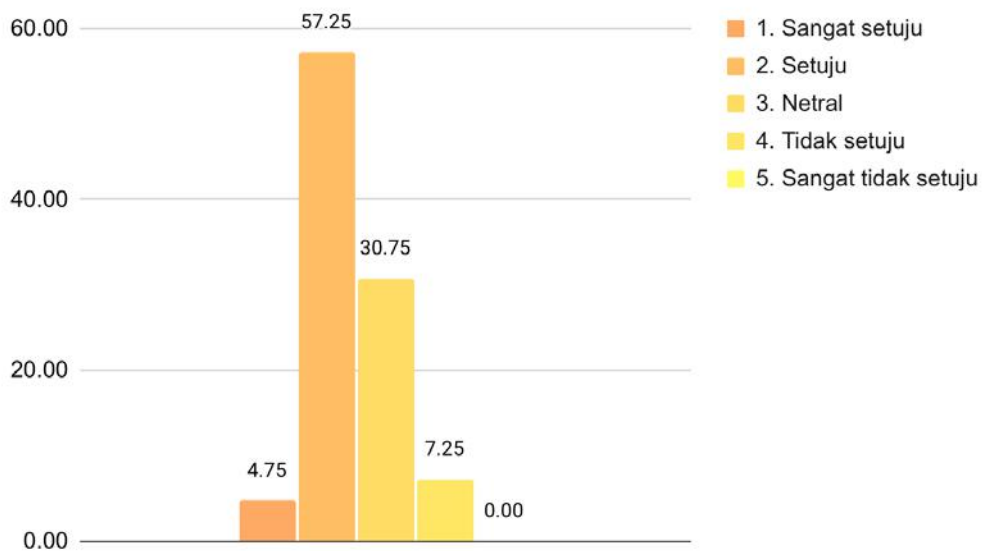


V-3-4. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi anak-anak dan remaja memiliki hak untuk mengakses pendidikan seperti masyarakat pada umumnya?

1) Pekanbaru

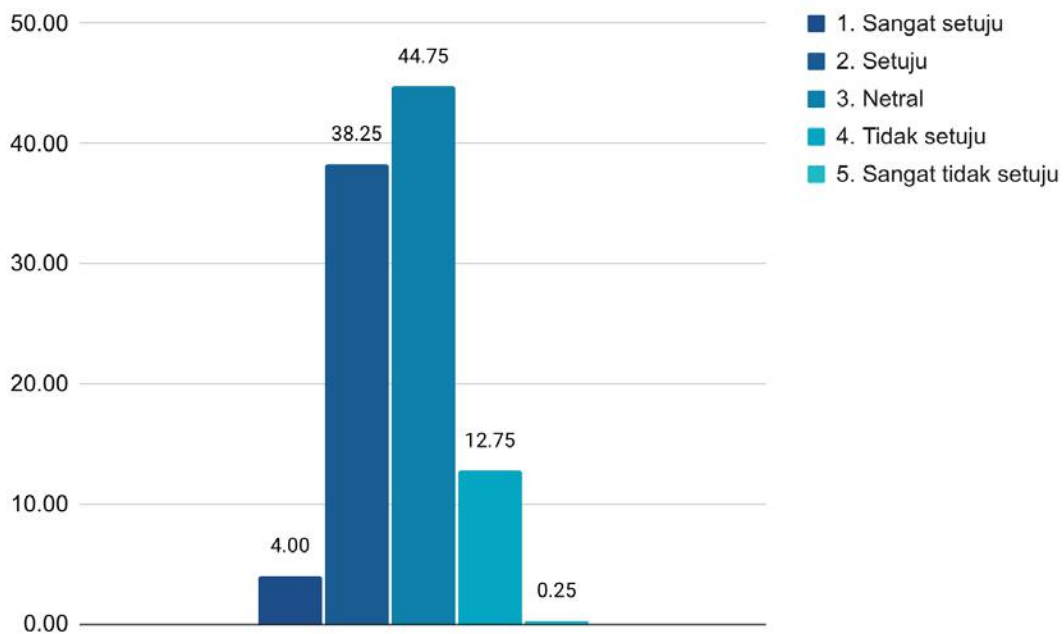


2) Bogor

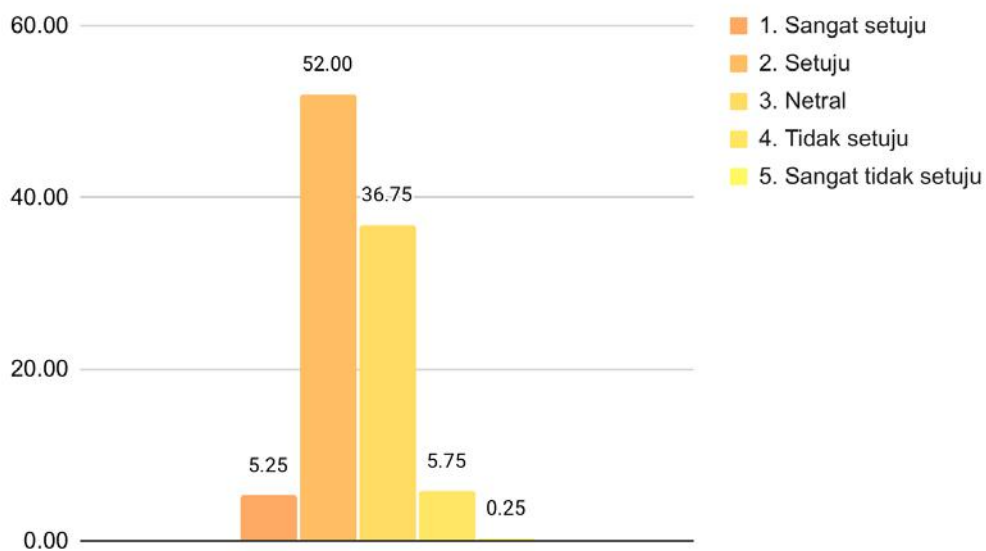


V-3-5. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki hak untuk mengakses fasilitas kesehatan seperti masyarakat pada umumnya?

1) Pekanbaru

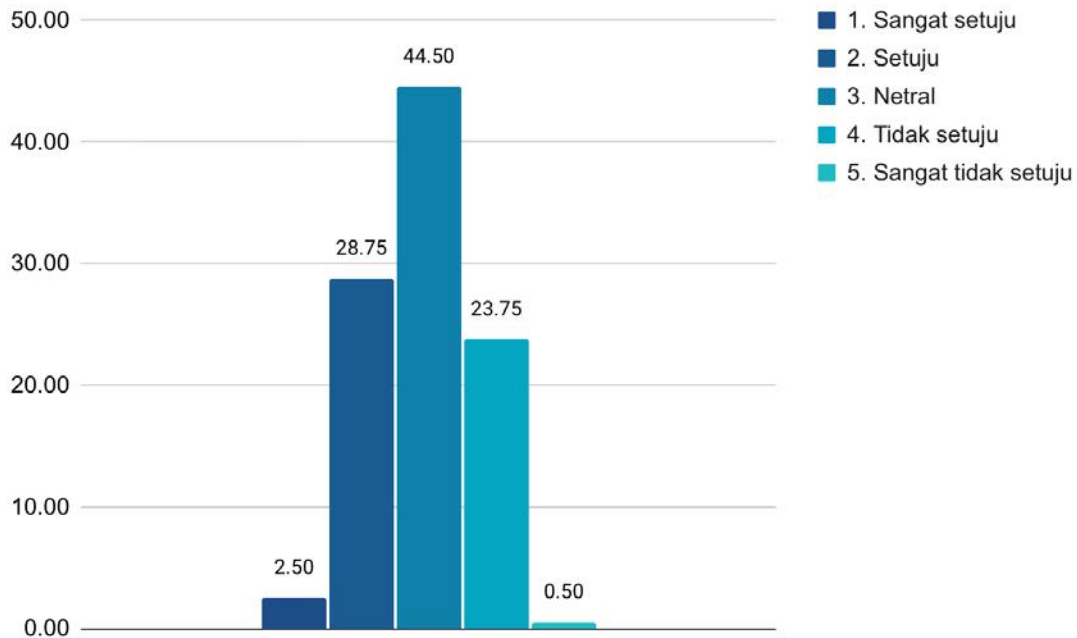


2) Bogor

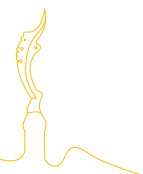
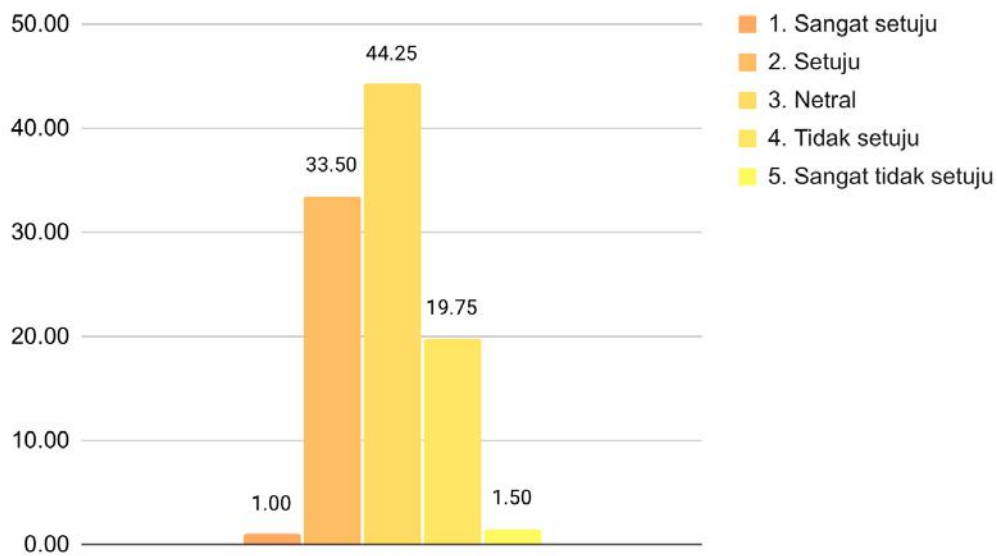


V-3-6. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki hak untuk bekerja seperti masyarakat pada umumnya?

1) Pekanbaru



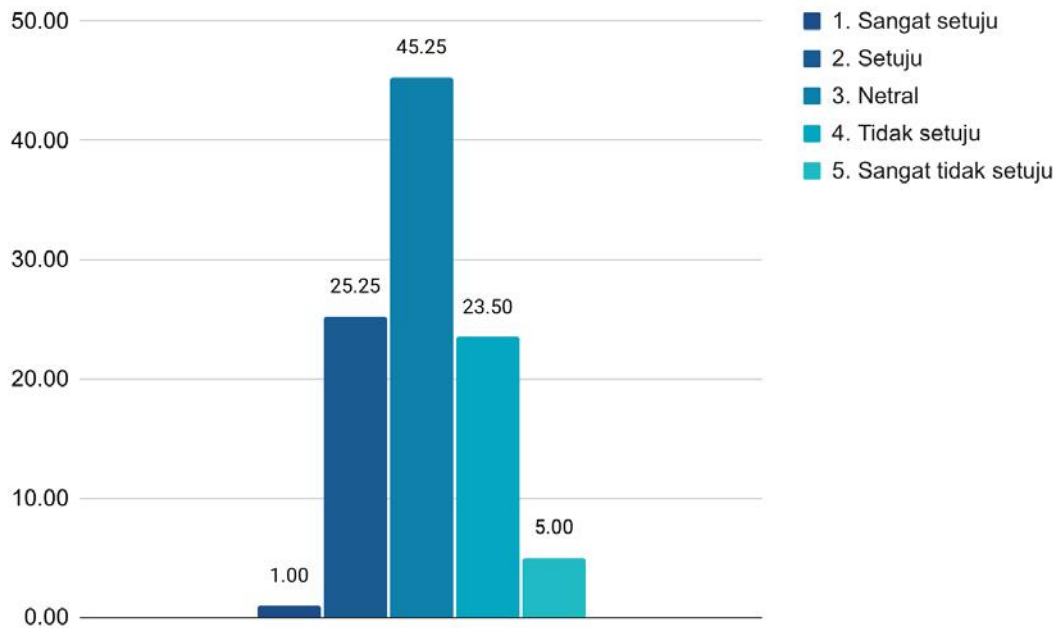
2) Bogor



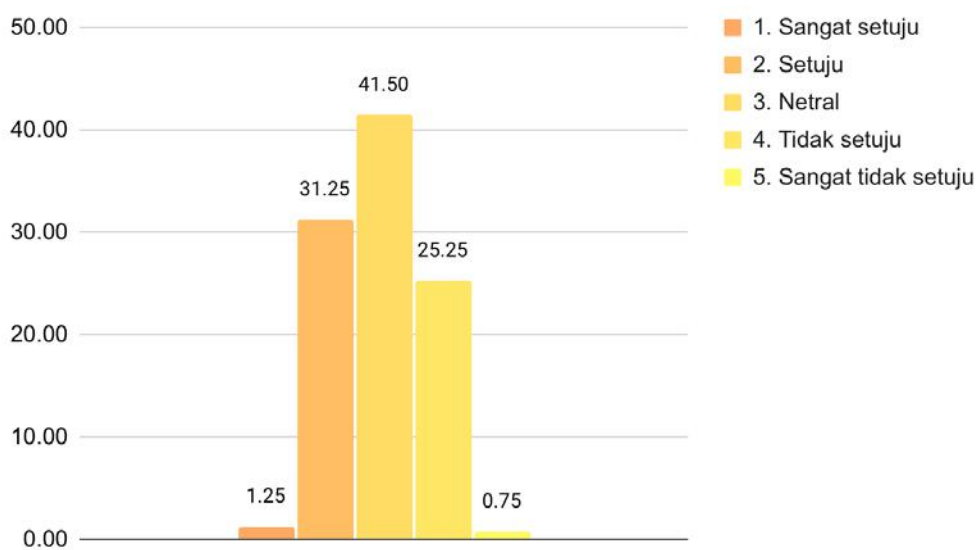
5.8. Hak Bekerja dan Kontribusi Pengungsi Terhadap Perekonomian

V-4-1. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki hak untuk mengakses informasi lowongan pekerjaan?

1) Pekanbaru

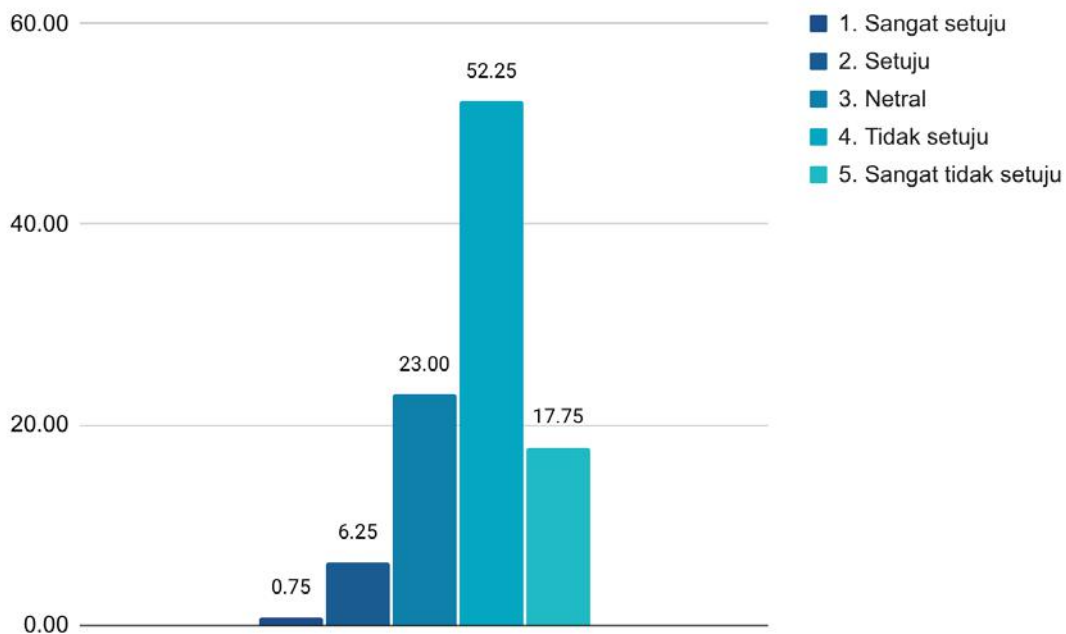


2) Bogor

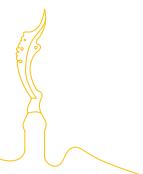
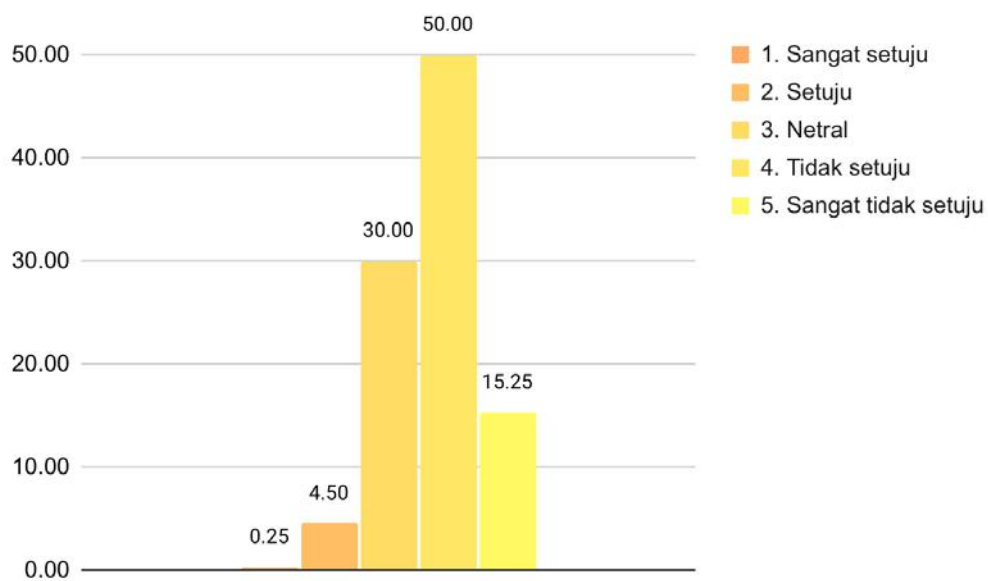


V-4-2. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan untuk bekerja pada sektor pemerintahan?

1) Pekanbaru

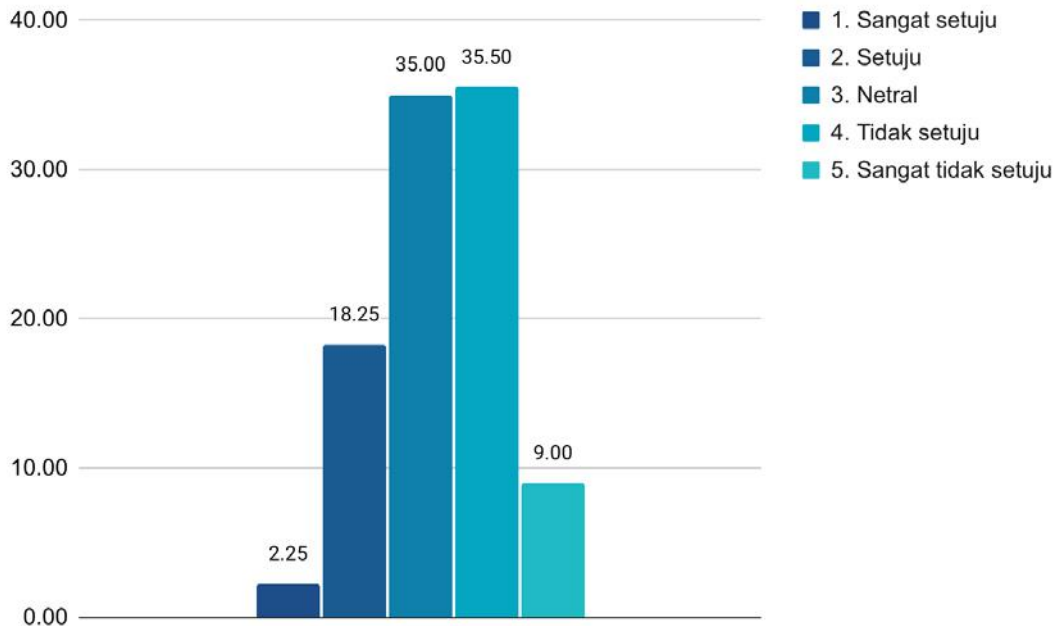


2) Bogor

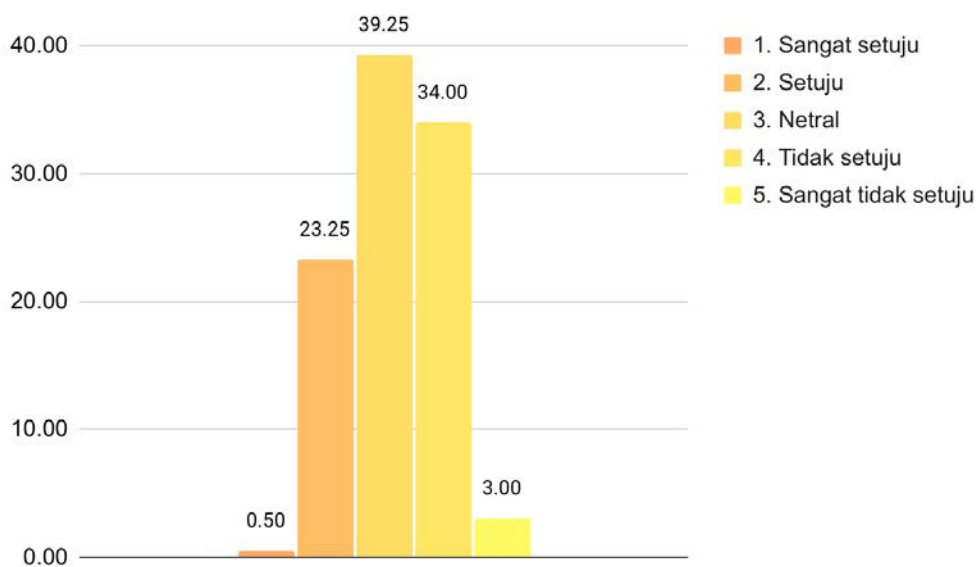


V-4-3. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan untuk bekerja pada sektor swasta menengah, contoh: menjadi pegawai kantor swasta, bank swasta, atau guru di sekolah swasta?

1) Pekanbaru

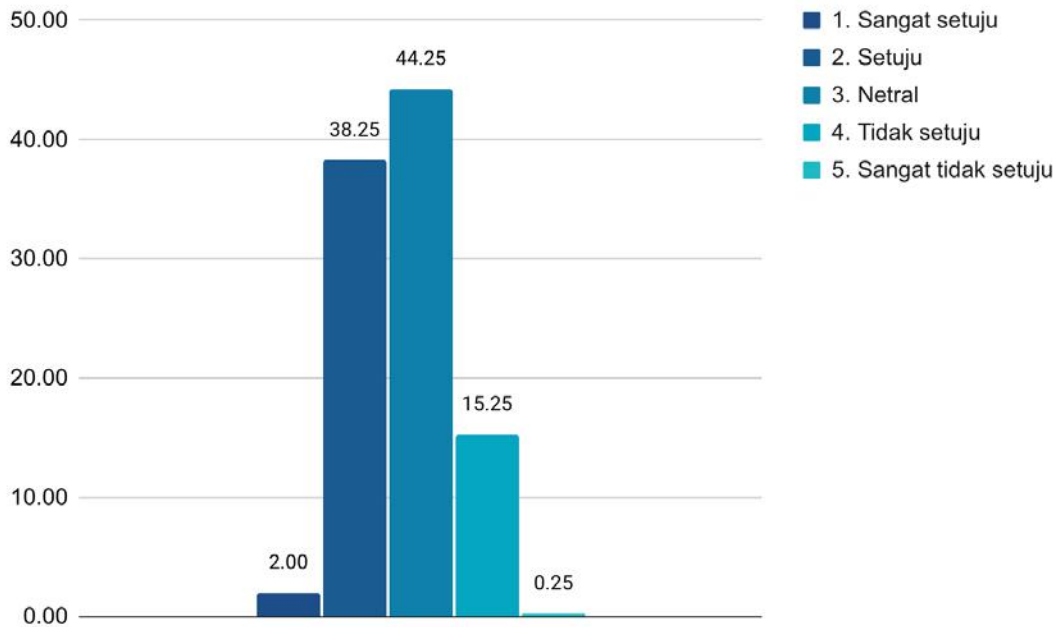


2) Bogor

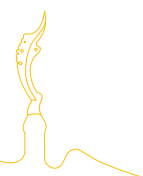
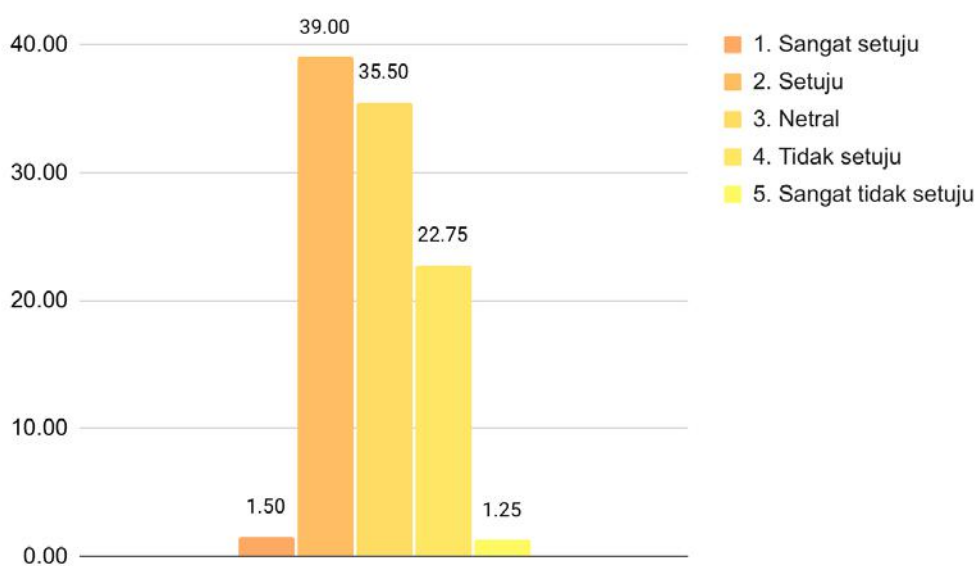


V-4-4. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor swasta kecil, misalnya: menjadi buruh pabrik, pekerja konstruksi/tukang, pegawai toko, sopir, dsb.?

1) Pekanbaru

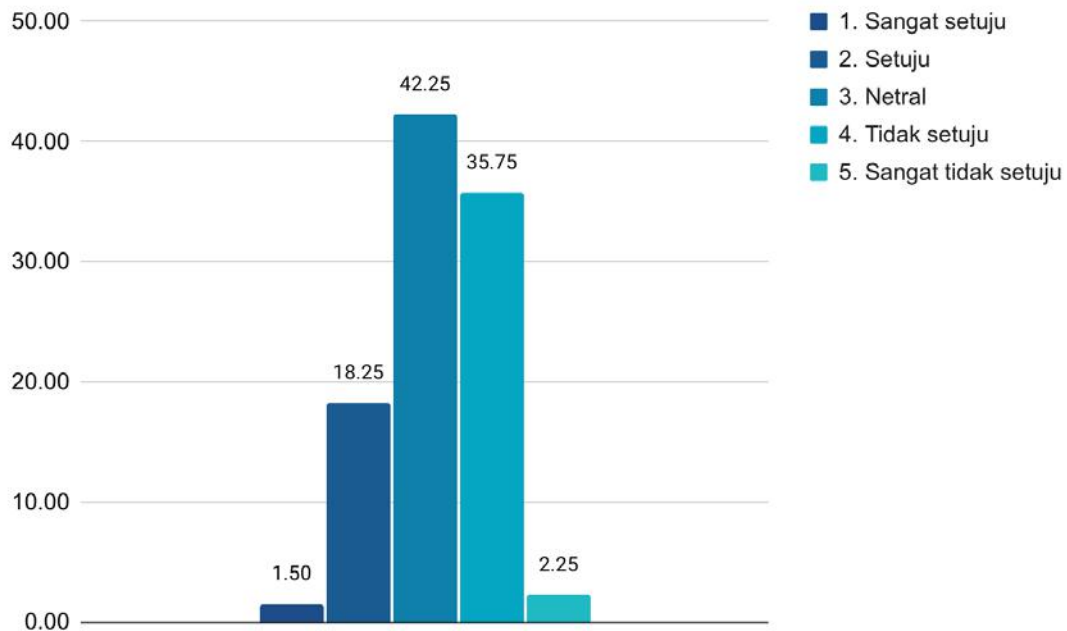


2) Bogor

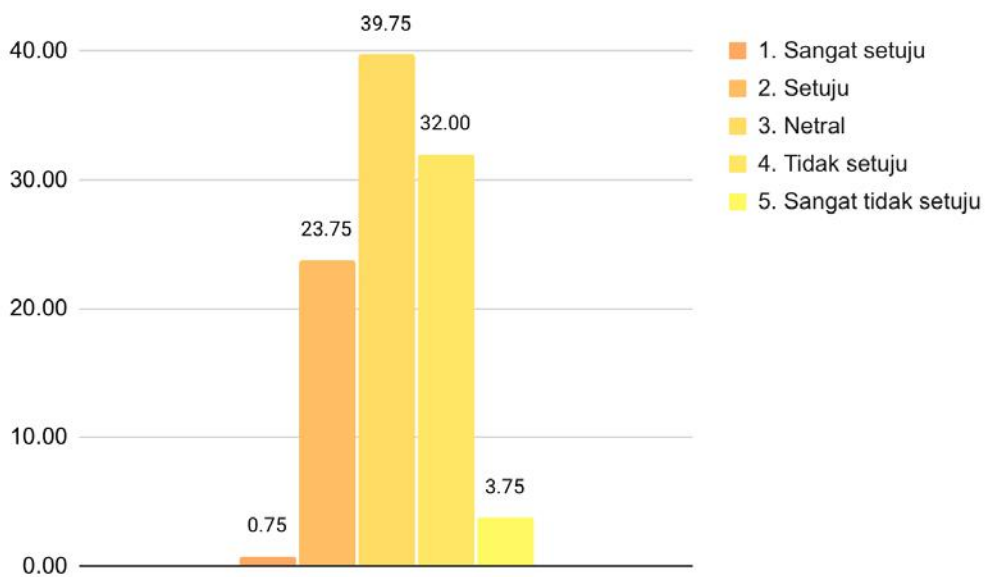


V-4-5. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan menjadi guru kontrak di sekolah negeri?

1) Pekanbaru

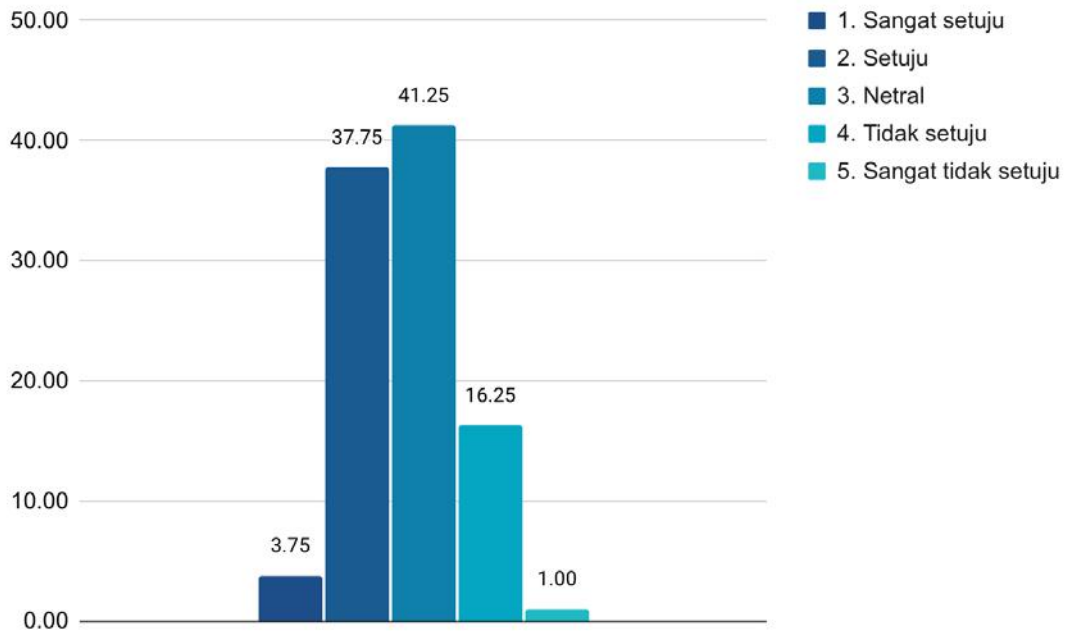


2) Bogor

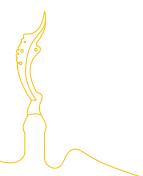
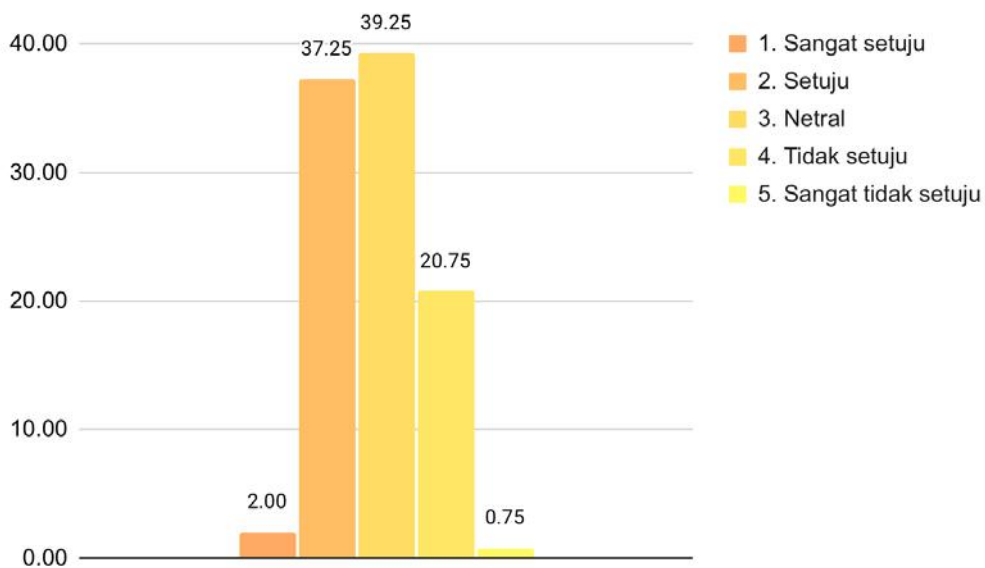


V-4-6. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan untuk berdagang di pasar bersama masyarakat?

1) Pekanbaru

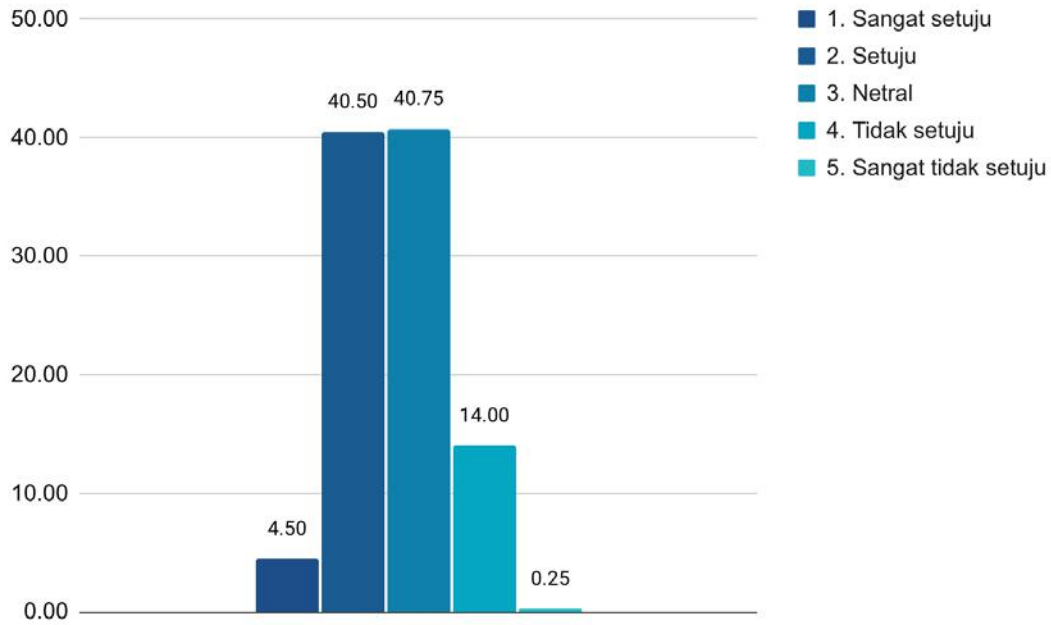


2) Bogor

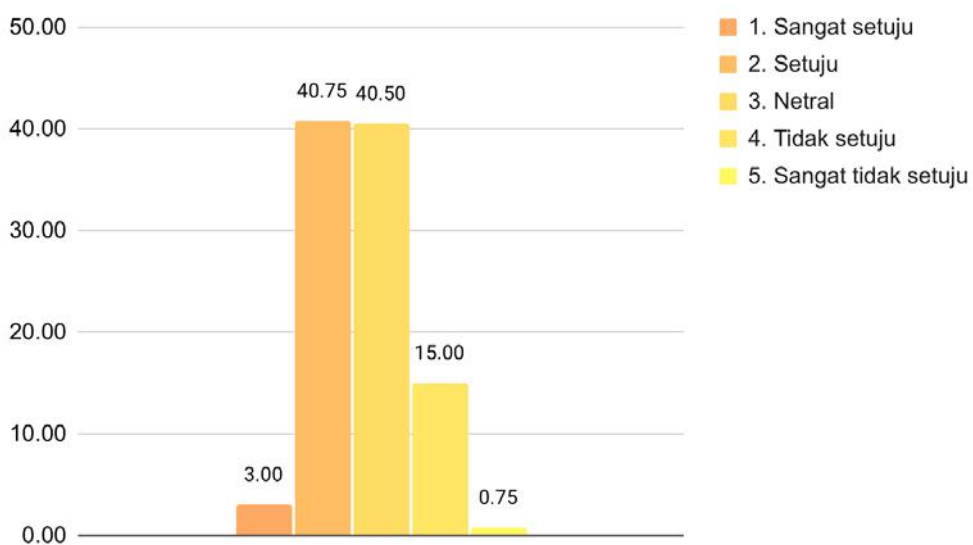


V-4-7. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri memiliki kesempatan berwiraswasta di bidang jasa, contoh: menjadi penjahit, bengkel, reparasi barang, dsb.?

1) Pekanbaru

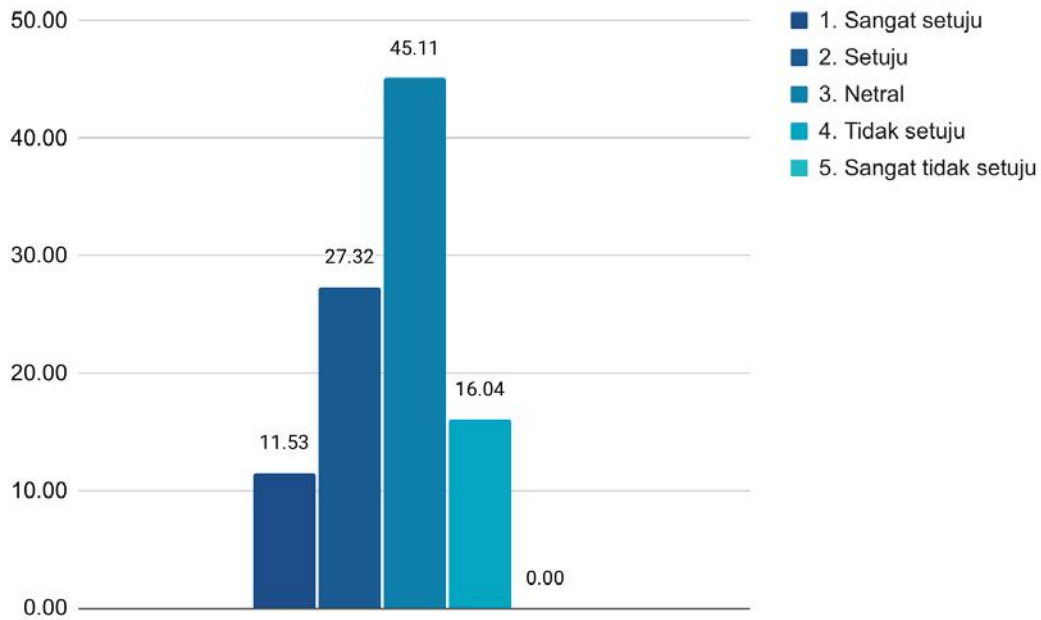


2) Bogor

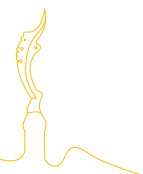
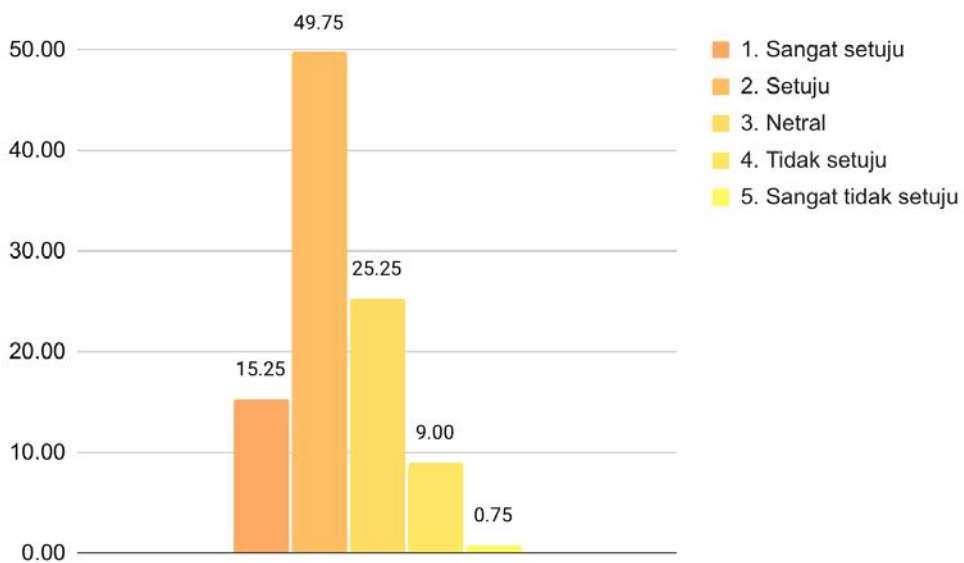


V-4-8. Setujukah Ibu/Bapak jika pengungsi luar negeri juga menjadi wajib pajak seperti masyarakat pada umumnya?

1) Pekanbaru

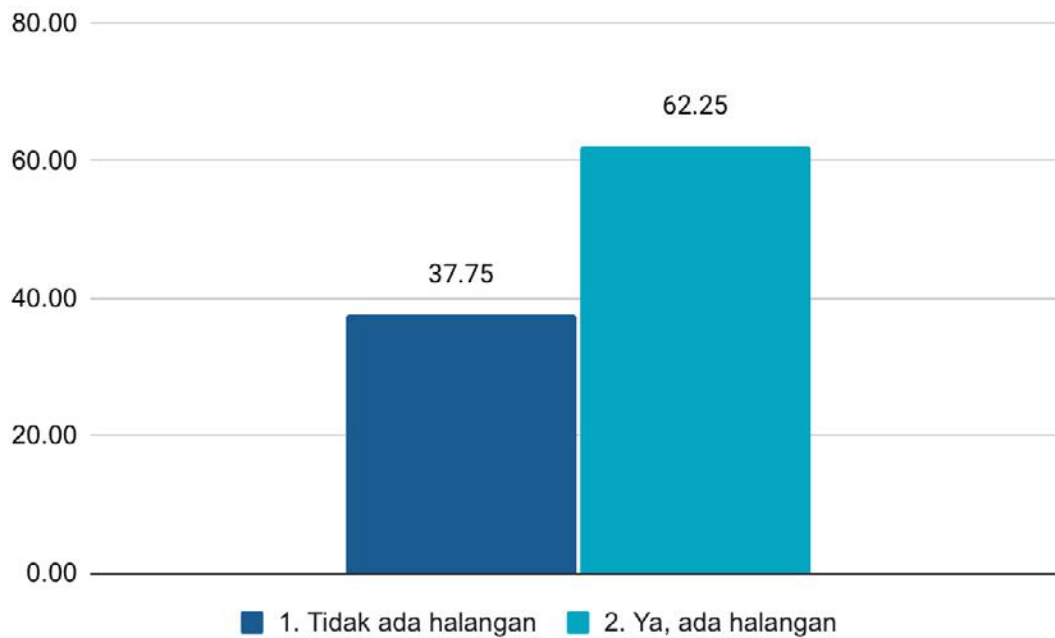


2) Bogor

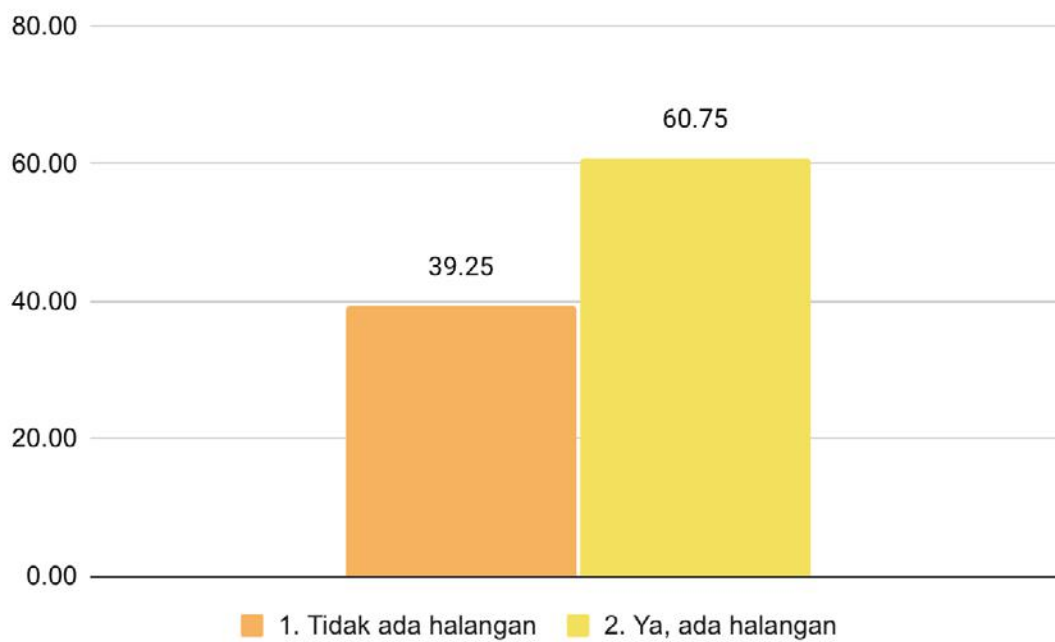


W-1. Menurut Ibu/Bapak, apakah ada halangan bagi pengungsi untuk mendapat akses bekerja di masyarakat?

1) Pekanbaru

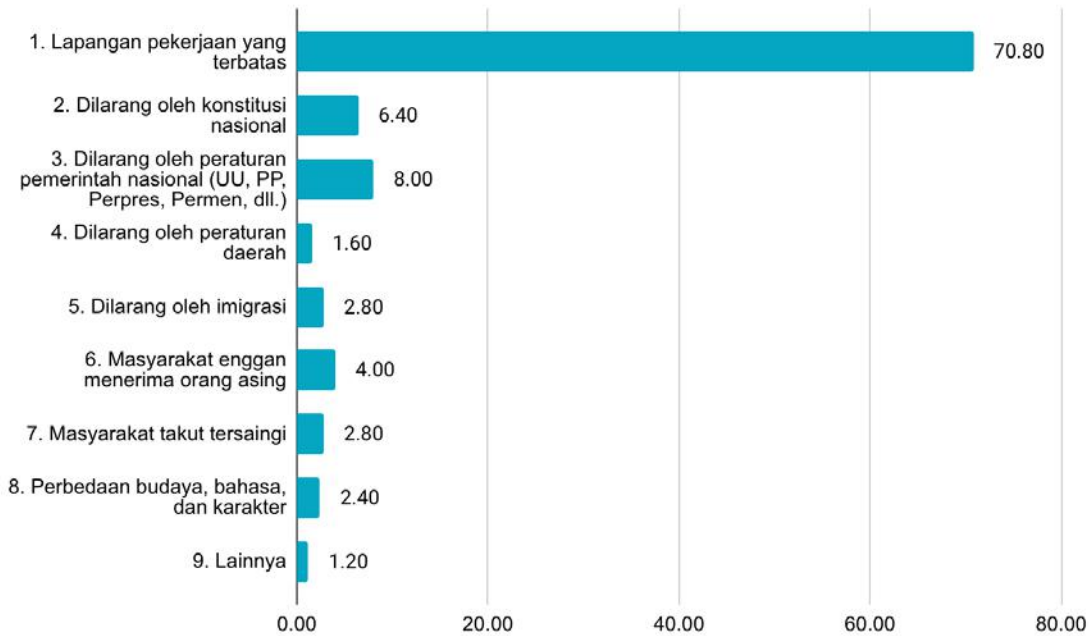


2) Bogor

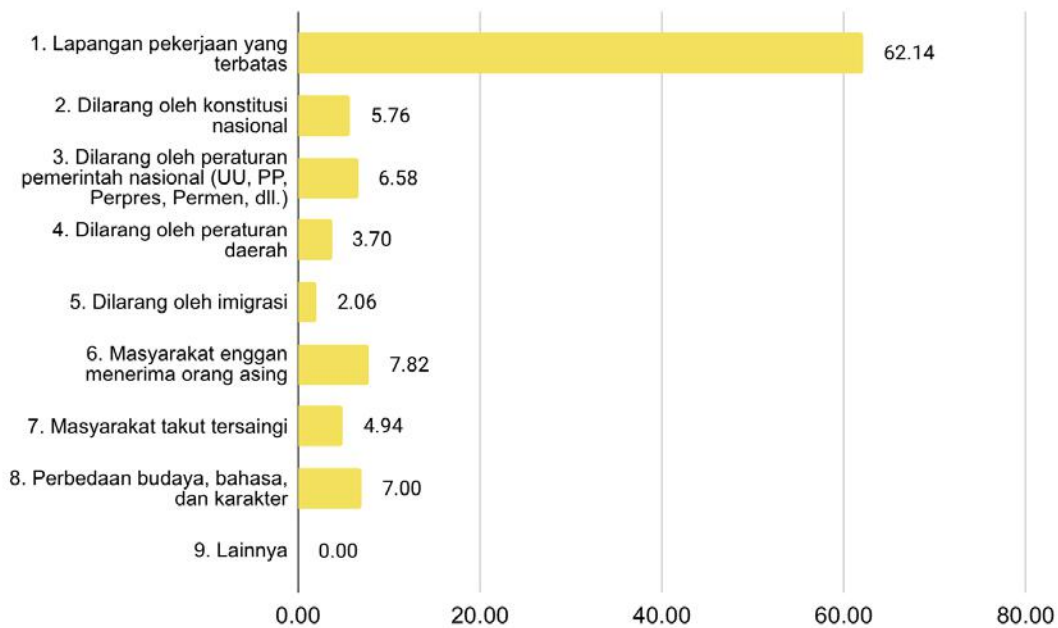


W-2. Apa halangan untuk membuka akses bekerja bagi pengungsi luar negeri di Indonesia?

1) Pekanbaru

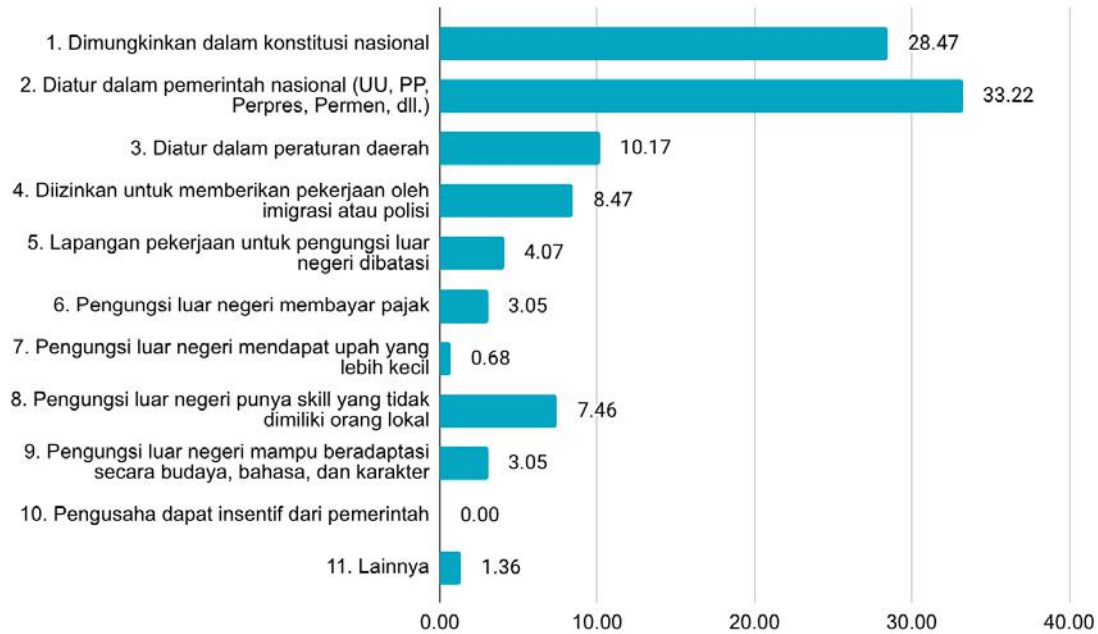


2) Bogor

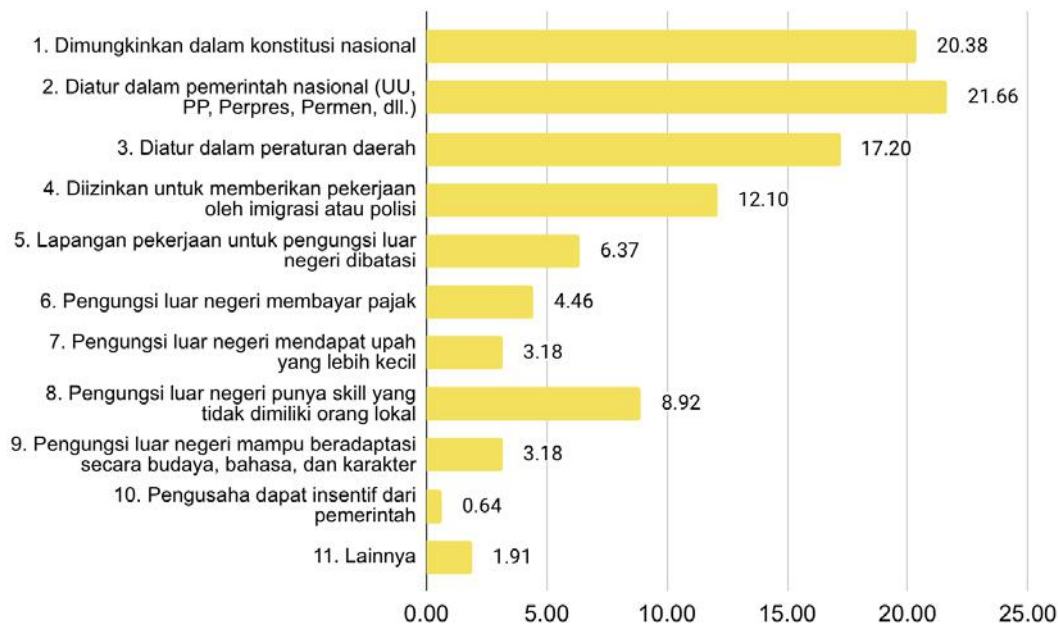


W-3. Menurut Ibu/Bapak, apa faktor pendorong untuk membuka akses bekerja bagi pengungsi luar negeri di Indonesia?

1) Pekanbaru

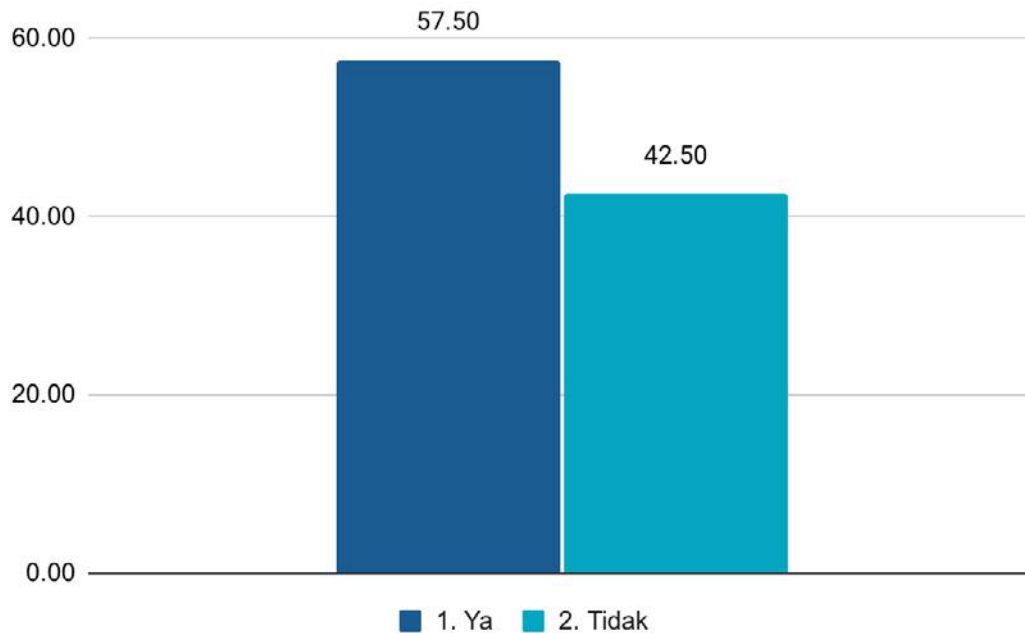


2) Bogor

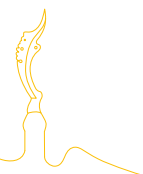
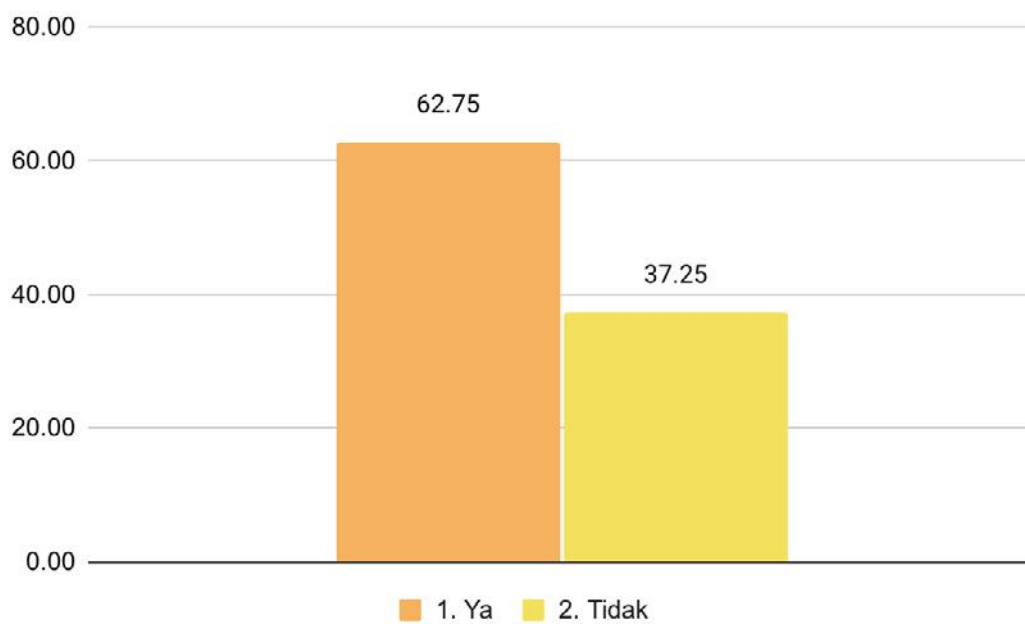


X-1. Secara umum, jika pengungsi luar negeri boleh bekerja di Indonesia, apakah Ibu/Bapak berkenan bekerja berdampingan dengan mereka?

1) Pekanbaru

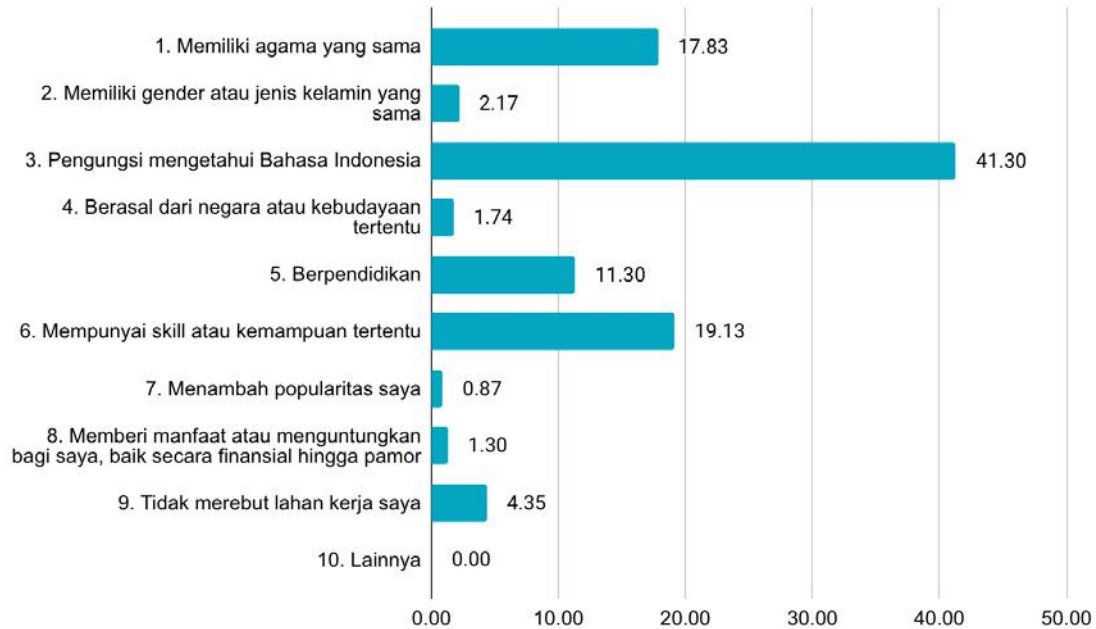


2) Bogor

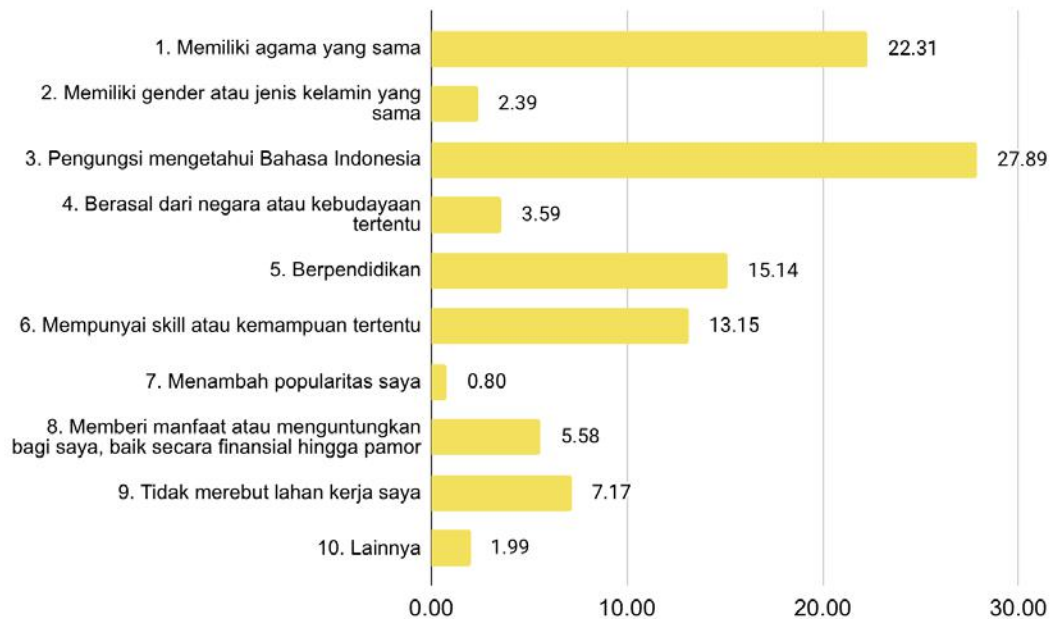


X-2. Ibu/Bapak akan berkenan bekerja berdampingan dengan pengungsi jika:

1) Pekanbaru

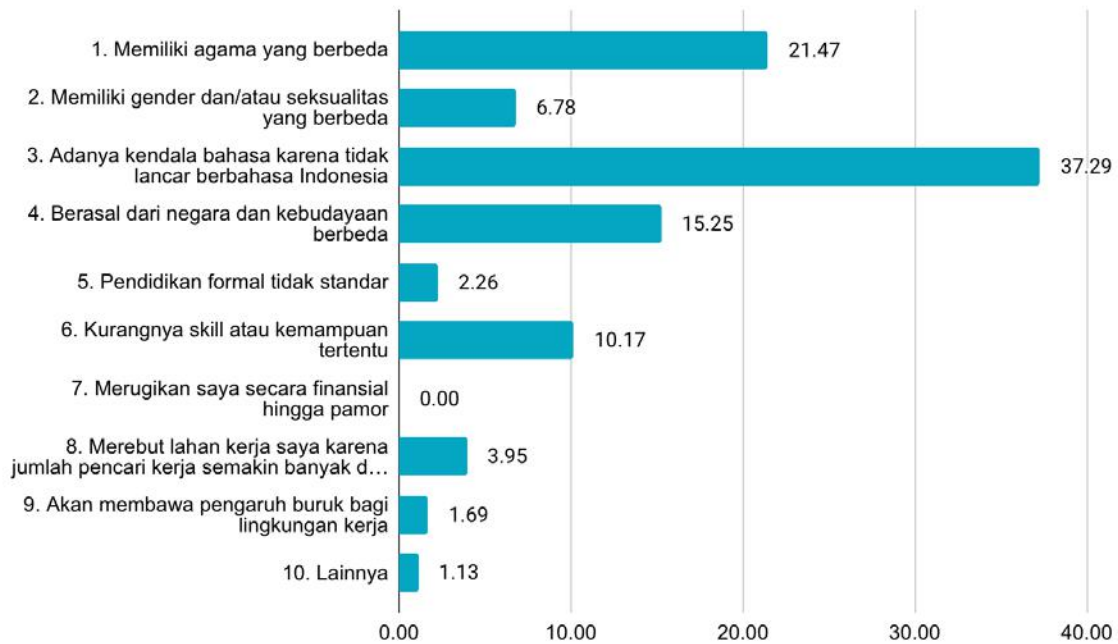


2) Bogor

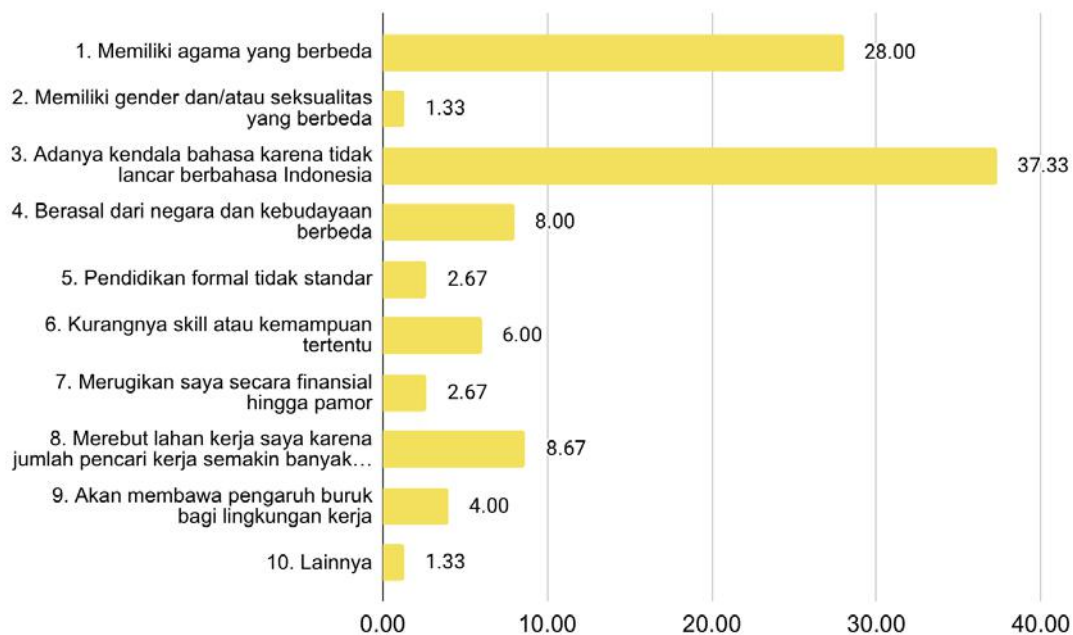


X-3. Ibu/Bapak tidak berkenan bekerja berdampingan dengan pengungsi karena:

1) Pekanbaru

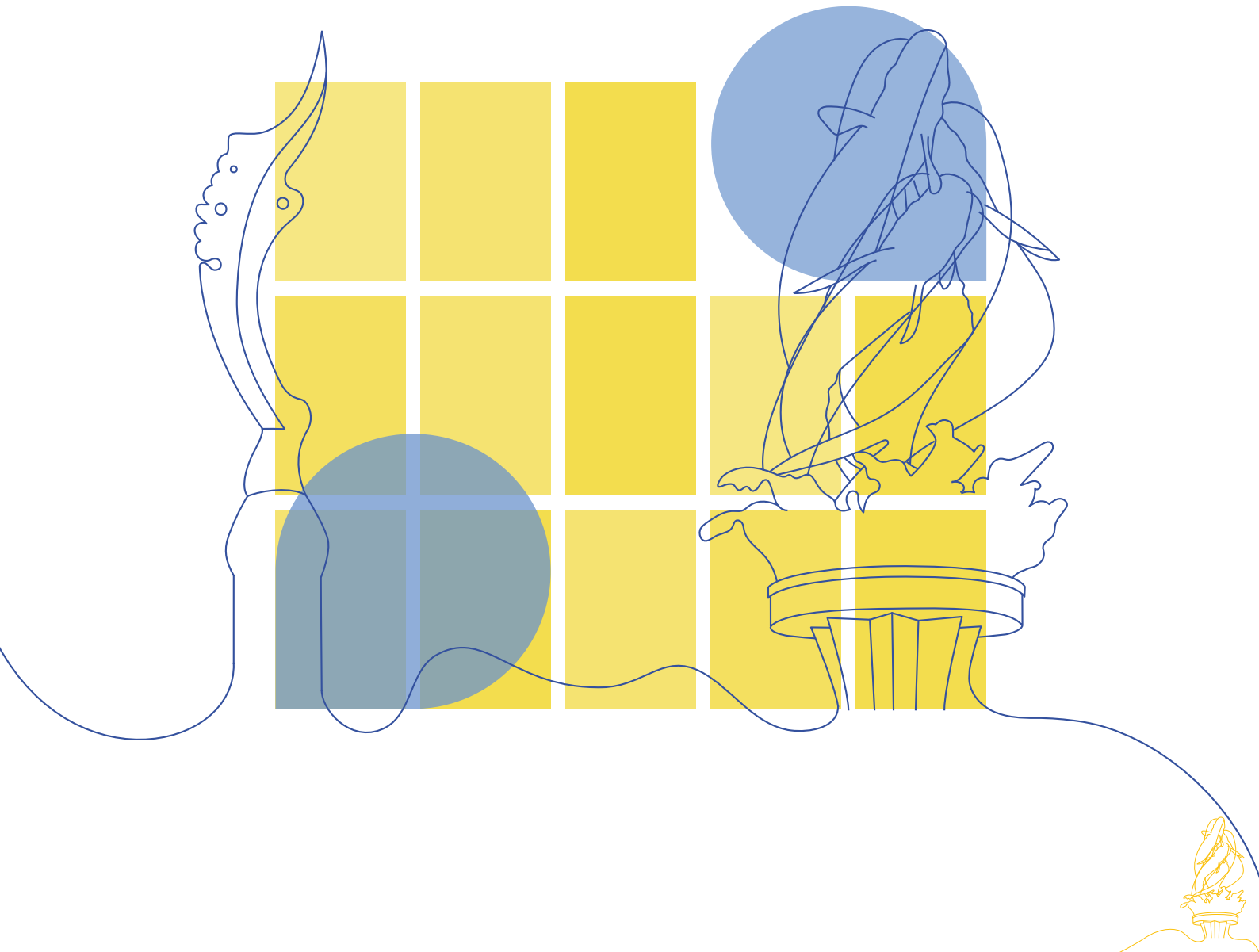


2) Bogor



6

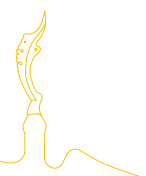
Kesimpulan



6. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan jajak pendapat publik di dua daerah, Bogor (Kabupaten dan Kota) dan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun tanggapan responden terhadap sebagian besar pertanyaan adalah serupa, jajak pendapat ini hanya mencerminkan perspektif publik di kedua wilayah yang disurvei. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran lengkap opini publik masyarakat Indonesia terhadap pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia, diperlukan penelitian atau survei tambahan di daerah lain. Kemudian, perlu juga dipahami bahwa jajak pendapat ini mencerminkan opini publik dalam jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu ketika survei dilakukan. Namun demikian, dalam batasan studinya, survei ini menemukan bahwa, meskipun masyarakat Indonesia kurang memiliki pemahaman umum tentang isu migrasi paksa dan peran Indonesia dalam perlindungan pengungsi asing, mereka bersimpati terhadap nasib para pengungsi. Selain itu, masyarakat Indonesia tidak menolak gagasan pemerintah Indonesia melindungi pengungsi internasional.

Studi ini mengukur integrasi sosial di masyarakat dalam domain berikut: koneksi sosial, keamanan dan stabilitas, kompetensi bahasa dan budaya, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Karena integrasi sosial adalah proses dinamis yang membutuhkan saling pengertian di semua pihak, salah satu komponen terpenting untuk integrasi sosial adalah kesediaan masyarakat tuan rumah untuk mengakomodasi orang asing, termasuk pengungsi asing, ke dalam masyarakat mereka. Temuan survei ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia tidak menentang keberadaan pengungsi di masyarakat. Memang, interaksi antara masyarakat tuan rumah dan pengungsi sebagian besar masih terbatas. Namun, interaksi berpotensi untuk meningkat karena komunitas tuan rumah menyambut baik gagasan agar pengungsi berpartisipasi dalam kegiatan publik, pendidikan, dan memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Mengenai prospek membuka akses pekerjaan bagi pengungsi, sebagian besar responden bersikap netral terhadap akses pengungsi ke pekerjaan tingkat menengah dan tinggi. Namun, mereka setuju terhadap sektor wira usaha jasa dan bisnis perdagangan. Temuan survei yang paling penting adalah tentang bagaimana responden menekankan pentingnya kemampuan bahasa Indonesia para pengungsi dan kesamaan agama saat berinteraksi dengan pengungsi. Dalam berbagai pertanyaan yang berbeda, responden memberikan tanggapan yang serupa yakni tentang kefasihan pengungsi untuk berbahasa Indonesia dan kesamaan agama akan meningkatkan interaksi antara masyarakat lokal dan pengungsi.

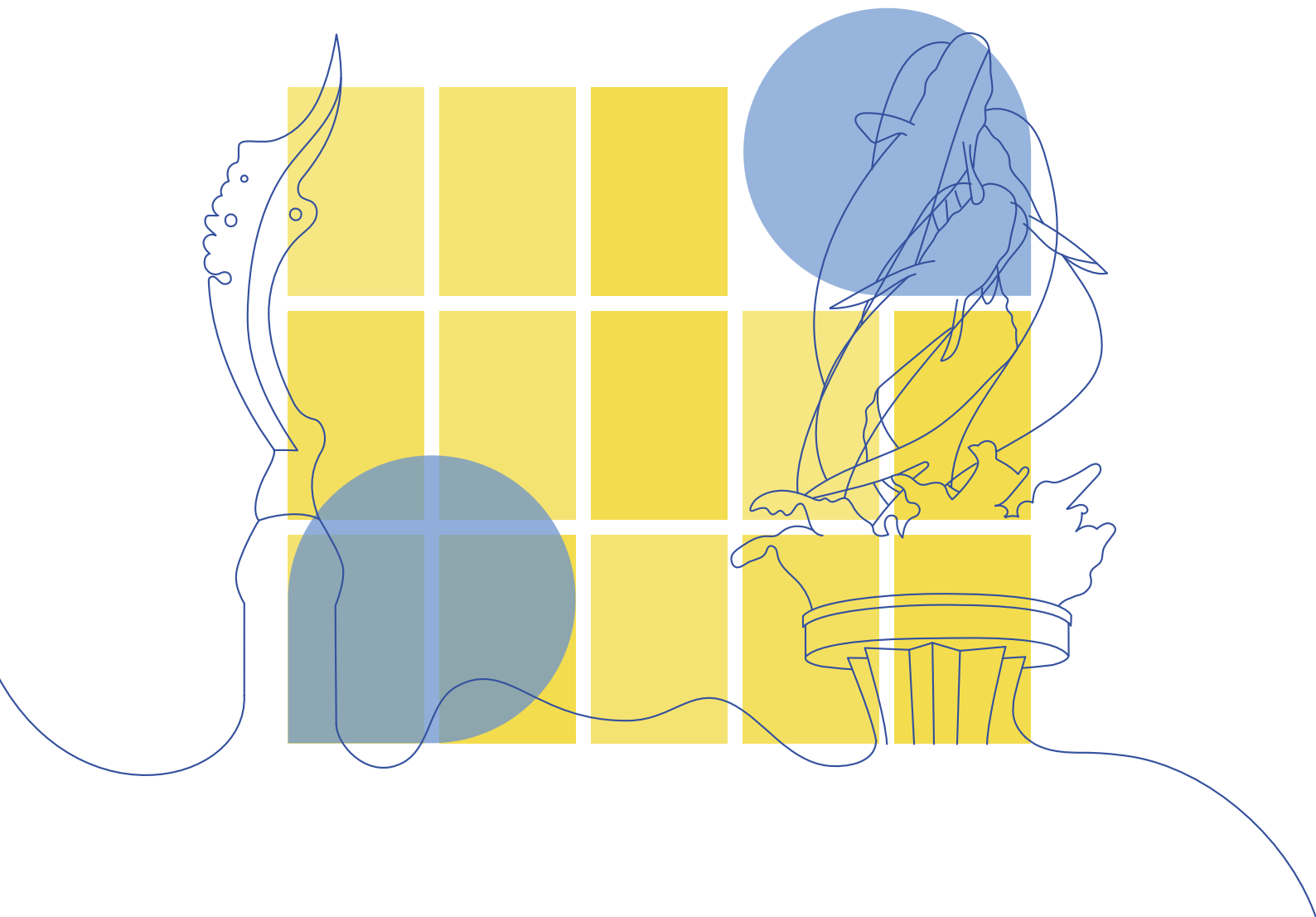


Secara keseluruhan, di hampir semua domain yang dievaluasi, tanggapan positif dan netral dari responden jauh lebih banyak daripada sentimen negatif mereka. Data dan temuan survei ini dapat digunakan untuk memandu upaya integrasi sosial di masa depan, dengan penekanan khusus pada kemandirian ekonomi bagi para pengungsi.

Survei ini berkesimpulan bahwa berdasarkan temuan-temuan yang ada, integrasi sosial pengungsi ke dalam komunitas lokal Indonesia adalah mungkin. Tentu saja, kekhawatiran publik terhadap beberapa persoalan harus dipertimbangkan dan berbasis pada dukungan positif masyarakat yang sudah ada. Akhirnya survei ini berharap agar sikap non-oposisi publik terhadap pengungsi asing dan pencari suaka menjadi dasar bagi aktor-aktor terkait dalam upaya advokasi yang lebih inklusif menuju integrasi sosial.



Referensi & Tambahan



Referensi

- Ager, Alastair, and Alison B. Strang. "Understanding Integration: A Conceptual Framework." *Journal of Refugee Studies* 21, no. 2 (April 18, 2008): 166–91. <https://doi.org/10.1093/jrs/fen016>.
- Atfield, Gaby, Kavita Brahmhatt, and Therese O'Toole. "Refugees' Experiences of Integration." Refugee Council and University of Birmingham, 2007.
- Bayu, Dimas Jarot. "Jokowi Minta Masyarakat Tak Anti Asing" Katadata. September 18, 2019. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a4e6d82fed/jokowi-minta-masyarakat-tak-anti-asing>
- Hovil, Lucy, Gil Loescher, Katy Long, Nando Sigona, and Lucy Hovil. "Local Integration." In *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*, edited by Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, and Nando Sigona. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0042>.
- Strang, Alison B., and Neil Quinn. "Integration or Isolation? Refugees' Social Connections and Wellbeing." *Journal of Refugee Studies*, June 29, 2019. <https://doi.org/10.1093/jrs/fez040>.
- UNHCR. "Global Trends Forced Displacement in 2020." UNHCR, June 18, 2021. <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>.
- UNHCR Indonesia. "Comprehensive Solutions." Accessed November 10, 2021. <https://www.unhcr.org/id/en/comprehensive-solutions>.
- . "Fact Sheet Indonesia September 2021." Accessed November 10, 2021. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf>.
- . "Figures at A Glance." Accessed November 10, 2021. <https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>
- . "Monthly Statistics March 2021." Accessed April 10, 2021. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Monthly-Statistical-Report-March-2021.pdf>.
- United Nations. "Universal Declaration of Human Rights." Universal Declaration of Human Rights. Accessed December 12, 2021. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Weng, Suzie S, and Shinwoo Choi. "Examining Refugee Integration: Perspective of Community Members." *Journal of Refugee Studies* 34, no. 1 (July 13, 2019): 354–373. <https://doi.org/10.1093/jrs/fez049>



Tambahan

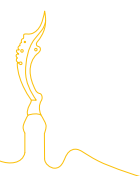
Profil Demografi Responden - dalam Persentase

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Jenis Kelamin		
Laki-laki	50	50
Perempuan	50	50

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Kawasan		
Pedesaan	0	57.5
Perkotaan	100	42.5

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Kelompok Umur		
18-20	5.25	5.75
21-25	8.75	8.5
26-30	8.5	9
31-35	9	12
36-40	14	17.25
41-45	14.25	13.5
46-50	17.25	10.25
51-55	11.5	8.5
56-60	6.75	9.25
61-65	4.75	6

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Agama		
Islam	95.75	97.75
Katolik	1	0.75
Kristen Protestan	2.25	0.75
Hindu	0	0
Buddha	0.75	0



Konghucu	0.25	0.5
Lainnya	0	0.25

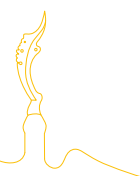
Kategori	Pekanbaru	Bogor
Suku		
Sunda	1.25	69.75
Jawa	16.25	15
Melayu	45.75	2
Batak	5.75	1.25
Betawi	1	9.25
Cina/Tionghoa	1	0.25
Arab	0.25	1
Lainnya	28.7	51.5

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Pendidikan		
Tidak pernah sekolah	0	2
Tidak tamat SD/ sederajat	0.5	6
Tamat SD/ sederajat	4.25	22
Tidak Tamat SLTP/ sederajat	0	0.75
Tamat SLTP/ sederajat	7.25	19
Tidak tamat SLTA/ sederajat	5.25	0.75
Tamat SLTA/ sederajat	53	32
Tamat D3/ diploma	2	1.5
Tidak tamat perguruan tinggi/ masih mahasiswa	6.75	3.75
Tamat S1 atau lebih tinggi	21	12.25

Kategori	Pekanbaru	Bogor
Pekerjaan		
Petani	0.75	3.5
Peternak	0	0.25
Nelayan	0	0
Buruh Kasar/Asisten Rumah Tangga	2.75	10.25



Bengkel/Jasa	3	0.5
Supir/Tukang Ojek	2.25	2.5
Satpam/Hansip	0.5	1
Kerja Tidak Tetap	4.5	1.75
Pedagang Warung/Kaki Lima	5.75	2.5
Pedagang Besar/Grosir	1.75	1.5
Wiraswata Kecil	11.25	11.25
Pengusaha/Kontraktor Besar	1	0.5
Pegawai Desa/Kelurahan	0.5	2
Pegawai/Karyawan Swasta	15.75	10.05
Aparatur Sipil Negara (Pemprov/Pemkab/Pemkot/BUMN/kantor pemerintahan lainnya)	3.75	2
Guru SD/SMP/SMA	2	1.75
Dosen PNS dan Swasta	3	0.75
Profesional (dokter, pengacara, dsb.)	0	0
Sudah Pensiun	3.75	3
Masih Sekolah/Kuliah	6.25	2.25
Tidak Bekerja	4	6.5
Mengurus Rumah Tangga	26.75	34.5
Lainnya	0.75	1.25



Tentang RDI UREF

Resilience Development Initiative (RDI) adalah lembaga think tank dari Indonesia yang berfokus dan berkontribusi pada studi tentang pembangunan berkelanjutan dan resiliensi. Urban Refugee Research Group (UREF) adalah kelompok penelitian di bawah RDI sebagai bagian dari klaster Children, Social Welfare and Health (CSWH). RDI UREF berfokus pada isu-isu pengungsi perkotaan dalam konteks pembangunan perkotaan.





ISBN 978-602-71186-4-5

